

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tahapan Penyusunan.....	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan	6
1.4 Hubungan Antar Dokumen	9
1.4.1 RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2018.....	10
1.4.2 RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dan RPJMD Periode 2013-2018.....	12
1.4.3 RKPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan KUA-PPAS Kabupaten Bangkalan Tahun 2018	13
1.5 Maksud dan Tujuan	14
1.6 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD	15
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	18
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah	18
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	18
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	50
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	90
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah	124
2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah.....	137
2.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Target Tahun 2017	137
BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN	209
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	209
3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017	209
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018	256

3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	263
3.2.1	Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	265
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH.....		274
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	276
4.2	Prioritas Pembangunan	293
4.3	Koneksitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Program Nawacita Jokowi-JK	294
4.4	Koneksitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	387
4.5	Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018	446
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH		555
5.1	Pagu Indikatif Progm-Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Untuk Tahun Anggaran 2018	555
BAB VI PENUTUP		605

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Arah Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 -----	13
Gambar 2.1. Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan -----	21
Gambar 2.2. Penggunaan Lahan Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 -----	32
Gambar 2.3. Angka Melek Huruf Tahun 2010 -2015-----	83
Gambar 2.4. Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2015-----	84
Gambar 2.5. Angka Partisipasi Murni (APM)-----	84
Gambar 2.6. Angka Partisipasi Kasar (APK)-----	86
Gambar 2.7. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bangkalan-----	87
Gambar 2.8. Sumber Air bersih yang digunakan Penduduk -----	103
Gambar 2.9. Gebang Kerta Susila Plus -----	130
Gambar 2.10. Surabaya Metropolitan Area -----	131
Gambar 4.2. Persentase Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada Masing-Masing Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 -----	445

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Jumlah Kelurahan /Desa, Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan----	19
Tabel 2.2. Letak, Tinggi,dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan -----	22
Tabel 2.3. Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan -----	23
Tabel 2.4. Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan -----	23
Tabel 2.5. Kedalaman Spektip Tanah Kabupaten Bangkalan -----	24
Tabel 2.6. Tekstur Tanah Kabupaten Bangkalan -----	25
Tabel 2.7. Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan-----	25
Tabel 2.8. Beberapa Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Bangkalan-----	26
Tabel 2.9. Banyaknya Hari Hujan per Bulanan Kabupaten Bangkalan -----	28
Tabel 2.10. Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 -----	36
Tabel 2.11. Jumlah Produksi Tanaman Holtikultura Kab. Bangkalan Tahun 2015-----	39
Tabel 2.12. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kab. Bangkalan Tahun 2015 -----	41
Tabel 2.13. Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kab. Bangkalan Tahun 2015 -----	43
Tabel 2.14. Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 -----	44
Tabel 2.15. Nilai Produksi Perikanan (Dalam Ribuan Rupiah)-----	45
Tabel 2.16. Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 -----	48
Tabel 2.17. Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 -----	49
Tabel 2.18. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2015 (Juta Rupiah)----	51
Tabel 2.19. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 – 2015 (Juta Rupiah -	61
Tabel 2.20. Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bangkalan -----	72
Tabel 2.21. Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2015 (Persen)-----	75
Tabel 2.22. IPM Kabupaten BangkalanTahun 2010–2015 -----	86

Tabel 2.23. Organisasi Kesenian di Kabupaten Bangkalan -----	88
Tabel 2.24. Perkembangan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas	89
Tabel 2.25. Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2015 --	97
Tabel 2.26. POSYANDU menurut jenisnya di Kabupaten Bangkalan -----	99
Tabel 2.27. Fasilitas Kesehatan Menurut Kepemilikan Tahun 2015 -----	101
Tabel 2.28. Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012– 2015	
Kabupaten Bangkalan -----	102
Tabel 2.29. Jumlah Rumah Tangga dan Jenis sarana Tempat Buang Air	
Besar-----	103
Tabel 2.30. Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang 2011-2015-----	104
Tabel 2.31. Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan -----	105
Tabel 2.32. Indikator Urusan Perhubungan -----	106
Tabel 2.33. Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup -----	107
Tabel 2.34. Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil-----	107
Tabel 2.35. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-----	108
Tabel 2.36. Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga	
Sejahtera -----	109
Tabel 2.37. Indikator Kinerja Urusan Sosial-----	109
Tabel 2.38. Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan-----	110
Tabel 2.39. Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ---	111
Tabel 2.40. Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal -----	112
Tabel 2.41. Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan -----	112
Tabel 2.42. Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga -----	113
Tabel 2.43. Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam	
Negeri -----	113
Tabel 2.44. Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum,	
Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,	
dan Persandian -----	115
Tabel 2.45. Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan-----	117
Tabel 2.46. Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan	
Pemerintahan Desa-----	117
Tabel 2.47. Indikator Kinerja Urusan Statistik-----	118
Tabel 2.48. Indikator Kinerja Urusan Kearsipan-----	118
Tabel 2.49. Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika -----	119
Tabel 2.50. Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan-----	119

Tabel 2.51. Indikator Kinerja Urusan Pertanian -----	120
Tabel 2.52. Indikator Kinerja Urusan Kehutanan-----	120
Tabel 2.53. Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral -----	121
Tabel 2.54. Indikator Kinerja Urusan Pariwisata -----	121
Tabel 2.55. Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan -----	122
Tabel 2.56. Indikator Urusan Perdagangan -----	122
Tabel 2.57. Indikator Urusan Perindustrian -----	123
Tabel 2.58. Jumlah Perusahaan dan jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Industri -----	123
Tabel 2.59. Indikator Urusan Ketrasmigrasian -----	124
Tabel 2.60. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010-2014-----	125
Tabel 2.61. Jumlah Angkutan Darat Kabupaten Bangkalan Tahun 2009– 2013 -----	133
Tabel 2.62. Data Jalur Angkutan Umum Kabupaten Bangkalan -----	133
Tabel 2.63. Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan-----	135
Tabel 2.64. Angka Beban Ketergantungan-----	136
Tabel 2.65. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD -----	138
Tabel 3.1. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 (Dalam Jutaan Rupiah) -----	211
Tabel 3.2. Laju Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 (dalam persen) -----	220
Tabel 3.3. Laju Implisit PDRB (Inflasi Daerah) Menurut Rincian Lapangan Usaha Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 (dalam persen) -----	227
Tabel 3.4. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 -----	233

Tabel 3.5. Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 (Dalam Jutaan Rupiah) -----	235
Tabel 3.6. Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Selama 7 Tahun Terakhir (dalam persentase)-----	246
Tabel 3.7. Proyeksi PDRB Seri 2010 ADHK dan ADHB, Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit PDRB, dan Proyeksi Distribusi Persentase PDRB Tahun 2017 Kabupaten Bangkalan -----	249
Tabel 3.8. Proyeksi PDRB Seri 2010 ADHK dan ADHB, Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit PDRB, dan Proyeksi Distribusi Persentase PDRB Tahun 2018 Kabupaten Bangkalan -----	257
Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018-----	267
Tabel 3.10 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018-----	269
Tabel 3.11. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan 2018 -----	271
Tabel 4.1. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran -----	279
Tabel 4.2. Koneksitas Nawacita dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018 -----	295
Tabel 4.3. Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Pusat (NAWACITA) dengan Anggaran Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-----	299
Tabel 4.4. Koneksitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 -----	388
Tabel 4.5 Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada Masing-Masing Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 -----	389
Tabel 4.6. Alokasi Anggaran Pada Setiap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-----	447

Tabel 4.7. Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Dengan Program Terhadap Indikator Dan Target Serta Opd Yang Bertanggungjawab Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-----	501
Tabel 5.1. Angka Pagu Indikatif Per Prioritas Pembangunan dan Program ---	556

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016-----	233
Grafik 3.2 Struktur Ekonomi Kabupaten Bangkalan-----	246

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah ditandai dengan Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah di revisi terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan otonomi daerah adalah pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah dalam rangka mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang, terintegrasi, sistematis oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan sesuai dengan amanat otonomi daerah. Tentu perencanaan yang disusun dalam kerangka dan tidak menyimpang dari perencanaan pembangunan nasional sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses untuk merancang perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Disamping itu, perencanaan pembangunan merupakan tahap awal dalam proses pembangunan sebagai pedoman/acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dengan mendayagunakan segala potensi sumber daya yang ada. Melalui perencanaan yang baik diharapkan mampu mengatasi berbagai permasalahan pembangunan yang dihadapi dan mengembangkan potensi yang dimiliki guna meningkatkan daya saing daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pada tahun anggaran 2018 merupakan tahun terakhir dari RPJMD Kabupaten Bangkalan 2013-2018 sekaligus menjadi periode terakhir masa pemerintahan Bupati R.KH. Makmun Ibnu Fuad, SE dan Drs. H Mondir Rofi'i periode 2013 sampai dengan 2018. Oleh karena itu, tahun 2018 merupakan tahun terakhir untuk menunaikan "janji politik" sekaligus upaya pencapaian terakhir untuk memastikan ketercapaian target pembangunan Kabupaten

Bangkalan yang tertuang dalam dokumen RPJMD tahun 2013-2018, yang telah dilakukan perubahan terhadap RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018, yang sudah dilakukan perubahan di tahun 2017 ini, Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan perencanaan tahunan yang sudah masuk tahun terakhir dengan fokus kepada **“Peningkatan Daya Saing Investasi Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Optimalisasi Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan”**. Selain itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi: **“Terwujudnya Bangkalan Yang Makmur, Mandiri dan Agamis”**.

Selain itu, rencana pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dalam rangka mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018. Selain itu, penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 juga mengacu pada pelaksanaan agenda pembangunan nasional (NAWACITA) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 wajib memberlakukan peraturan tersebut. Oleh karena itu, sebagai respon terhadap PP Nomor 18 Tahun 2016 tersebut Pemerintah Kabupaten Bangkalan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang berimplikasi atau berdampak terhadap struktur organisasi penyelenggaraan program dan kegiatan yang ada dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 menerapkan pendekatan politik, teknokratik, *top - down* dan *bottom - up*, serta partisipatif. Pendekatan politik yang dimaksud adalah dengan cara mengedepankan proses politik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada prinsipnya pendekatan politik memandang bahwa proses penyusunan rencana harus mengedepankan kehendak dan kepentingan rakyat pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya kepada organisasi politik dan Kepala Daerah

berdasarkan program – program pembangunan yang ditawarkan. Selain itu, pendekatan politik juga dilakukan melalui pelibatan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang).

Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 pada prinsipnya mengedepankan penggunaan metoda dan kerangka berpikir ilmiah dan sistematis dalam melakukan analisis masalah, menyusun perkiraan ekonomi makro dan menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan melalui forum diskusi dan konsultasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pejabat fungsional perencana, tenaga ahli dari lembaga/institusi dan perguruan tinggi, serta staf perencana dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Pendekatan *top-down* dilakukan dengan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018 dan arah kebijakan dalam RPJMN 2015-2019. Pendekatan *bottom-up* dilakukan dengan memperhatikan usulan dari desa/kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten melalui forum Musrenbang mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kota/Kabupaten. Hasil usulan perencanaan dari bawah (*bottom-up*) selanjutnya disinkronkan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2018.

Pendekatan partisipatif dilakukan dengan mengembangkan forum konsultasi publik yang melibatkan tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah tahun 2018. Selain itu, di dalam proses penyusunan RKPD Tahun 2018 juga mempertimbangkan pendekatan berbasis kewilayahan sesuai dengan permasalahan dan potensi setiap desa/kelurahan, kecamatan dan kota/kabupaten, terutama dalam pengembangan sistem administrasi pemerintahan dan pusat-pusat permukiman serta pusat-pusat usaha. Dengan menerapkan seluruh pendekatan perencanaan tersebut, RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional.

RKPD memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha (UU. No. 25 tahun 2004). RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan pedoman untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018, serta sebagai dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018. RKPD dimaksud juga menjadi pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja OPD Tahun 2018.

1.2 Tahapan Penyusunan RKPD

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 ini dilakukan melalui tahapan: pelaksanaan Musrenbang Kelurahan/Desa dan Musrenbang Kecamatan untuk menyusun usulan prioritas kegiatan kelurahan dan kecamatan; penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Kelurahan dan Kecamatan; pembahasan Rancangan Awal RKPD; penyusunan Rancangan RKPD; pelaksanaan Musrenbang RKPD; perumusan Rancangan Akhir RKPD dan; penetapan RKPD (Permendagri Nomor 54 Tahun 2010). Tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 secara garis besar adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang memuat hasil musyawarah desa, arah kebijakan pembangunan desa/kelurahan, dan program dan prioritas desa/kelurahan serta kecamatan sesuai dengan kewenangan yang diberikan,
- 2) Pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Musrenbang Kecamatan untuk menyusun usulan prioritas kegiatan desa/kelurahan dan kecamatan yang akan dilaksanakan tahun 2018,
- 3) Penyusunan Pra Rancangan Awal RKPD mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, memperhatikan masukan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Kecamatan, serta mempertimbangkan hasil Reses DPRD Kabupaten Bangkalan melalui jaring asmaranya yang dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD,

- 4) Penyusunan Rancangan Awal RKPD yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rancangan RKPD, masukan bagi pelaksanaan musrenbang kabupaten, dan dasar penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD,
- 5) Penyusunan hasil Musrenbang Kabupaten yang selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan lebih lanjut dan perbaikan Rancangan RKPD menjadi Rancangan Akhir RKPD. Dokumen Rancangan Akhir RKPD ini selanjutnya akan ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, penyusunan RAPBD Tahun 2018 dan masukan bagi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional RKP. Tema Musrenbang Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 untuk penyusunan RKPD Tahun 2018 adalah “Peningkatan Daya Saing Investasi Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Optimalisasi Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan”,
- 6) Perumusan dan penetapan RKPD Tahun 2018 dilakukan melalui proses yang komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, keterpaduan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam menyusun RKPD Tahun 2018 sejak tahun 2006 telah menggunakan perencanaan dan penganggaran terpadu (*Unified Budgeting*) yang salah satunya, yaitu dengan menggunakan aplikasi sistem perencanaan daerah (SIRENDA) berbasis website. Walaupun dalam penerapannya *unified budgeting* ini masih belum optimal dan belum dipahami sepenuhnya oleh berbagai pihak sehingga perlu dilakukan sosialisasi dan workshop kembali sebagai akibat adanya perputaran pegawai.

Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu (*Unified Budgeting*) ini untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, kegiatan dan pagu anggaran yang akan dilaksanakan oleh OPD benar-benar dihasilkan melalui proses perencanaan yang transparan sejak dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten, serta melalui penjangkaran aspirasi masyarakat pada saat anggota DPRD melakukan kegiatan dengar pendapat warga di berbagai desa/kelurahan dan kecamatan yang

dituangkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan APBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.

Dengan tahapan penyusunan RKPD tersebut, RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 diharapkan dapat menjamin pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018; menjaga konsistensi pelaksanaan kebijakan jangka panjang daerah dalam RPJPD Kabupaten Bangkalan; adanya sinkronisasi kesesuaian proker RKPD dengan RPJMD Kabupaten dan RPJMD Provinsi Jawa Timur dan mendukung pelaksanaan Sembilan Agenda Prioritas Nasional (NAWACITA). Selain itu, RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 juga dimaksudkan untuk memperkuat kemitraan dan kerjasama yang baik antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan DPRD Kabupaten Bangkalan dengan mengakomodasi masukan dari hasil reses DPRD yang sudah diparipurnakan dan rekomendasi DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Kabupaten Bangkalan Tahun 2016.

RKPD Tahun 2018 juga diharapkan dapat memenuhi aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai forum dialog dan diskusi, dan menjadi pedoman bagi seluruh OPD dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan; menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan didasarkan pada landasan hukum sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 09),

- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286),
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),
- 6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
- 8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan,
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663),
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664),
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693),
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815),
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114),
- 19) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95),

- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310),
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517),
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518),
- 23) Permendagri 32 Tahun 2017 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 95),
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009-2029,
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2005 – 2025,
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018,
- 27) Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
- 28) Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan tahun 2017.

1.4 Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2018 merupakan bagian dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, dan bagian dari

pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terpadu sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dokumen RKPD Tahun 2018 menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang juga terdiri dari Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam praktiknya, penyusunan RKPD Tahun 2018 juga disusun dengan memperhatikan kebijakan tingkat provinsi dan nasional. Penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang juga merupakan *breakdown* dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif.

Dengan proses dan substansi materi yang lengkap dan proses yang sistematis, RKPD diharapkan dapat menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Dokumen RKPD ini akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selanjutnya KUA dan PPAS ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2018. RKA-SKPD ini dijadikan dasar untuk penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2018. Dengan demikian, dokumen RKPD ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018.

1.4.1 RKPD Kabupaten, RKPD Provinsi dan RKP Tahun 2018

Dokumen RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen pembangunan tahunan yang bisa dijadikan dasar bagi penyusunan prioritas RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 yang selanjutnya menjadi masukan dan rujukan RKP Tahun 2018 terutama yang menyangkut tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas program dan kegiatan, serta kerangka

pendanaan melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbangprov) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Keterkaitan RKPD Tahun 2018 dengan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 dan RKP Tahun 2018 juga menyangkut sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dan kebijakan Provinsi serta kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung pelaksanaan agenda pembangunan nasional Nawa Cita yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2015-2019 terutama menyangkut perwujudan:

- Cita 1* : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
- Cita 2* : Mengembangkan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
- Cita 3* : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
- Cita 4* : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- Cita 5* : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
- Cita 6* : Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
- Cita 7* : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- Cita 8* : Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
- Cita 9* : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 juga tetap memperhatikan arah kebijakan dari Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Jawa Timur sebagai penjabaran RPJMD Jawa Timur Tahun 2014-2019. Dengan demikian, dokumen RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dapat lebih integratif, komprehensif, sinergis, dan konstruktif dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan provinsi dan nasional.

1.4.2 RKPД Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 dan RPJMD Periode 2013-2018

Dokumen RKPД Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018 untuk mewujudkan visi:

“TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS”

RKPД Tahun 2018 juga menjabarkan misi pembangunan jangka menengah, yaitu:

- Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan yang Agamis, Produktif, Berkualitas Dan Berdaya Saing
- Misi 2 : Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal;
- Misi 3 : Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi;
- Misi 4 : Mengelola Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan;
- Misi 5 : Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi;
- Misi 6 : Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Bersih, Efektif dan Efisien serta Berorientasi pada Pelayanan Publik.

Tema RKPД Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah **“Peningkatan Daya Saing Investasi Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis dan Optimalisasi Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan”**. Oleh sebab itu, seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam RKPД Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan; dan mempercepat pencapaian berbagai tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Bupati Bangkalan Tahun 2013-2018.

Gambar 1.1.
Arah Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018



1.4.3 RKPD, Rencana Kerja (Renja) OPD dan KUA – PPAS Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 memuat Rencana Kerja (Renja) OPD Tahun 2018 dan representasi juga dari Rencana Strategis OPD tahun 2013 - 2018. Renja OPD Tahun 2018 memuat kebijakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi setiap OPD yang diperoleh melalui Musrenbang. Sebagai bagian dari langkah pembaharuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Renja OPD Tahun 2018, setiap program dan kegiatan yang tercantum pada RKPD Tahun 2018 dan Renja OPD Tahun 2018 di dalam penyusunannya diarahkan untuk menggunakan perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan kearifan budaya lokal.

RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan dasar sekaligus pijakan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018 dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018. Penyusunan KUA-PPAS Tahun 2018 digunakan untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, seluruh kebijakan, program dan kegiatan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Dari adanya hubungan antar dokumen tersebut, maka RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013 – 2018, yang telah diubah pada tahun 2017, disusun dengan mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017 serta berpedoman pada Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 – 2025.

Disamping itu juga, berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 – 2029.

1.5 Maksud dan Tujuan

RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bangkalan. RKPD memuat rencana kerja, program dan indikator kegiatan yang bersifat terukur, terpadu, berorientasi pada pendekatan fungsi pembangunan dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD Kabupaten Bangkalan. RKPD juga akan menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2018, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2018 sampai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2018.

Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RKPD tidak hanya akan didanai oleh anggaran daerah, tetapi juga akan didukung program pembangunan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat Provinsi (APBD Provinsi) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun investasi swasta serta partisipasi masyarakat.

Maksud dan Tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan satu acuan bagi DPRD Kabupaten Bangkalan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan seluruh Kecamatan di Kabupaten Bangkalan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2018 yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, dan APBN,

- 2) Menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA), rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018,
- 3) Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Penetapan Kinerja (Tapkin),
- 4) Memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Organisasi Perangkat Daerah dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,
- 5) Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan,
- 6) Menyediakan tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangkalan; serta menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD),
- 7) Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif, dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan,
- 8) Menggerakkan dan mengarahkan seluruh pemangku kepentingan, dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Bangkalan,
- 9) Menjadi acuan dalam pengembangan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan, pelaku usaha swasta dan masyarakat; dan antara Pemerintah Kabupaten Bangkalan dengan pemerintah daerah lainnya,
- 10) Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

1.6 Sistematika Penyusunan Dokumen RKPD

Sistematika penyusunan dokumen RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I

Pendahuluan

Pada Bab ini menjelaskan latar belakang, tahapan penyusunan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan dokumen RKPD.

BAB II

Evaluasi Hasil

Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Dan Kebijakan Keuangan Daerah

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV

Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh OPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya.

BAB V

Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

BAB VI

Penutup

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian Utara. Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu dari empat (4) kabupaten yang ada di Pulau Madura yang terletak di ujung barat Pulau Madura serta merupakan pintu gerbang utama keluar dan masuk Pulau Madura. Secara geografis Kabupaten Bangkalan bersebelahan langsung dengan Surabaya sebagai pusat ekonomi Indonesia Timur dan Gresik yang telah berkembang menjadi kota industri. Kondisi ini tentunya memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian daerah. Hal ini tentunya dapat menjadi salah satu pendorong dalam proses percepatan pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu pada bab 2 ini akan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum kondisi daerah yang diantaranya menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah kabupaten. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah, baik dari aspek geografi dan demografi serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Mengingat perbedaan dari karakteristiknya maka dalam analisis gambaran umum kondisi daerah harus disesuaikan dengan struktur kewenangan dan tingkatan pemerintah kabupaten.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, antara lain mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Bangkalan memiliki luas wilayah 1.260,14 km² yang secara administratif Pemerintahan terbagi dalam: 18 (delapan belas) Kecamatan, 8 (delapan) kelurahan, 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) desa dan 1 (satu) Pulau Karang Jamuang. Selain itu, dapat dikemukakan pula bahwa posisi Kabupaten Bangkalan ditinjau dari letak geografis, dimana secara eksistensial, berada di kawasan Pulau Madura dengan titik koordinat berada pada posisi 112°40' 06" -113° 08' 04" Bujur Timur dan 6° 51' 39" - 7° 11' 39" Lintang Selatan dengan batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Sampang
- 3) Sebelah Selatan : Selat Madura
- 4) Sebelah Barat : Selat Madura

Tabel 2.1.
Jumlah Kelurahan/Desa, Luas Wilayah Kabupaten Bangkalan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kelurahan/Desa
1.	Kamal	41.40	10
2.	Labang	35.23	13
3.	Kwanyar	47.81	16
4.	Modung	78.79	17
5.	Blega	92.82	19
6.	Konang	81.09	13
7.	Galis	120.56	21
8.	Tanah Merah	68.56	23
9.	Tragah	39.58	18
10.	Socah	53.82	11
11.	Bangkalan	35.02	13
12.	Burneh	66.10	12
13.	Arosbaya	42.46	18
14.	Geger	123.31	13
15.	Kokop	125.75	13
16.	Tanjung Bumi	67.49	14
17.	Sepulu	73.25	15
18.	Klampis	67.10	22
Jumlah		1.260,14	281

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

1. Letak Geografis

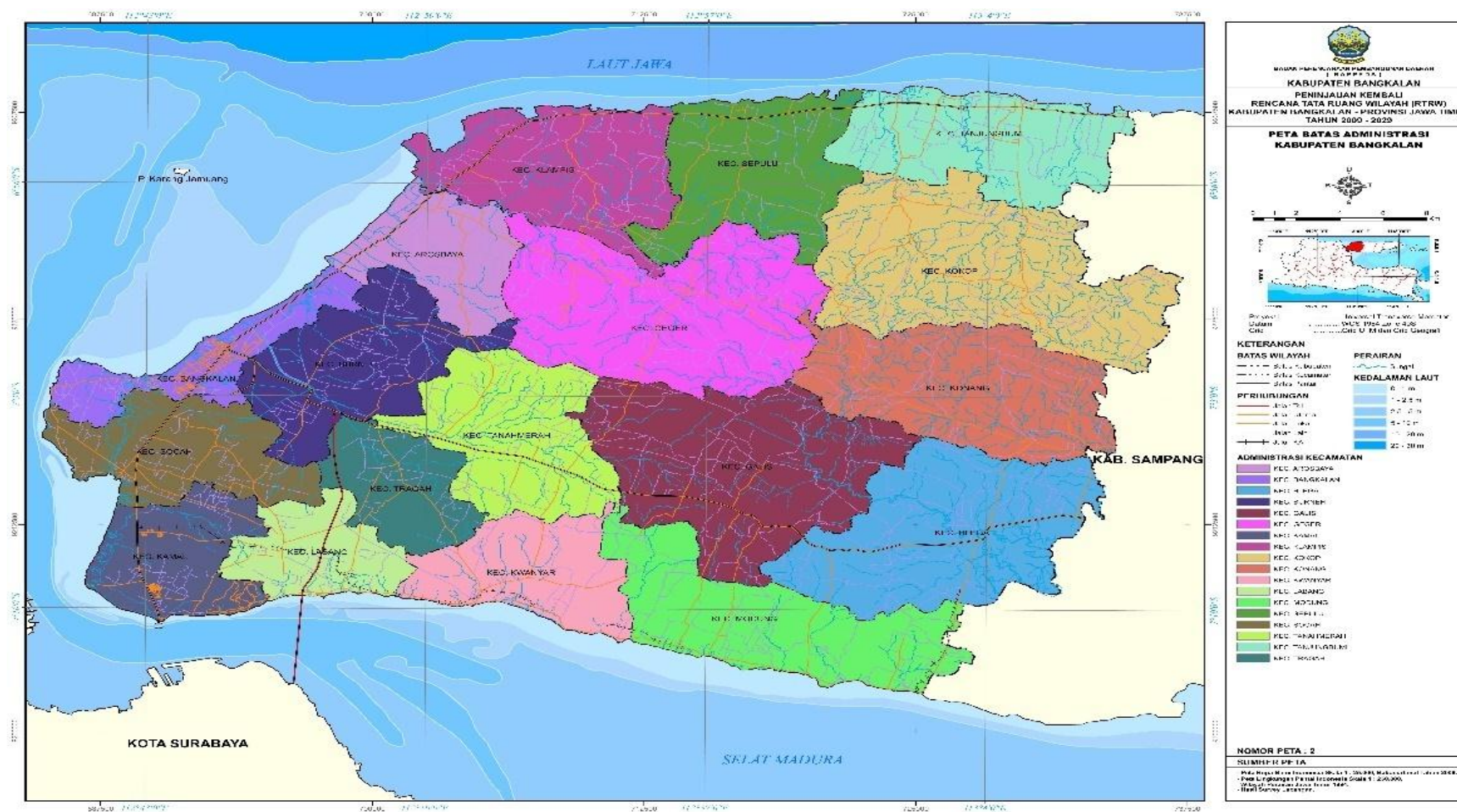
Kabupaten Bangkalan dengan luas wilayah 1.260,14 km² berada di bagian sebelah barat Pulau Madura, terletak pada koordinat 112°40'06" – 113°08'04" Bujur Timur serta 6°51'39" – 7°11'39" Lintang Selatan, yang memiliki satu pulau dan terletak disisi barat Kota Bangkalan yaitu Pulau Karang Jamuang.

2. Topografi

a. Kemiringan Lahan

Keadaan tanah di Kabupaten Bangkalan dilihat dari kemiringannya sebagian besar memiliki kemiringan 2-15° yaitu sekitar 50,45 % atau 63.002 Ha. Dan kemiringan 0-2° sekitar 45,43 % atau 56.738 Ha. Sedangkan tekstur tanah sebagian besar bertekstur sedang yaitu seluas 116.267 Ha atau sekitar 93,10 % dan untuk kedalaman spektip tanah di Kabupaten Bangkalan memiliki kedalaman >90 cm yaitu seluas 64.130 Ha atau 51,35 %.

Gambar 2.1.
Wilayah Administrasi Kabupaten Bangkalan



b. Ketinggian Lahan

Dilihat dari topografi, Kabupaten Bangkalan berada pada ketinggian 2-100 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang terletak di pesisir pantai, seperti Kecamatan Sepulu, Bangkalan, Socah, Kamal, Modung, Kwanyar, Arosbaya, Klampis, Tanjung Bumi, Labang dan Kecamatan Burneh mempunyai ketinggian antara 2-10 m di atas permukaan air laut. Sedangkan wilayah yang terletak pada bagian tengah mempunyai ketinggian antara 19-100 m di atas permukaan air laut. Lokasi tertinggi terletak di Kecamatan Geger dengan ketinggian 100 m di atas permukaan laut.

Tabel 2.2
Letak, Tinggi, dan Luas Kecamatan Kabupaten Bangkalan

No.	Kecamatan	Tinggi Dari Permukaan Laut	Luas (Km ²)
1.	Kamal	5	41.40
2.	Labang	45	35.23
3.	Kwanyar	2	47.81
4.	Modung	5	78.79
5.	Blega	5	92.82
6.	Konang	38	81.09
7.	Galis	45	120.56
8.	Tanah Merah	47	68.56
9.	Tragah	19	39.58
10.	Socah	5	53.82
11.	Bangkalan	5	35.02
12.	Burneh	10	66.10
13.	Arosbaya	4	42.46
14.	Geger	100	123.31
15.	Kokop	80	125.75
16.	Tanjung Bumi	2	67.49
17.	Sepulu	2	73.25
18.	Klampis	2	67.10
Jumlah		-	1,260.14

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

3. Geologi

a. Batuan

Jenis batuan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi; Allufium seluas 24.400Ha atau sekitar 19,54 %; Elistosin, Fasies, Sedimen seluas 35.594 Ha sekitar 28,50 %; Fliose, Fasies Batu Gamping seluas 47.294 Ha atau sekitar 37,87 %; dan Miosen, Fasies Sedimen seluas 17.600 Ha atau 14,09 %. Luas dan kondisi Geologi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Jenis Batuan Induk Kabupaten Bangkalan

No.	Uraian	Luas (Ha)	%
1.	Allufium	24.400	19,54
2.	Elistosin, Fasies, Sedimen	35.594	28,50
3.	Fliose, Fasies Batu Gamping	47.294	37,87
4.	Miosen, Fasies Sedimen	17.600	14,09
Jumlah		124.888	100

Sumber Data :Bangkalan Dalam Angka 2016

b. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Bangkalan meliputi Alufial Hidromurf; Alufial Kelabu Kekuningan; Assosiasi Hidromurf; Litosal; Regusal Coklat Kekuningan; Komplek Graund Gorset Kelabu dan Lits; Grumosal Kelabu; Kpl. Grumosal Kelabu Litosal; Kpl. Mediteran Coklat dan Litosal; Kpl. Mediteran Merah dan Litosal; Kpl. Mediteran, Grumosal,Regusal Litosal. Gambaran dan luas selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4.
Jenis Tanah Kabupaten Bangkalan

No.	Uraian	Luas (Ha)	%
1.	Alufial Hidromurf	9.495	7,60
2.	Alufial Kelabu Kekuningan	3.250	2,60
3.	Assosiasi Hidromurf	9.775	7,83
4.	Litosal	2.360	1,89
5.	Regusal Coklat Kekuningan	2.415	1,93
6.	Komplek Graund Gorset Kelabu dan Lits	18.203	14,58
7.	Grumosal Kelabu	2.360	1,89
8.	Kpl. Grumosal Kelabu Litosal	2.584	2,07

No.	Uraian	Luas (Ha)	%
9.	Kpl. Mediteran Coklat dan Litosal	14.719	11,79
10.	Kpl. Mediteran Merah dan Litosal	12.753	10,21
11.	Kpl. Mediteran, Grumosol, Regusal, Litosal	46.974	37,61
Jumlah		124.888	100

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

Sedangkan kedalaman spektip tanah menggambarkan ketebalan tanah dan sejauh mana akar tanaman dapat berkembang. Besarnya diukur dari permukaan tanah sampai dengan lapisan di mana akar tanaman tidak dapat lagi menembusnya. Lapisan tersebut biasanya berupa penghalang fisik yang berupa batuan atau lapisan kedap akar. Pada keadaan tertentu lapisan tersebut dapat berupa suatu lapisan yang secara kimia mengandung racun yang mematikan akar tanaman. Kedalaman efektif tanah yang tersebar di Kabupaten Bangkalan terletak pada kedalaman 0 cm - >90 cm. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Kedalaman Spektip Tanah Kabupaten Bangkalan

No.	Uraian	Luas (Ha)	%
1.	0 cm - 30 cm	8.044	6,44
2.	30 cm - 60 cm	14.293	11,44
3.	60 cm - 90 cm	38.421	30,76
4.	>90 cm	64.130	51,35
Jumlah		124.888	100

Sumber Data: Bangkalan Dalam Angka 2016

Tekstur tanah adalah kasar halusnya bahan padat organik tanah berdasarkan perbandingan fraksi pasir, lempung debu dan air. Tekstur ini akan berpengaruh terhadap pengolahan tanah dan pertumbuhan tanaman terutama dalam mengatur kandungan udara dalam rongga tanah dan persediaan serta kecepatan peresapan air di tanah tersebut. Tekstur tanah di Kabupaten Bangkalan bertekstur tanah halus (liat), sedang, hingga kasar dengan luasan dapat dilihat pada tabel 2.6. berikut ini;

Tabel 2.6.
Tekstur Tanah Kabupaten Bangkalan

No.	Uraian	Luas (Ha)	%
1.	Sedang	116.267	93,10
2.	Halus	8.016	6,42
3.	Kasar	605	0,48
Jumlah		124.888	100

Sumber Data: Bangkalan Dalam Angka 2016

4. Hidrologi

Sebagai bagian dari siklus hidrologi, di Kabupaten Bangkalan terdapat sejumlah mata air, waduk, dan sungai. Pola aliran permukaan dapat dilihat dari pola aliran sungai yang ada di Kabupaten Bangkalan. Sungai-sungai utama dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Bangkalan bermuara di selat Madura dan Laut Jawa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangkalan. Nama dan panjang sungai di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7.
Nama dan Panjang Sungai Kabupaten Bangkalan

No.	Uraian	Nama Sungai	Panjang (Km)
1.	Kamal	Gulung	2,15
		Kebun	2,05
		Telang	10,15
2.	Labang	Gladak Cina	3,25
3.	Kwanyar	Jangjang	5,05
		Kolpoh	16,15
4.	Modung	Jangklompang	7,10
		Nangger	2,15
		Lekesepat	6,55
		Sbr. Kolla	5,15
		Sikecil	6,65
5.	Blega	Blega	9,95
		Lekesenga	3,15
		Cetek	2,75
		Konyak	5,25
		Pandean	9,95

No.	Uraian	Nama Sungai	Panjang (Km)
6.	Konang	Nagen	12,15
		Jantu	2,15
		Sambiyen	5,15
		Rampasan	7,05
		Konang	7,15
		Gubugan	5,55
		Bancelok	2,15
		Sawahdalem	4,05
		Karangnata	1,35
7.	Galis	Pandean	9,95
		Jangklompang	7,10
		Jangmarang	2,25
		Lembungselor	4,85
		Tlagah	3,55
		Bancelot	6,05
		Olbek	8,15
		Labisana	3,15
8.	Tanah Merah	Pancetan	5,53
		Babusong	3,25
		Pangeleyan	2,15
		Mortengah	2,55
		Seresi	5,15
		Sbr. Pettong	3,25
		Sabupuspa	1,55
		Rangka	2,15
		Diambah Laok	3,55
		Nyantren	3,25
		Pakem	3,55
9.	Tragah	Pecetan Legung	4,15
		Sbr. Pocong	7,35
10.	Socah	Gladak Landung	8,25
		Jambu	7,55
11.	Bangkalan	Jambuh Bangkalan	6,25
		Bancaran	5,25
		Serpang	7,75
12.	Burneh	Jangjang	3,25

No.	Uraian	Nama Sungai	Panjang (Km)
		Bubut	5,19
		Durga	5,75
13.	Arosbaya	Taburjan	1,85
		Asem Tanto	7,20
		Tambangan	4,00
		Balung	5,05
14.	Geger	Lutung	2,05
		Ombul	5,15
		Klubaikan	2,15
		Polongan	2,25
		Jerdabung	3,15
		Bongbaru	2,55
		Pakem	3,25
		Kalajen	3,55
		Calteng	7,05
		Sbr. Pocong	2,15
		Dungruduk	3,25
		Agung	3,15
15.	Kokop	Durjan	6,15
		Muara	3,55
		Kemuning	1,56
		Pokaan	1,55
		Bulengleng	3,55
		Aengkoning	2,55
		Dupok	5,95
		Brungbung	1,55
		Kirkir	3,05
		Purwo	3,15
		Lebbeng	2,15
		Sbr. Agung	4,15
		Pocet	4,15
16.	Tanjung Bumi	Tambak/Tagungguh	9,15
		Torpong/Planggiran	7,05
		Budduh	7,15
		Tambak	9,15

No.	Uraian	Nama Sungai	Panjang (Km)
		Tambeng	22,15
17.	Sepulu	Srogan	7,55
		Janger	2,55
		Dangah	1,15
		Sangkeyah	2,25
		Mocangan	3,55
		Gladakmati	7,55
		Gangseyan	2,15
		Lembung	3,25
18.	Klampis	Patemon	1,85
		Bupeng	2,15
		Larangan	1,75
		Manonggal	2,15
		Nangsangkan	1,25
		Ganggakap	2,15
		Pajung	3,15
		Brumbung	1,55

Sumber Data: Bangkalan Dalam Angka 2016

Selain dipengaruhi oleh adanya sungai, kondisi hidrologi di Kabupaten Bangkalan juga dipengaruhi oleh beberapa sumber air. Sumber-sumber air yang ada di Kabupaten Bangkalan mempunyai kualitas air baku yang cukup baik untuk kebutuhan irigasi maupun air bersih. Terdapat 60 lokasi sumber air yang mempunyai debit yang relatif besar. Dari ke-60 sumber air tersebut, sumber air Pocong mempunyai debit terbesar yaitu 200 liter/detik, sehingga oleh Pemerintah Daerah dipergunakan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan penduduk di bawah pengelolaan PDAM. Pada tabel 2.8. berikut ini, beberapa lokasi sumber air di wilayah Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.8.
Beberapa Lokasi Sumber Mata Air Kabupaten Bangkalan

No.	Sumber Air	Lokasi (Kecamatan)	Jarak (km)	Kapasitas (lt/dt)
1.	Gening	Kamal	35	207
2.	Pocong	Tragah	30	4.500

No.	Sumber Air	Lokasi (Kecamatan)	Jarak (km)	Kapasitas (lt/dt)
3.	Buluh	Socah	27	160
4.	Klompek	Modung	53	75
5.	Langkap	Modung	53	200
6.	Kesatrian	Modung	53	180
7.	Banyuputih	Galis	25	80
8.	Karang Entang	Kwanyar	40	63
9.	Mantan	Kwanyar	40	65
10.	Duwak	Arosbaya	13	84
11.	Kemarong	Geger	20	150
12.	LB. Paseser	Sepulu	7	82
13.	Cobik	Bangkalan	17	250
14.	Dam Tonjung	Burneh	20	2000
15.	Sungai Geger	Geger	10	1000

*Sumber Data : Rencana Induk Pengembangan Dan Pengelola Sumber Daya Air
Kabupaten Bangkalan Tahun 2016*

5. Klimatologi

Rata-rata curah hujan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2014 sebesar 90,30 mm setiap bulannya atau sebesar 7,55 mm setiap harinya. Curah hujan di Kabupaten Bangkalan relatif terjadi sepanjang tahun dengan intensitas tertinggi terjadi pada Bulan Januari dan Bulan Desember. Hanya pada bulan September dan bulan oktober saja hujan tidak turun sama sekali. Kondisi curah hujan yang terjadi sepanjang tahun tersebut merupakan menguntungkan bagi petani. Banyaknya hari hujan bulanan Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9.
Banyaknya Hari Hujan per Bulanan Kabupaten Bangkalan

NO	SEKSI PENGAIRAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	RATA-RATA
1.	Bangkalan	20	19	15	19	8	0	0	0	0	0	9	6	8.00
2.	Socah	16	14	15	10	2	1	0	0	0	0	8	9	6.25

NO	SEKSI PENGAIRAN	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	RATA-RATA
3.	Burneh	19	15	12	12	3	4	1	0	0	0	9	6	6.75
4.	Kamal	9	9	15	10	2	4	3	0	0	0	7	12	5.92
5.	Arosbaya	10	16	10	9	6	2	2	1	0	0	5	6	5.58
6.	Labang	15	14	11	8	4	0	0	0	0	0	2	9	5.25
7.	Sukolilo	14	13	10	5	1	3	2	0	0	1	4	10	5.25
8.	Tragah	10	14	14	18	7	0	0	0	0	0	4	8	6.25
9.	Klampis	17	15	10	9	3	3	0	0	0	0	4	12	6.08
10.	Tanah Merah	10	10	5	14	1	0	0	0	0	0	4	8	4.33
11.	Kwanyar	13	13	19	9	4	0	0	0	0	0	2	12	6.00
12.	Geger	15	12	9	10	8	1	1	1	0	0	10	6	6.08
13.	Tanjung Bumi	3	5	3	7	2	0	0	0	0	0	4	2	2.17
14.	Sepulu	13	17	5	9	2	0	0	0	0	0	3	9	4.83
15.	Dupok	13	12	14	14	4	0	0	0	0	0	4	5	5.50
16.	Galis	11	14	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	2.33
17.	Modung	8	10	8	13	10	0	0	0	0	0	7	7	5.25
18.	Blega	11	17	12	17	3	1	0	0	0	0	6	6	6.08
19.	Kedungdung	12	15	19	10	3	0	0	0	0	0	4	4	5.58
20.	Dam Tunjung	18	19	16	9	18	4	1	0	0	0	14	8	8.92

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

6. Penggunaan Lahan

Kabupaten Bangkalan merupakan pintu gerbang menuju Pulau Madura dan Wilayah Indonesia Timur mempunyai potensi pengembangan wilayah yang cukup prospektif dengan luas wilayah sebesar 1.260,14 km² yang diperuntukkan untuk kawasan permukiman, perdagangan dan jasa, pertanian, kawasan militer, dan lain-lain.

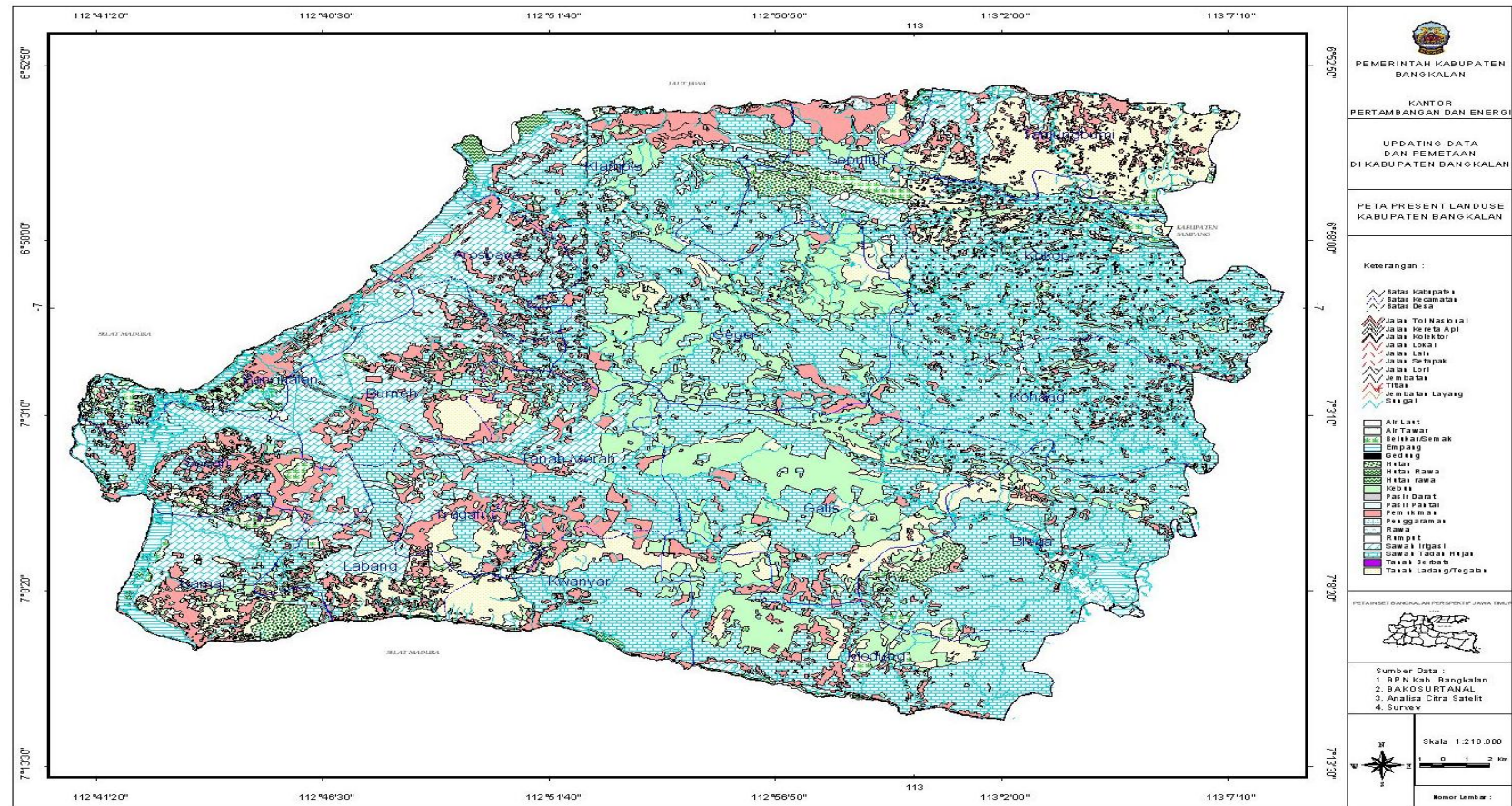
Penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan masih didominasi oleh kegiatan pertanian berupa pertanian sawah irigasi, lahan kering, perkebunan, maupun tegalan. Dalam perkembangannya, penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan terkait dengan pemanfaatan lahan, baik untuk

permukiman, fasilitas umum maupun untuk pengembangan industri. Pengembangan pemanfaatan lahan yang cukup terlihat adalah pengembangan kawasan Suramadu. Setelah dibukanya jalur atau akses Suramadu maka kawasan tersebut akan dikembangkan sebagai kawasan terpadu khususnya disekitar kawasan kaki jembatan Suramadu.

Saat ini kawasan tersebut masih belum dikembangkan secara maksimal, lahan yang ada di sepanjang kanan maupun kiri jalur menuju jembatan masih berupa lahan kosong yang masih dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun tegalan, sedangkan disepanjang koridor jalan utama mulai tumbuh kegiatan perdagangan dan jasa skala lokal berupa warung-warung non permanen yang menjual souvenir, makanan, maupun minuman. Kondisi yang kurang teratur dan tidak tertata dengan baik menimbulkan kesan kumuh pada kawasan tersebut. Sehingga perlu pengendalian maupun pengaturan lebih lanjut pada kawasan tersebut.

Secara umum pola pemanfaatan lahan di Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier, yaitu mengikuti jaringan jalan. Gambaran selengkapnya penggunaan lahan di Kabupaten Bangkalan dapat terlihat pada Gambar 2.2 berikut ini ;

Gambar 2.2.
Penggunaan Lahan Kabupaten Bangkalan Tahun 2009



2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

1. Potensi Sumber Daya Pesisir dan Laut

Kabupaten Bangkalan sebagian wilayahnya berbatasan langsung dengan Selat Madura dan Laut Jawa. Terdapat 10 (sepuluh) wilayah Bangkalan yang berbatasan langsung dengan perairan laut yakni Kecamatan Modung, Kwanyar, Labang, Kamal, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi.

a. Kondisi Geografis Pantai

Secara geografis wilayah Kabupaten Bangkalan memiliki panjang pantai 125 km yang tersebar pada 10 (sepuluh) kecamatan dan berkarakteristik yang beragam. Pada pantai selatan memiliki perilaku arus dengan kecepatan sedang, pada saat tertentu arus air laut sekitar 2 m/dt, gelombang tidak terlalu besar tetapi pada bulan tertentu dimana musim angin berhembus dari timur gelombang laut bisa mencapai 2 m. Pada keadaan ini akan berpotensi terjadi abrasi, sehingga dapat mengakibatkan perubahan garis pantai. Pada pantai barat memiliki arus dengan kecepatan besar, pada saat tertentu arus air laut mencapai 5 m/dt, hal ini dimungkinkan bahwa pada posisi ini Selat Madura adalah sempit, sementara perbedaan fase pasang surut cukup. Pada pantai utara memiliki perilaku arus dengan kecepatan rendah, namun gelombang laut tergolong besar karena pantainya menghadap laut lepas, bathimetri yang ada relatif landai dan kebanyakan berpasir, memiliki gelombang yang relatif besar sehingga rawan terjadinya kerusakan pantai.

b. Terumbu Karang

Potensi terumbu karang di perairan pantai Bangkalan diperkirakan terdapat di perairan Kecamatan Klampis, Sepulu, Tanjung Bumi, Bangkalan, dan Arosbaya karena ditemukan indikasi adanya tanah dasar yang keras, hal ini memungkinkan digunakan sebagai substrat pertumbuhan terumbu karang. Pemasangan terumbu karang buatan telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangkalan yang dikembangkan di perairan Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi yang bertujuan untuk melestarikan terumbu karang.

c. Mangrove

Hutan Mangrove, memiliki fungsi ekologis sebagai barier pantai terhadap gempuran gelombang, juga sebagai habitat tempat berkembang biaknya jenis ikan, udang dan jenis hewan vertebrata, tempat berkembang dan berlindung burung dan fauna lainnya, kondisi tersebut menunjukkan degradasi yang disebabkan oleh konversi untuk kegiatan industri, pembangunan sarana fisik serta pengembangan wilayah penduduk lainnya. Degradasi ini akan diperkirakan meningkat jika tidak ada upaya pengelolaan secara terkoordinir dan terpadu oleh dinas dan instansi terkait serta masyarakat. Jenis Mangrove di Kabupaten Bangkalan terdiri atas *Rhizophora Kukronata*, *Bugha Gyimuorhsza* (Potot), *Avicenia Marvis* (Api-api), *Avicenia Alba* (Api-api putih), *Sounetia Alba* (Prapat), *Sounetia Cakolanis* (Bugem), *Exocais Abalocha* (Malengen), *Lumitsin Resemosa* (Truntum), dan *Xyelocolpus Mokcercis* (Jombok).

2. Potensi Perekonomian

Sektor perekonomian yang berkembang di Kabupaten Bangkalan antara lain adalah sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Masing-masing sektor tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sektor Pertanian Tanaman Pangan

Sektor pertanian tanaman pangan yang berkembang di Kabupaten Bangkalan antara lain tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang hijau, kedelai, dan kacang tanah. Produksi tanaman padi dan jagung cukup menjadi komoditi utama sektor pertanian tanaman pangan. Produksi tanaman padi di Kabupaten Bangkalan tahun 2015 mengalami kenaikan 5,42% dari tahun 2014. Produktivitas jagung pada tahun 2015 juga mengalami kenaikan sebesar 6,72% dari tahun 2014 atau sebanyak 1.275.270,39 ton menjadi 1.367.121,73 ton.

Sementara ubi kayu mengalami penurunan produksi di tahun 2015 sebanyak 27,78% atau sebesar 499.780,42 ton di banding tahun 2014. Tanaman ubi jalar mulai di kembangkan di Kabupaten Bangkalan dengan total produksi di tahun 2014 hanya sebesar 13.065,09 ton dan meningkat drastis di tahun 2015

sebesar 173.910,08 ton. Selengkapnya data produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel 2.10. di bawah ini.

Tabel 2.10.
Jumlah Produksi Tanaman Pertanian Kabupaten Bangkalan Tahun 2015
Produksi (Ton)

Kecamatan	Produksi (Ton)						
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Hijau	Kedelai	Kacang Tanah
Kamal	112.002.00	33.611.00	6.988.50	220.80	-	4.232.62	5.760.00
Labang	60.409.44	32.042.40	20.071.48	0.00	-	-	3.151.00
Kwanyar	131.861.81	97.356.80	12.042.00	1.622.46	761.54	12.348.00	22.328.80
Modung	185.746.20	103.562.55	12.469.60	550.95	1.115.92	14.132.90	13.202.28
Blega	278.580.30	204.115.22	11.694.00	2.417.40	380.16	27.020.00	21.266.00
Konang	155.086.42	99.045.00	4.661.70	9.048.75	1.018.16	19.375.00	47.996.70
Galis	105.892.30	144.117.00	37.255.50	22.015.30	2.094.00	38.703.00	8.504.50
Tanah Merah	256.601.45	76.241.55	19.892.40	1.653.90	1.189.44	2.834.00	25.309.80
Tragah	123.387.00	43.923.44	10.271.36	0.00	86.35	4.721.50	14.427.32
Socah	170.102.89	51.401.16	34.737.12	843.78	463.36	1.313.00	32.563.68
Bangkalan	129.212.37	10.110.72	6.702.41	5.711.04	21.72	-	3.289.00
Burneh	437.926.00	81.172.32	21.970.69	51.626.80	1.928.32	637.50	15.375.00
Arosbaya	249.717.00	24.397.59	2.731.73	0.00	0.00	3.873.00	12.736.00
Geger	267.881.82	92.033.52	139.437.80	0.00	4.164.75	2.380.00	64.079.73
Kokop	96.879.20	73.470.77	99.780.80	76.135.50	861.52	1.350.00	19.509.75
Tanjung Bumi	83.182.11	78.123.01	43.972.46	739.20	784.00	-	4.312.00
Sepulu	119.861.98	64.087.96	10.760.87	0.00	861.36	-	935.00

Kecamatan	Produksi (Ton)						
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar	Kacang Hijau	Kedelai	Kacang Tanah
Klampus	156.535.20	58.309.72	4.340.00	1.324.20	15.52	2.550.00	1.089.00
Jumlah	3,120,865.49	1367.121.73	499.780.42	173.910.08	15 746.12	135 470.52	315 835.56

Sumber Data :Bangkalan Dalam Angka 2016

b. Sektor Pertanian Tanaman Holtikultura

Sektor pertanian tanaman hortikultura yang berkembang di Kabupaten Bangkalan berupa tanaman buah-buahan dan bunga meliputi alpukat, belimbing, durian, jambu biji, jambu air, jeruk keprok, jeruk besar, mangga, nangka, pisang, nanas, pepaya, salak, sawo, sirsak, sukun, melinjo, rambutan serta tanaman bunga melati. Selengkapnya data produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.11. berikut ini :

Tabel 2.11.
Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah Produksi (Kw)								
		Alpukat	Belimbing	Durian	Jambu Biji	Jambu Air	Jeruk Keprok	Jeruk Besar	Mangga	Nangka
1.	Kamal	-	-	-	2.119	-	-	-	5.000	120
2.	Labang	-	6	-	7.850	220	-	-	5.760	6.900
3.	Kwanyar	14	-	-	724	166	34	25	9.069	821
4.	Modung	3	5	-	574	144	33	-	7.369	2.881
5.	Blega	6	2	-	200	582	200	-	3.625	746
6.	Konang	-	8	-	184	45	435	-	400	400
7.	Galis	20	30	2.500	925	35	300	4.696	3.550	4.029
8.	Tanah Merah	1	129	1.526	588	77	733	890	2.716	3.066
9.	Tragah	-	3	4	18	-	-	-	1.322	1.006
10.	Socah	80	98	2.535	2.729	184	1.649	36	17.250	16.741
11.	Bangkalan	52	94	19	342	110	12	-	11.480	62
12.	Burneh	-	14	2.028	688	330	204	27	4.036	5.605
13.	Arosbaya	-	47	114	116	108	22	-	2.374	461
14.	Geger	31	18	4.303	768	-	909	246	32.131	671
15.	Kokop	122	20	756	330	15	-	-	1.213	110
16.	Tanjung Bumi	-	2	-	20	49	19	4	4.481	300
17.	Sepulu	-	-	-	197	3	30	-	6.421	2.647
18.	Klampis	-	8	-	633	27	-	826	18.459	475
Jumlah		329	484	13.785	19.005	2.095	4.680	6.750	136.656	47.041

Sumber Data :Bangkalan Dalam Angka 2016

c. Sektor Tanaman Perkebunan

Pada sektor perkebunan, jenis tanaman yang berkembang di Kabupaten Bangkalan adalah kelapa, kapuk randu, jambu mete, siwalan, cabe jamu dan Pinang. Namun diantara sekian jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bangkalan tersebut yang kurang produktif dibandingkan dengan tanaman yang lain adalah tanaman pinang. Data lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.12. berikut :

Tabel 2.12.
Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Kab. Bangkalan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Produksi (Ton)						
		Kelapa	Kapuk Randu	Jambu Mete	Siwalan	Cabe Jamu	Pinang	Kencur/ empon2
1.	Kamal	14,80	0,92	1,49	0	0	1,03	0
2.	Labang	61,40	5,05	24,39	0	0	0,38	0
3.	Kwanyar	112,10	146,71	29,53	0	0	0	0
4.	Modung	29,80	8,47	2,91	0	0	0,01	0
5.	Blega	71,40	12,81	16,23	24,42	3,62	0,31	153,67
6.	Konang	167,90	68,31	24,67	25,39	0	0,25	23,43
7.	Galis	287,40	141,84	23,27	0	0,60	0,79	15,30
8.	Tanah Merah	230,40	147,57	27,68	0	1,41	1,98	441,94
9.	Tragah	47,30	4,56	17,99	0	0,74	0,32	0
10.	Socah	242,20	21,05	29,86	2,20	0	0,06	177,17
11.	Bangkalan	216,90	2,64	5,24	2,84	1,49	1,29	71,65
12.	Burneh	92,10	5,48	6,18	0	1,54	5,28	0
13.	Arosbaya	63,20	15,23	11,06	6,45	0	0,45	0
14.	Geger	199,10	12,98	137,13	0	0	0,07	41,65
15.	Kokop	196,40	14,58	176,18	35,84	5,53	0,50	410,60
16.	Tanjung Bumi	146,70	16,61	149,41	0	10,31	1,08	0
17.	Sepulu	79,90	10,16	37,02	15,02	0,11	0,46	0

No.	Kecamatan	Produksi (Ton)						
		Kelapa	Kapuk Randu	Jambu Mete	Siwalan	Cabe Jamu	Pinang	Kencur/ empon2
18.	Klampis	91,60	11,52	29,04	0	0,98	4,58	0
Jumlah		2.350,60	646,49	749,28	112,16	26,33	18,84	1.335,41

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

d. Sektor Peternakan

Jenis ternak yang berkembang di Kabupaten Bangkalan meliputi ternak besar dan kecil serta ternak unggas. Untuk ternak besar dan kecil meliputi kuda, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Sedangkan jenis ternak unggas meliputi ayam buras, ayam ras, dan itik. Data selengkapnya populasi ternak di Kabupaten Bangkalan lihat pada Tabel 2.13. dan Tabel 2.14. berikut:

Tabel 2.13.
Jumlah Populasi Ternak Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi (Ekor)					
		Kuda	Sapi	Sapi Perah	Kerbau	Kambing	Domba
1.	Kamal	31	5.386	-	44	5.743	128
2.	Labang	13	5.353	-	-	5.247	95
3.	Kwanyar	40	5.118	-	-	4.425	294
4.	Modung	8	13.109	-	-	4.271	28
5.	Blega	26	10.351	-	-	3.707	-
6.	Konang	13	13.868	-	-	2.272	29
7.	Galis	29	17.408	-	-	4.841	408
8.	Tanah Merah	53	12.675	-	-	4.974	29
9.	Tragah	5	5.668	-	-	3.327	501
10.	Socah	225	7.232	-	-	3.669	-
11.	Bangkalan	-	2.247	-	334	2.280	121
12.	Burneh	90	6.305	20	1.003	5.492	523
13.	Arosbaya	26	7.479	-	19	3.029	373
14.	Geger	30	23.539	-	-	4.537	-
15.	Kokop	-	18.508	-	-	1.971	234
16.	Tanjung Bumi	11	12.166	-	-	2.884	142
17.	Sepulu	6	10.549	-	-	3.488	58
18.	Klampus	15	14.284	-	-	4.833	39
Jumlah		621	191.245	20	1.400	70.990	3.002

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

Tabel 2.14.
Jumlah Populasi Unggas Menurut Jenisnya Kabupaten Bangkalan
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Populasi (Ekor)			
		Ayam Buras	Ayam Ras	Itik	Itik Manila
1.	Kamal	43.196	12.000	1.816	851
2.	Labang	28.341	10.000	1.905	886
3.	Kwanyar	34.467	6.000	2.895	1.081
4.	Modung	53.430	-	1.729	988
5.	Blega	59.471	-	3.216	2.460
6.	Konang	28.902	-	1.727	493
7.	Galis	74.964	-	2.297	473
8.	Tanah Merah	130.820	40.000	6.335	2.524
9.	Tragah	58.754	10.000	6.193	2.982
10.	Socah	28.470	40.000	2.099	1.669
11.	Bangkalan	130.279	2.000	4.875	6.839
12.	Burneh	51.177	-	5.669	2.929
13.	Arosbaya	38.272	-	3.274	1.524
14.	Geger	39.176	10.000	3.178	4.952
15.	Kokop	64.296	-	1.634	3.380
16.	Tanjung Bumi	34.287	40.000	1.765	1.314
17.	Sepulu	30.852	40.000	1.537	1.855
18.	Klampis	34.042	10.000	1.901	500
Jumlah		963.196	220.000	54.045	37.700

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

e. Sektor Perikanan

Sektor perikanan yang berkembang di Kabupaten Bangkalan berupa perikanan laut dan budidaya perikanan meliputi perairan umum, tambak, sawah tambak dan kolam. Perikanan laut banyak diusahakan oleh masyarakat yang bermukim disepanjang perairan Selat Madura maupun Laut Jawa yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Nilai produksi perikanan menurut sub sektor perikanan di Kabupaten Bangkalan terlihat pada Tabel 2.15. dibawah ini.

Tabel 2.15.
Nilai Produksi Perikanan (Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Kecamatan	Perikanan Laut	Perikanan Budidaya			
			Perairan Umum	Tambak	Sawah	Kolam
1.	Kamal	3.156.501	-	11.403.098	-	29.088
2.	Labang	18.873.749	-	-	-	14.544
3.	Kwanyar	34.721.516	-	1.004.827	-	858.083
4.	Modung	-	-	434.673	-	7.670
5.	Blega	-	392.386	15.320.795	-	58.175
6.	Konang	-	-	-	-	15.998
7.	Galis	-	-	-	-	35.861
8.	Tanah Merah	-	-	-	-	11.954
9.	Tragah	-	-	-	-	5.818
10.	Socah	22.019.373	1.313.978	16.128.044	-	10.181
11.	Bangkalan	37.747.497	594.517	7.587.011	402.598	319.963
12.	Burneh	-	217.609	-	-	72.719
13.	Arosbaya	25.310.462	-	8.467.647	-	-
14.	Geger	-	-	-	-	4.363
15.	Kokop	-	-	-	-	-
16.	Tanjung Bumi	72.599.534	-	13.254.690	-	-
17.	Sepulu	44.038.747	-	1.738.690	-	-
18.	Klampis	56.817.026	-	4.606.400	-	-
Jumlah		315.284.405	2.518.490	79.945.875	402.598	1.444.417

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

f. Sektor Industri

Sampai saat ini, sektor industri yang berkembang di Kabupaten Bangkalan berupa industri rumah tangga, industri kecil dan industri sedang. Industri tersebut berkembang cukup pesat karena dipicu oleh permintaan pasar terhadap produk-produk khas (souvenir) masyarakat Bangkalan pada khususnya dan Madura pada umumnya seiring dengan meningkatnya kunjungan wisata ke Madura.

g. Sektor Pertambangan

Potensi pertambangan di Kabupaten Bangkalan digolongkan pada mineral bukan logam dan batuan, tambang ini pada umumnya di eksplorasi oleh

masyarakat. Pertambangan rakyat yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bangkalan perlu mendapat perhatian, pengendalian dan pembinaan, sehingga pengelolaannya tetap memperhatikan aspek aspek kesinambungan usaha dan kelestarian lingkungan hidup. Selain itu Kabupaten Bangkalan memiliki potensi migas yang tersebar di Kecamatan Konang, Sepulu, Geger, dan Blega.

h. Sektor Pariwisata

Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa obyek wisata yang cukup potensial untuk dikembangkan, yaitu :

1) Wisata Alam

- Pantai Siring Kemuning (Kecamatan Tanjung Bumi) dan Pantai Rongkang (Kecamatan Kwanyar);
- Wana Wisata di Kecamatan Geger;
- Api tak kunjung padam di Kecamatan Konang;
- Wisata Mangrove

2) Wisata Budaya

- Karapan sapi;
- Mercusuar Peninggalan Belanda di Kecamatan Socah;
- Museum Cakraningrat di Jl. Soekarno – Hatta Bangkalan.
- Benteng Peninggalan Belanda
- Kesenian tradisional dan Upacara Adat

3) Wisata Religi

- Pasarean K. Moh. Kholil di Desa Mertajasah Kecamatan Bangkalan;
- Pasarean Aer Mata Ebhu di Desa Buduran Kecamatan Arosbaya.
- Makam Agung di Desa Plakaran Kecamatan Arosbaya.

4) Wisata Minat Khusus

- Sentra Kerajinan batik tulis di Desa Tlaga Biru dan Paseseh di Kecamatan Tanjung Bumi;
- Kerajinan Agel di Desa Lembung Gunong dan Desa Dupok di Kecamatan Kokop.
- Pembuatan kapal tradisional di Kecamatan Sepulu.
- Potensi wisata di kawasan kaki Jembatan Suramadu.
- Wisata Kuliner.

Obyek-obyek wisata yang ada di Kabupaten Bangkalan perlu dikelola lebih baik sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan. Untuk lebih mengoptimalkan pengembangan obyek wisata yang terdapat di Bangkalan, perlu dilengkapi dengan beberapa fasilitas/infrastruktur yang memadai.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan bencana alam merupakan kawasan yang diindikasikan sebagai kawasan yang sering bencana. Di Kabupaten Bangkalan, kawasan bencana dikelompokkan :

- 1) Kawasan rawan banjir yang meliputi :
Kecamatan Klampis, Arosbaya dan Blega
- 2) Kawasan rawan longsor yang meliputi :
Kecamatan Kokop, Geger dan Galis.
- 3) Kawasan rawan puting beliung yang meliputi :
Kecamatan Tanjung Bumi, Sepulu, Geger, Kwanyar, Tragah, Burneh dan Bangkalan
- 4) Kawasan rawan abrasi yang meliputi :
Kecamatan Tanjung Bumi, Klampis, Modung, Kwanyar, Socah dan Kamal
- 5) Kawasan Rawan Kekeringan :
Kecamatan Kokop, Konang, Galis, Labang dan Tanah Merah.

2.1.1.4 Demografi

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk wilayah Kabupaten Bangkalan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 jumlah penduduk di Kabupaten Bangkalan sebanyak 954.305 jiwa atau meningkat sebesar 0,89% dari tahun 2014. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Bangkalan sebanyak 83.784 jiwa dan paling sedikit di Kecamatan Tragah sebesar 27.830 jiwa.

2. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Kepadatan kotor adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas keseluruhan. Jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan

pada Tahun 2015 sebesar 954.305 jiwa dengan luas wilayah 1.260,14 Km² sehingga pada tahun 2015 kepadatan kotor di wilayah Kabupaten Bangkalan sebesar 757,30 jiwa/Km². Kepadatan tertinggi adalah Kecamatan Bangkalan sebesar 2.392,46 jiwa/Km² dan terendah adalah Kecamatan Geger sebesar 543,17 jiwa/Km². Selengkapnya lihat Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2015

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1.	Kamal	48.511	41,40	1.171,76
2.	Labang	34.296	35,23	973,49
3.	Kwanyar	42.913	47,81	897,57
4.	Modung	44.453	78,79	564,20
5.	Blega	52.471	92,82	565,30
6.	Konang	49.004	81,09	604,32
7.	Galis	76.289	120,56	632,79
8.	Tanah Merah	58.137	68,56	847,97
9.	Tragah	27.830	39,58	703,13
10.	Socah	55.071	53,82	1.023,24
11.	Bangkalan	83.784	35,02	2.392,46
12.	Burneh	59.552	66,10	900,48
13.	Arosbaya	42.134	42,46	992,32
14.	Geger	66.978	123,31	543,17
15.	Kokop	71.028	125,75	564,83
16.	Tanjung Bumi	51.823	67,49	767,86
17.	Sepulu	40.086	73,25	547,25
18.	Klampus	49.975	67,10	744,78
Jumlah		954.305	1.260,14	757,30

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

3. Struktur Penduduk

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Berdasarkan data jumlah penduduk Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 menurut jenis kelamin maka dapat dilihat bahwa komposisi jumlah antara laki-laki dan perempuan hampir sebanding yaitu 52,25% (455.710 jiwa) perempuan dan

47,75% (498.595 jiwa) laki-laki dengan *sex ratio* 91,40. Data selengkapnya lihat pada tabel 2.17. berikut ini.

Tabel 2.17
Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Bangkalan
Tahun 2015

No.	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)		Jumlah Penduduk	Sex Ratio
		Laki-Laki	Perempuan		
1.	Kamal	23.461	25.050	48.511	93,66
2.	Labang	16.200	18.096	34.296	89,52
3.	Kwanyar	20.292	22.621	42.913	89,70
4.	Modung	21.031	23.422	44.453	89,79
5.	Blega	25.481	26.990	52.471	94,41
6.	Konang	23.949	25.055	49.004	95,59
7.	Galis	36.515	39.774	76.289	91,81
8.	Tanah Merah	27.408	30.729	58.137	89,19
9.	Tragah	13.122	14.708	27.830	89,22
10.	Socah	26.123	28.948	55.071	90,24
11.	Bangkalan	40.567	43.217	83.784	93,87
12.	Burneh	28.723	30.799	59.522	93,26
13.	Arosbaya	19.894	22.240	42.134	89,45
14.	Geger	30.946	36.032	66.978	85,88
15.	Kokop	34.771	36.257	71.028	95,90
16.	Tanjung Bumi	24.887	26.946	51.823	92,32
17.	Sepulu	19.129	20.957	40.086	91,28
18.	Klampis	23.221	26.754	49.975	86,79
Jumlah		455.710	498.595	954.305	91,40

Sumber Data: Bangkalan Dalam Angka 2016

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya. Untuk menganalisis gambaran umum kondisi daerah pada aspek kesejahteraan masyarakat untuk penyusunan RKPD Kabupaten Bangkalan, terlebih dahulu disusun tabel indikator. Indikator variabel aspek kesejahteraan masyarakat dimaksud terdiri dari:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

Dalam kurun waktu lima tahun sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, perkembangan PDRB Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada Tabel 2.18 di bawah. Data tersebut memberikan informasi bahwa sejak Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) tanpa Migas, Kabupaten Bangkalan, mengalami peningkatan dari sebesar Rp8.424.566.900.000,- pada Tahun 2010, menjadi sebesar Rp9.429.119.500.000,- pada Tahun 2011, meningkat lagi menjadi sebesar Rp10.637.327.400.000,- pada Tahun 2012, dan meningkat terus pada tahun 2013 menjadi sebesar Rp11.913.364.600.000,- yang selanjutnya meningkat menjadi Rp13.177.259.800.000 pada Tahun 2014 dan diproyeksi meningkat sebesar Rp14.517.326.100.000,- pada Tahun 2015.

Tabel 2.18.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2010-2015
(Juta Rupiah)

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,988,809.3	3,248,153.5	3,590,158.1	4,021,106.1	4,411,658.9	4,861,236.6
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,079,011.1	2,265,431.6	2,471,153.0	2,737,740.4	2,989,533.5	3,236,596.7
	a. Tanaman Pangan	1,180,839.2	1,278,557.0	1,383,542.0	1,547,667.0	1,700,306.5	1,803,055.4
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,760.0	2,930.0	3,140.3	3,258.3	3,502.6	3,870.9
	c. Perkebunan Semusim	8,586.5	9,169.3	9,827.8	10,284.7	10,825.3	11,963.3
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	78,572.0	85,547.2	86,913.6	94,410.6	103,750.9	120,839.2
	e. Perkebunan Tahunan	131,144.2	141,180.9	153,244.0	163,502.7	178,437.2	199,795.8

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	f. Peternakan	652,131.6	721,512.0	806,109.0	887,714.2	958,046.8	1,058,763.8
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	24,977.6	26,535.1	28,376.1	30,902.9	34,664.1	38,308.3
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	14,435.6	15,978.2	17,947.5	19,557.2	21,540.9	25,805.4
	3 Perikanan	895,362.7	966,743.7	1,101,057.6	1,263,808.5	1,400,584.6	1,598,834.5
B	Pertambangan dan Penggalian	7,629,498.8	8,482,582.9	7,611,369.1	7,847,910.5	8,793,029.2	265,279.6
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7,456,841.9	8,285,307.9	7,399,791.7	7,625,022.2	8,531,912.7	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	172,657.0	197,275.0	211,577.4	222,888.3	261,116.5	265,279.6
C	Industri Pengolahan	281,830.3	318,571.3	348,800.6	387,862.9	432,701.6	478,299.5

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	60,769.1	70,214.7	80,352.8	90,178.1	102,596.1	114,808.6
	3 Pengolahan Tembakau	272.9	295.8	337.4	381.5	436.7	488.3
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	10,201.7	11,167.2	12,265.9	13,507.1	14,803.7	15,502.8
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	18.8	20.6	22.0	24.7	27.7	29.8

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	94,076.1	105,732.2	110,345.9	126,040.0	142,949.8	159,840.4
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,348.3	5,816.6	6,074.7	6,358.7	6,709.5	7,387.3
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,367.1	4,895.9	5,758.6	6,477.6	7,253.4	7,740.4
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	133.3	148.4	168.9	174.9	188.8	201.1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	40,480.7	48,435.0	55,092.1	59,189.0	64,867.1	72,646.7

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	19,797.7	21,952.7	25,635.0	28,945.1	32,500.2	34,240.3
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	10.0	10.9	11.6	12.6	13.8	14.4
	14 Industri Alat Angkutan	17,299.2	18,615.7	19,710.3	20,625.8	20,935.2	21,908.9
	15 Industri Furnitur	22,208.0	24,226.8	25,772.2	28,407.8	31,243.9	34,935.6
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	6,847.4	7,038.8	7,253.1	7,540.1	8,175.8	8,554.9
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,097.3	5,365.5	5,403.6	5,339.9	5,461.8	5,664.3

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Ketenagalistrikan	5,097.3	5,365.5	5,403.6	5,339.9	5,461.8	5,664.3
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,520.7	10,375.6	11,875.0	13,163.4	14,192.0	15,546.1
F	Konstruksi	1,066,913.9	1,292,369.0	1,583,564.1	1,824,770.9	2,133,480.2	2,341,353.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,524,584.5	1,736,539.1	1,983,955.1	2,229,888.8	2,451,613.8	2,729,361.1
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	375,190.5	424,629.0	481,020.0	549,468.5	601,098.0	639,197.3
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,149,394.1	1,311,910.1	1,502,935.2	1,680,420.3	1,850,515.8	2,090,163.8
H	Transportasi dan Pergudangan	176,778.0	184,090.0	187,711.3	206,513.5	228,716.8	251,779.0

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Angkutan Darat	79,524.4	84,963.4	91,741.8	101,586.7	113,271.2	126,331.8
	3 Angkutan Laut	32,777.1	34,977.1	36,477.1	40,574.8	45,781.4	48,058.0
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	46,015.8	43,160.0	36,174.4	36,358.6	36,012.9	40,006.3
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	18,460.7	20,989.5	23,318.0	27,993.3	33,651.3	37,382.9
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109,883.6	123,678.6	140,654.7	155,382.7	177,613.4	202,808.0
	1 Penyediaan Akomodasi	1,533.4	1,747.1	1,948.8	2,166.9	2,391.7	2,612.6
	2 Penyediaan Makan Minum	108,350.1	121,931.5	138,705.9	153,215.8	175,221.7	200,195.4
J	Informasi dan	528,960.9	560,966.7	612,384.7	691,168.5	740,788.2	806,098.4

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Komunikasi						
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	188,050.9	210,742.7	237,606.5	269,100.6	293,434.4	320,104.8
	1 Jasa Perantara Keuangan	87,328.5	94,933.3	107,140.3	122,778.5	131,970.2	144,509.3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	44,581.5	51,497.5	57,944.6	65,339.5	72,106.1	78,417.3
	3 Jasa Keuangan Lainnya	55,965.5	64,120.5	72,309.6	80,749.6	89,112.0	96,910.5
	4 Jasa Penunjang Keuangan	175.4	191.4	211.9	233.0	246.1	267.6
L	Real Estate	126,805.0	142,769.3	156,098.7	170,223.5	182,506.1	203,082.8
M,N	Jasa Perusahaan	28,392.6	31,085.7	34,278.9	37,857.9	40,697.6	45,261.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	624,708.3	729,381.3	833,045.2	919,623.7	976,488.3	1,075,369.0
P	Jasa Pendidikan	450,300.3	486,604.7	541,915.5	590,001.2	644,361.2	716,761.8

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,972.9	45,822.4	50,367.5	54,664.9	60,090.2	66,510.5
R,S,T,U	Jasa lainnya	99,301.6	105,329.1	107,930.6	113,807.8	122,338.8	132,809.4
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15,881,408.7	17,714,427.4	18,037,119.2	19,538,386.8	21,709,172.5	
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	8,424,566.9	9,429,119.5	10,637,327.4	11,913,364.6	13,177,259.8	14,517,326.1

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan 2015 dan 2016

**) Angka Sangat Sementara

Sedangkan data PDRB sebagaimana dikemukakan pada Tabel 2.19, memberikan informasi bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tanpa Migas Kabupaten Bangkalan, sebesar Rp. 8.424.566.900.000 pada Tahun 2010, terjadi peningkatan menjadi sebesar Rp. 8.959.407.500.000 pada Tahun 2011 dan sebesar Rp. 9.536.995.300.000,- pada Tahun 2012. Pada Tahun 2013, PDRB berdasarkan ADHK menunjukkan angka sebesar Rp. 10.157.328.900.000,- dan meningkat sebesar Rp. 10.666.869.600.000,- pada tahun 2014. Sedangkan pada Tahun 2015, diproyeksi tumbuh menjadi sebesar Rp11.207.267.100.000,-

Tabel 2.19.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 – 2015
(Juta Rupiah)

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,988,809.3	3,078,178.5	3,155,530.0	3,310,410.3	3,403,306.5	3,538,477.2
	1 Pertanian, Pternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,079,011.1	2,141,024.0	2,173,365.5	2,237,825.8	2,291,567.6	2,388,352.1
	a. Tanaman Pangan	1,180,839.2	1,204,390.0	1,226,695.3	1,268,824.2	1,312,387.6	1,387,464.1
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,760.0	2,815.1	2,867.2	2,774.7	2,827.1	2,906.8
	c. Perkebunan Semusim	8,586.5	8,741.0	8,953.0	9,227.3	9,405.6	9,614.2
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	78,572.0	82,646.3	83,870.8	85,311.0	87,654.2	91,331.4

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	e. Perkebunan Tahunan	131,144.2	133,032.7	134,481.6	136,610.8	139,250.4	142,419.2
	f. Peternakan	652,131.6	684,033.7	690,595.7	708,216.8	712,322.3	725,693.6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	24,977.6	25,365.2	25,902.0	26,861.0	27,720.4	28,922.8
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	14,435.6	14,761.4	15,701.6	16,373.0	16,520.8	17,562.9
	3 Perikanan	895,362.7	922,393.1	966,462.9	1,056,211.5	1,095,218.1	1,132,562.2
B	Pertambangan dan Penggalian	7,629,498.8	7,634,655.0	6,833,650.2	6,249,751.4	6,913,233.6	211,919.3
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7,456,841.9	7,447,113.7	6,636,684.0	6,046,677.4	6,702,887.9	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pertambangan dan 4 Penggalian Lainnya	172,657.0	187,541.3	196,966.2	203,073.9	210,345.8	211,919.3
C	Industri Pengolahan	281,830.3	296,655.5	312,244.0	329,370.2	345,100.1	361,791.9
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	60,769.1	64,852.8	71,233.5	76,177.5	82,114.5	89,174.2
	3 Pengolahan Tembakau	272.9	282.1	304.8	313.6	348.2	367.9
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	10,201.7	10,848.9	11,559.9	12,310.2	13,240.0	13,939.4

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	18.8	20.1	20.8	22.3	24.4	25.6
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	94,076.1	97,117.3	98,558.2	104,733.9	109,940.6	111,073.3
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,348.3	5,575.9	5,688.7	5,739.5	5,796.3	6,011.8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,367.1	4,656.6	5,220.6	5,655.7	6,064.6	6,208.3

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	133.3	141.4	157.0	161.4	171.1	175.8
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	40,480.7	45,290.1	49,039.6	51,261.0	52,335.3	55,216.4
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	19,797.7	21,109.9	23,496.6	24,998.0	26,504.1	28,986.1
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	10.0	10.0	10.0	10.0	10.1	10.6

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	14 Industri Alat Angkutan	17,299.2	17,351.6	17,403.0	17,510.4	17,614.5	18,212.7
	15 Industri Furnitur	22,208.0	22,498.7	22,638.9	23,505.6	23,851.2	24,902.9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	6,847.4	6,900.2	6,912.4	6,971.2	7,085.1	7,486.7
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,097.3	5,587.8	6,135.3	6,400.7	6,504.8	6,794.1
	1 Ketenagalistrikan	5,097.3	5,587.8	6,135.3	6,400.7	6,504.8	6,794.1
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur	9,520.7	10,079.6	10,622.1	11,167.0	11,528.6	12,051.7

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Ulang						
F	Konstruksi	1,066,913.9	1,205,099.7	1,370,076.8	1,486,569.1	1,614,889.9	1,742,561.5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,524,584.5	1,661,511.3	1,825,230.1	1,989,134.8	2,130,767.3	2,224,567.4
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	375,190.5	406,282.8	437,688.5	473,931.4	506,045.9	539,385.1
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,149,394.1	1,255,228.5	1,387,541.6	1,515,203.4	1,624,721.4	1,685,182.2
H	Transportasi dan Pergudangan	176,778.0	180,806.1	180,847.2	187,916.5	197,634.9	205,927.9
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	2 Angkutan Darat	79,524.4	84,272.4	89,936.7	96,317.4	103,251.5	107,078.5
	3 Angkutan Laut	32,777.1	34,777.1	34,777.1	36,777.1	38,777.1	42,146.9
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	46,015.8	42,015.8	35,015.8	33,015.8	30,515.8	31,019.9
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	18,460.7	19,740.8	21,117.5	21,806.1	25,090.4	25,682.6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	109,883.6	119,109.0	129,276.1	136,037.0	147,131.7	159,133.2
	1 Penyediaan Akomodasi	1,533.4	1,630.1	1,726.1	1,837.9	1,928.6	1,989.9
	2 Penyediaan Makan Minum	108,350.1	117,478.9	127,550.0	134,199.1	145,203.1	157,143.3

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
J	Informasi dan Komunikasi	528,960.9	557,036.4	606,244.7	682,773.8	730,611.3	783,043.2
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	188,050.9	200,382.6	216,588.7	238,578.1	249,263.9	257,508.0
	1 Jasa Perantara Keuangan	87,328.5	90,998.5	97,272.4	109,457.4	113,881.8	117,227.0
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	44,581.5	48,419.4	52,911.4	57,886.2	60,694.4	63,136.8
	3 Jasa Keuangan Lainnya	55,965.5	60,783.3	66,213.5	71,033.2	74,479.3	76,930.6
	4 Jasa Penunjang Keuangan	175.4	181.4	191.4	201.4	208.4	213.6
L	Real Estate	126,805.0	135,354.9	145,661.9	154,543.2	162,072.6	171,308.3
M,N	Jasa Perusahaan	28,392.6	29,590.7	30,777.5	32,108.3	33,516.6	34,986.7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	624,708.3	680,378.2	710,761.7	726,083.6	733,299.7	768,086.1

Kategori	U R A I A N	2010	2011	2012	2013	2014	2015**)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
P	Jasa Pendidikan	450,300.3	465,480.0	488,384.7	506,476.9	529,053.3	559,046.3
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	41,972.9	44,802.7	47,886.1	49,932.9	52,496.0	56,240.5
R,S,T,U	Jasa lainnya	99,301.6	101,813.3	103,762.3	106,752.3	109,346.7	113,824.0
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15,881,408.7	16,406,521.2	16,173,679.4	16,204,006.3	17,369,757.5	
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	8,424,566.9	8,959,407.5	9,536,995.3	10,157,328.9	10,666,869.6	11,207,267.1

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan Dalam Angka 2015 dan 2016

**) Angka Sangat Sementara

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa perekonomian Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami trend positif dimana secara keseluruhan nilai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan yang signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 10,32% per tahun.

Demikian pula nilai PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), secara keseluruhan sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 juga mengalami peningkatan yang positif dengan rata-rata peningkatan sebesar 5,04% per tahun. Secara kontribusi masing-masing sektor, sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB baik Harga konstan maupun harga berlaku. Kontribusi selanjutnya di sumbang oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta jasa perusahaan merupakan tiga (3) urutan yang memberikan kontribusi paling kecil terhadap PDRB. Besaran kontribusi masing-masing sektor dalam PDRB baik harga berlaku (Hb) maupun harga konstan (Hk) dapat dilihat dalam tabel 2.20 berikut ini :

Tabel 2.20.

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2010 s.d 2014 Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Kabupaten Bangkalan

NO.	SEKTOR	2010*		2011*		2012*		2013*		2014*	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan	18,82%	18,94%	18,34%	18,88%	19,90%	19,64%	20,58%	20,57%	20,32%	19,72%
2	Pertambangan dan Penggalian	48,04%	48,34%	47,89%	46,82%	42,20%	42,52%	40,17%	38,82%	40,50%	40,05%
3	Industri Pengolahan	1,77%	1,79%	1,80%	1,82%	1,93%	1,94%	1,99%	2,05%	1,99%	2,00%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,04%
5	Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,06%	0,06%	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
6	Konstruksi	6,72%	6,76%	7,30%	7,39%	8,78%	8,53%	9,34%	9,23%	9,83%	9,36%
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,60%	9,66%	9,80%	10,19%	11,00%	11,36%	11,41%	12,36%	11,29%	12,34%
8	Transportasi dan Pergudangan	1,11%	1,12%	1,04%	1,11%	1,04%	1,13%	1,06%	1,17%	1,05%	1,15%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69%	0,70%	0,70%	0,73%	0,78%	0,80%	0,80%	0,85%	0,82%	0,85%
10	Informasi dan Komunikasi	3,33%	3,35%	3,17%	3,42%	3,40%	3,77%	3,54%	4,24%	3,41%	4,23%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,18%	1,19%	1,19%	1,23%	1,32%	1,35%	1,38%	1,48%	1,35%	1,44%

NO.	SEKTOR	2010*		2011*		2012*		2013*		2014*	
		Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk	Hb	Hk
		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
12	Real Estate	0,80%	0,80%	0,81%	0,83%	0,87%	0,91%	0,87%	0,96%	0,84%	0,94%
13	Jasa Perusahaan	0,18%	0,18%	0,18%	0,18%	0,19%	0,19%	0,19%	0,20%	0,19%	0,19%
14	Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,93%	3,96%	4,12%	4,17%	4,62%	4,42%	4,71%	4,51%	4,50%	4,25%
15	Jasa Pendidikan	2,84%	2,85%	2,75%	2,85%	3,00%	3,04%	3,02%	3,15%	2,97%	3,07%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,26%	0,27%	0,26%	0,27%	0,28%	0,30%	0,28%	0,31%	0,28%	0,30%
17	Jasa lainnya	0,63%	0,63%	0,59%	0,62%	0,60%	0,65%	0,58%	0,66%	0,56%	0,63%

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2015 dan 2016

**) Angka Diperbaiki, **)Angka Sangat Sementara*

B. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, dimana angka inflasi pada Tahun 2010 sebesar 6,15% dan pada tahun 2011 turun menjadi 5,24%. Pada Tahun 2012 menunjukkan peningkatan menjadi 5,98% sementara pada Tahun 2013 tingkat inflasi di Kabupaten Bangkalan kembali menurun menjadi 5,16% dan diposisi 5,33% pada tahun 2014. Untuk tahun 2015 diperkirakan laju inflasi menjadi 4,86%.

Tabel 2.21.

Inflasi Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2015 (Persen)

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.19	5.52	7.82	6.76	6.72	5.98
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9.04	5.81	7.46	7.60	6.64	3.88
	a. Tanaman Pangan	7.37	6.16	6.24	8.15	6.22	0.30
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	19.97	4.08	5.23	7.22	5.51	7.48
	c. Perkebunan Semusim	2.58	4.90	4.64	1.54	3.26	8.11
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.90	3.51	0.11	6.79	6.96	11.78
	e. Perkebunan Tahunan	16.98	6.13	7.38	5.03	7.07	9.48
	f. Peternakan	11.67	5.48	10.66	7.38	7.30	8.48
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	13.68	4.61	4.72	5.02	8.69	5.92
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	6.86	8.24	5.60	4.50	9.16	12.69

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3 Perikanan	6.24	4.81	8.70	5.03	6.88	10.39
B	Pertambangan dan Penggalian	10.44	11.11	0.25	12.74	1.29	0.84
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	10.54	11.26	0.22	13.10	0.94	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	6.81	5.19	2.12	2.18	13.10	0.84
C	Industri Pengolahan	6.74	7.39	4.02	5.42	6.48	5.44
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	7.53	8.27	4.19	4.94	5.54	3.04

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	3 Pengolahan Tembakau	7.53	4.86	5.58	9.89	3.08	5.82
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4.81	2.93	3.08	3.41	1.90	-0.53
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4.81	2.61	3.43	4.35	2.38	2.52
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6.67	8.87	2.84	7.49	8.04	10.68
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3.70	4.32	2.37	3.75	4.48	6.16
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.34	5.14	4.91	3.83	4.43	4.24
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.69	4.99	2.46	0.77	1.77	3.67
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	4.10	6.94	5.05	2.78	7.34	6.15
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	6.69	3.99	4.91	6.13	5.90	-3.67
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	9.45	9.11	6.19	8.01	9.45	-1.04
	14 Industri Alat Angkutan	9.45	7.29	5.57	4.00	0.90	1.21
	15 Industri Furnitur	8.85	7.68	5.72	6.16	8.39	7.09
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	11.06	2.01	2.86	3.08	6.69	-0.98
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.91	-3.98	-8.28	-5.28	0.65	-0.71
	1 Ketenagalistrikan	0.91	-3.98	-8.28	-5.28	0.65	-0.71
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	-	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.52	2.94	8.61	5.44	4.43	4.79

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
F	Konstruksi	8.66	7.24	7.78	6.20	7.63	1.70
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.28	4.52	4.00	3.13	2.64	6.63
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	7.07	4.52	5.15	5.49	2.45	-0.23
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4.71	4.52	3.64	2.39	2.70	8.90
H	Transportasi dan Pergudangan	2.58	1.82	1.94	5.88	5.31	5.65
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	1.79	0.82	1.18	3.40	4.01	7.54
	3 Angkutan Laut	1.59	0.58	4.29	5.18	7.01	-3.42
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	4.11	2.72	0.57	6.60	7.16	9.28
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang	1.30	6.33	3.85	16.26	4.48	8.53

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Angkutan, Pos dan Kurir						
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.86	3.84	4.78	4.98	5.69	5.57
	1 Penyediaan Akomodasi	5.93	7.18	5.34	4.43	5.18	5.87
	2 Penyediaan Makan Minum	5.86	3.79	4.78	4.99	5.70	5.57
J	Informasi dan Komunikasi	0.63	0.71	0.31	0.21	0.16	1.53
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.99	5.17	4.31	2.82	4.37	5.60
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.14	4.32	5.58	1.84	3.31	6.38
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	8.60	6.36	2.97	3.07	5.25	4.55
	3 Jasa Keuangan Lainnya	6.95	5.49	3.52	4.09	5.25	5.29
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.44	5.51	4.95	4.48	2.07	6.08
L	Real Estate	6.75	5.48	1.60	2.78	2.23	5.28

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
M,N	Jasa Perusahaan	6.64	5.05	6.02	5.86	2.98	6.54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.26	7.20	9.33	8.06	5.14	5.14
P	Jasa Pendidikan	4.13	4.54	6.14	4.98	4.55	5.27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.30	2.28	2.84	4.08	4.56	3.32
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.02	3.45	0.55	2.49	4.95	4.29
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	8.05	7.97	3.29	8.12	3.65	-
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	6.15	5.24	5.98	5.16	5.33	4.86

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan 2015 dan 2016

*)Angka Diperbaiki

**)Angka Sangat Sementara

Tingkat inflasi dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir menunjukkan tren yang cukup aman dimana laju inflasi dibawah dua digit dan masih di bawah tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini menggambarkan semakin menguatnya daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi regional, diharapkan laju inflasi tetap bertahan di bawah dua digit dan di bawah pertumbuhan ekonomi.

Dapat dijelaskan bahwa laju inflasi PDRB tanpa migas Tahun 2010 sebesar 6,15%, pada Tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan menjadi sebesar 5,24% dan 5,98%, sedangkan pada Tahun 2013 turun menjadi sebesar 5,16% dan pada Tahun 2014 naik tipis menjadi 5,33%, serta di Tahun 2015 diperkirakan turun hanya menjadi sebesar 4,86%.

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

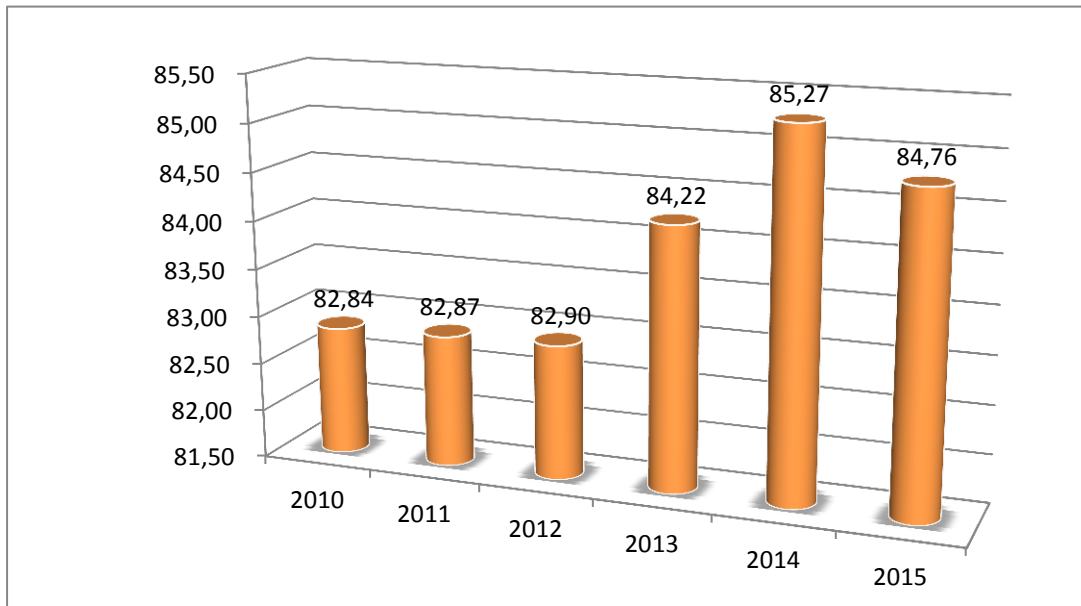
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator: angka melek huruf dan angka rata-rata lama sekolah. Berikut ini disajikan beberapa hasil analisis dari beberapa indikator kinerja pada fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut :

1. Angka Melek Huruf

Dari data yang ada, diketahui bahwa angka melek huruf di Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 adalah sebesar 84,76%. Artinya sekitar 84,76% dari penduduk berusia 15 tahun ke atas di Kabupaten Bangkalan telah mempunyai kemampuan membaca dan menulis, baik huruf latin saja, huruf lainnya saja atau kedua – duanya.

Angka melek huruf di Kabupaten Bangkalan mengalami kenaikan yang tinggi, di Tahun 2010 ke Tahun 2015, meski data untuk tahun 2014 menunjukkan peningkatan dan menurun pada tahun 2015. Namun tidak tertutup kemungkinan faktor ekonomi juga menjadi pemicu terjadinya pergeseran angka melek huruf di Kabupaten Bangkalan.

Gambar 2.3.
Angka Melek Huruf Tahun 2010 -2015

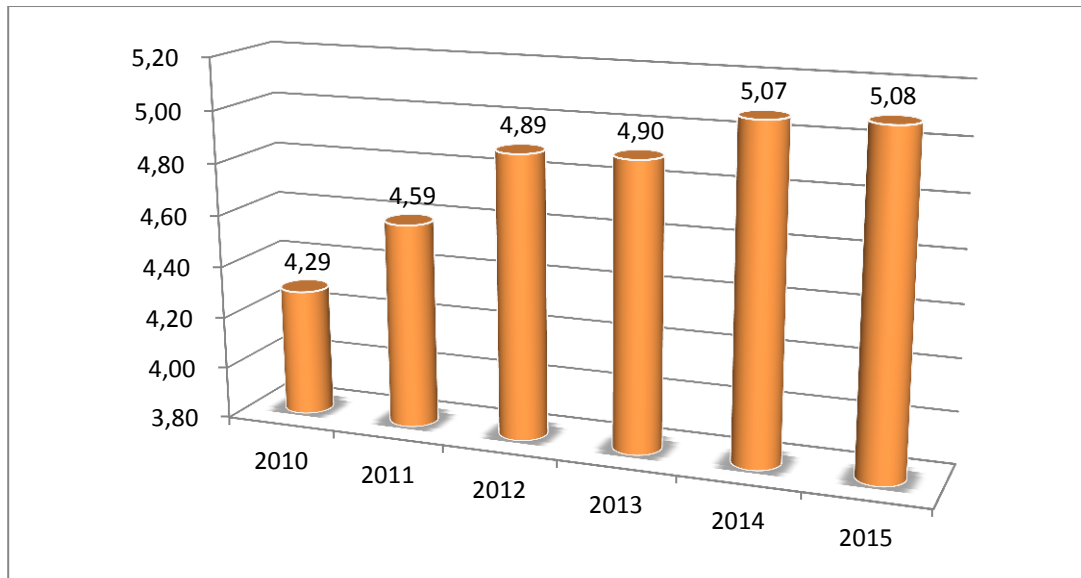


Sumber Data : Angka Melek Huruf 2010 s.d 2015 Provinsi Jawa Timur dan Indikator Sosial Budaya Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kabupaten Bangkalan

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bangkalan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 menunjukkan angka 4,29 dan Tahun 2011 menjadi 4,59, pada Tahun 2012 menjadi 4,89 dan pada Tahun 2013 menjadi 4,90 sedangkan Tahun 2014 mengalami kenaikan menjadi 5,07, Tahun 2015 mengalami peningkatan 5,08. Salah satu faktor peningkatan tersebut dikarenakan adanya Program BOS (Biaya Operasional Sekolah) dapat meringankan biaya pendidikan yang dipikul oleh masyarakat, didukung dengan adanya program wajib belajar 9 tahun yang menjadi wajib belajar 12 tahun yang mampu menggugah kesadaran siswa dan orang tua untuk tetap melanjutkan sekolahnya.

Gambar 2.4.
Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2010 – 2015

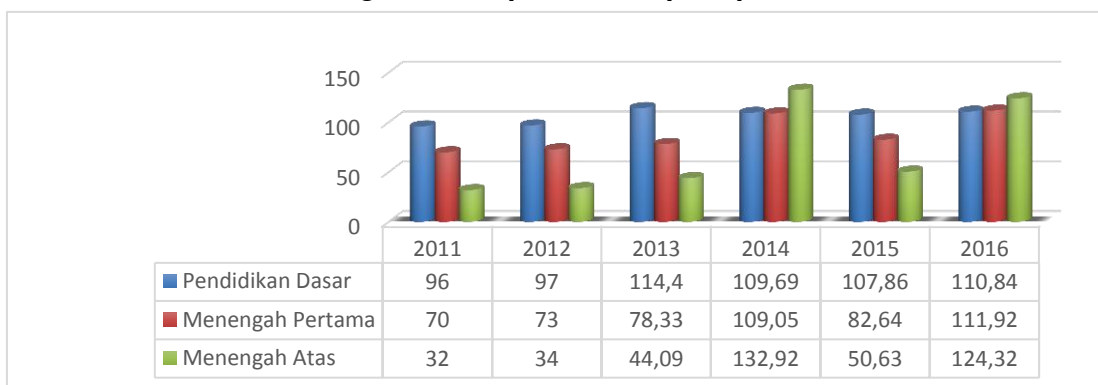


Sumber Data : Indikator Sosial Budaya Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, BPS Kabupaten Bangkalan

3. Angka Partisipasi Murni dan Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) yang merupakan indikator tingkat partisipasi masyarakat dalam menikmati pelayanan pendidikan formal di setiap jenjang sekolah dan Angka Partisipasi Murni (APM) yang merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan pemerataan pendidikan, dimana data menunjukkan banyaknya anak usia sekolah baik pada tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/K/MA yang menempuh pendidikan. Untuk lebih jelasnya APM di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada gambar 2.3. berikut ini.

Gambar 2.5.
Angka Partisipasi Murni (APM)

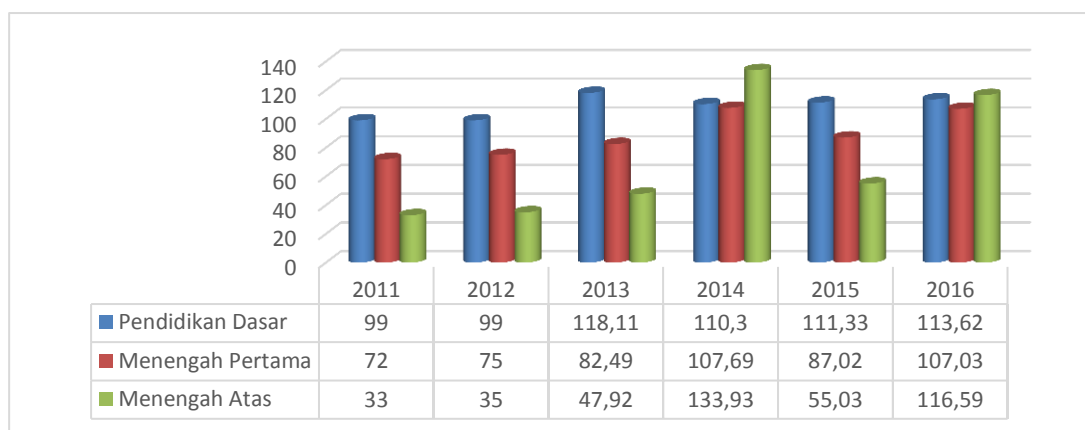


Sumber data : LAKIP Kabupaten Bangkalan Tahun 2016

Perhitungan APM dilakukan dengan cara membandingkan jumlah siswa dalam kelompok usia 7-12; 13-15; 16-18 tahun yang bersekolah SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12; 13-15; 16-18 tahun pada periode yang sama.

Angka Partisipasi Murni (APM) sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (7-12 tahun) dan angka partisipasi murni (APM) sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (13-15 tahun) dari tahun 2010 sampai tahun 2016 secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan membaik.

Gambar 2.6.
Angka Partisipasi Kasar (APK)



Sumber data : LAKIP Tahun 2016 Kabupaten Bangkalan

Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang perhitungannya dilakukan dengan cara menghitung Persentase jumlah siswa SD/MI; SMP/MTs; SMA/MA/SMK terhadap jumlah anak dalam kelompok usia 7-12; 13-15; 16-18 tahun pada periode yang sama. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah maupun setingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan /Madrasah Aliyah sejak Tahun 2010 sampai Tahun 2016 secara keseluruhan menunjukkan kecenderungan meningkat/ membaik.

4. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indeks komposit yang terdiri dari tiga indikator, yaitu :

- 1) Indikator Kesehatan,
- 2) Indikator Pendidikan dan
- 3) Indikator Daya Beli.

Tabel 2.22.
IPM Kabupaten Bangkalan Tahun 2010 – 2015

Tahun	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IPM	57.23	58.63	59.65	60.19	60.71	61.49

*Sumber Data : Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur 2010 – 2015,
BPS Provinsi Jawa Timur*

Perkembangan IPM Kabupaten Bangkalan semakin baik dari tahun ke tahun. Ini terlihat dari nilai IPM dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 yang terus meningkat. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Bangkalan mencapai angka 57,23 dan meningkat di tahun - tahun berikutnya menjadi 58,63 tahun 2011, dan 59,65 pada tahun 2012. Tahun 2013 kembali meningkat menjadi 60,19 dan tahun 2014 diposisi 60,71. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 61.49.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat dijadikan dasar dalam penentuan klasifikasi status pembangunan manusia. Jika merujuk pada klasifikasi tersebut, IPM Kabupaten Bangkalan yang mencapai 61,49 termasuk dalam level menengah.

5. Angka Usia Harapan Hidup

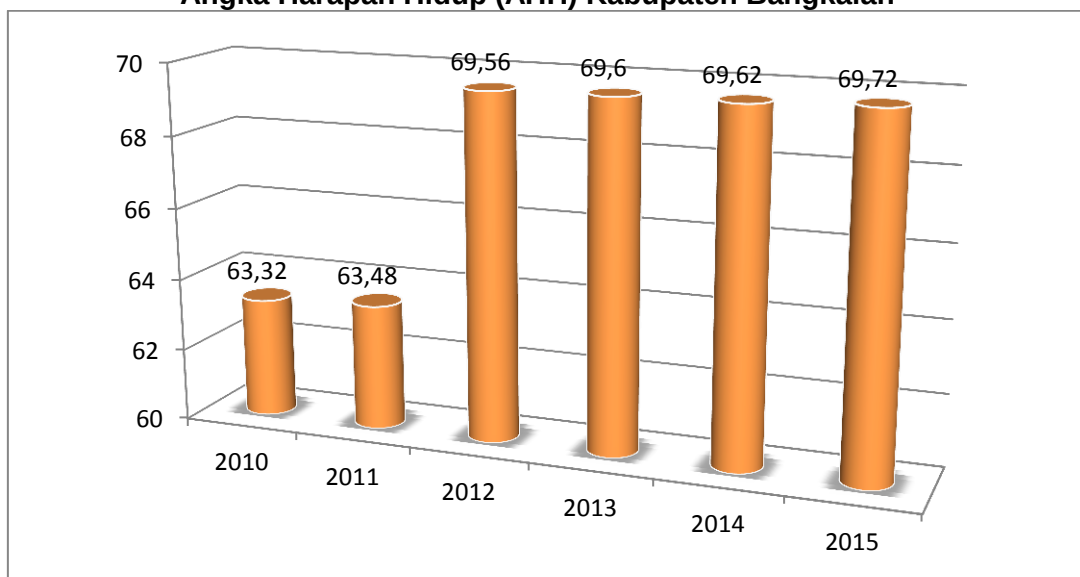
Angka Harapan Hidup (AHH) diharapkan dapat mencerminkan “lama hidup” sekaligus status kesehatan suatu masyarakat. Faktor yang mempengaruhi peluang hidup adalah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya kesehatan dan ditunjang dengan kemudahan mengakses sarana dan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan.

Indeks kesehatan diperoleh dari pengolahan Angka Harapan Hidup yang dihitung melalui metode tak langsung (*indirect methods*) dengan menggunakan dua macam data dasar yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live*

births) dan jumlah rata-rata anak yang masih hidup (*still live children*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan.

Secara historis, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan trend yang positif, peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) yang cukup signifikan selama dua tahun terakhir merupakan sinyal positif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan di bidang kesehatan. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bangkalan pada Tahun 2010 mencapai 63,32 persen, pada tahun 2011 mencapai 63,48 dan pada Tahun 2012 Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 69,56. Dan pada Tahun 2013 kembali mengalami peningkatan menjadi 69,60 dan pada Tahun 2014 mencapai 69,62 serta di Tahun 2015 menjadi 69,72.

Gambar 2.7.
Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bangkalan



Sumber Data : Indikator Sosial Budaya Kabupaten Bangkalan Tahun 2016, BPS Kabupaten Bangkalan

Adanya peningkatan Angka Harapan Hidup dari tahun ke tahun merupakan sinyal positif yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan di bidang kesehatan. Ini menunjukkan bahwa ada peningkatan yang positif dalam penanganan masalah kesehatan yang telah dilakukan pemerintah.

6. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

A. Seni Budaya

Banyaknya informasi yang masuk baik melalui media massa maupun media elektronik sehingga dapat mempengaruhi perilaku budaya masyarakat, hal ini menyebabkan semakin dilupakannya budaya ataupun nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang. Tentunya ini sangat memprihatinkan, karena berakibat asing dengan budayanya sendiri. Untuk itu pemerintah dan masyarakat perlu upaya yang keras dalam menjaga kelestarian budaya leluhur dengan melakukan pemberdayaan sertamenyediakan ruang, tempat dan waktu bukan hanya untuk seniman dan budayawan dalam melestarikan dan mengembangkan seni budaya tetapi juga masyarakat secara luas.

Tabel 2.23. menggambarkan kondisi organisasi dan anggota kesenian di Kabupaten Bangkalan. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih cukup banyak organisasi kesenian dan anggotanya yang terdapat di Kabupaten Bangkalan. Hal ini tentunya sangat menggembirakan bagi kelangsungan kesenian yang ada di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.23.
Organisasi Kesenian di Kabupaten Bangkalan

No	Jenis Kesenian	Jumlah Organisasi
1.	Karawitan	25
2.	Orkes Melayu	47
3.	Ludruk	20
4.	Samroh	16
5.	Jaran Jawa	1
6.	Band	10
7.	Pencak Silat	50
8.	Hadrah Rodat	15
9.	Drama Teater	10
10.	Orkes Keroncong	2
11.	Kolintang	5
12.	Qosidah	15
13.	Terbang Jedor	15
14.	Lawak	5
15.	Tari Gaya Jatim	10

No	Jenis Kesenian	Jumlah Organisasi
16.	Mocopat	5
17.	Diba	30
18.	Sandur Madura	5

Sumber data : IPM Kabupaten Bangkalan 2014

B. Olah Raga

Pembangunan di bidang olahraga diarahkan kepada peningkatan prestasi olahraga di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi maupun di lingkungan masyarakat luas. Selain itu pembangunan olahraga ditujukan untuk meningkatkan kondisi fisik dan mental masyarakat, memajukan olahraga dengan meningkatkan mutu prestasi keolahragaan di Kabupaten Bangkalan, memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya fasilitas olahraga yang memenuhi standart, sehingga perlu adanya peningkatan fasilitas sarana prasarana olah raga. Kekurangan fasilitas olah raga tersebut sangat mempengaruhi terhadap prestasi olah raga di Kabupaten Bangkalan. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bangkalan secara bertahap berupaya untuk memenuhi seluruh fasilitas yang dibutuhkan melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.1.3.1.1 Urusan Pendidikan

Pada urusan pendidikan, untuk Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, maka yang harus dilaksanakan adalah bagaimana menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat itu secara sadar untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan serta wawasan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal. Pendidikan tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan saja akan tetapi juga dilaksanakan oleh Kementerian Agama seperti tampak pada tabel 2.24.

Tabel 2.24.
Perkembangan Pendidikan Dasar, Menengah Pertama dan Atas

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
A	SEKOLAH							
1	Taman Kanak-Kanak (TK)							
	a. Negeri	Unit	1	1	1	1	1	1
	b. Swasta	Unit	255	239	319	319	319	319
	JUMLAH		256	240	320	320	320	320
2	Sekolah Luar Biasa (SDLB)							
	a. Negeri	Unit	1	1	1	1	1	1
	b. Swasta	Unit	1	1	1	1	1	1
	JUMLAH		2	2	2	2	2	2
3	Sekolah Dasar (SD)							
	a. Negeri	Unit	659	659	659	659	658	653
	b. Swasta	Unit	14	17	28	41	45	28
	JUMLAH		673	676	687	700	703	681
4	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)							
	a. Negeri	Unit	52	52	52	52	54	55
	b. Swasta	Unit	101	107	125	125	142	148
	JUMLAH		153	159	177	177	196	203
5	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)							

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	a. Negeri	Unit	9	9	9	9	10	10
	b. Swasta	Unit	23	30	30	40	40	56
	JUMLAH		32	39	39	49	50	66
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
	a. Negeri	Unit	9	10	10	10	10	10
	b. Swasta	Unit	16	30	30	30	30	41
	JUMLAH		25	40	40	40	40	51
B	SISWA							
1	Taman Kanak-Kanak (TK)							
	a. Negeri	Siswa	51	69	85	85	85	85
	b. Swasta	Siswa	16,341	23,075	27,706	27,706	27,706	27,706
	JUMLAH		16,392	23,144	27,791	27,791	27,791	27,791
2	Sekolah Luar Biasa (SDLB)							
	a. Negeri	Siswa	46	47	49	49	49	49
	b. Swasta	Siswa	18	14	14	14	14	14
	JUMLAH		64	61	63	63	63	63
3	Sekolah Dasar (SD)							
	a. Negeri	Siswa	113,759	116,041	116,867	116,867	111,475	107,614
	b. Swasta	Siswa	1,983	1,997	6,614	6,614	4,186	4,738

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	JUMLAH		115,742	118,038	123,481	123,481	115,661	112,352
4	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)							
	a. Negeri	Siswa	20,664	21,063	22,241	22,241	21,761	21,114
	b. Swasta	Siswa	9,169	9,805	15,130	15,130	13,633	14,633
	JUMLAH		29,833	30,868	37,371	37,371	35,394	35,747
5	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)							
	a. Negeri	Siswa	7,251	7,781	7,728	6,523	7,433	7,679
	b. Swasta	Siswa	3,736	3,858	4,061	3,822	3,822	7,239
	JUMLAH		10,987	11,639	11,789	10,345	11,255	14,918
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
	a. Negeri	Siswa	3,153	3,941	4,446	4,446	4,446	5,830
	b. Swasta	Siswa	2,022	2,696	3,062	3,062	3,062	4,737
	JUMLAH		5,175	6,637	7,508	7,508	7,508	10,567
C	GURU							
1	Taman Kanak-Kanak (TK)							
	a. Negeri	Orang	9	15	16	16	16	16
	b. Swasta	Orang	1,594	2,311	2,788	2,788	2,788	2,788
	JUMLAH		1,603	2,326	2,804	2,804	2,804	2,804
2	Sekolah Luar Biasa (SLB)							

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	a. Negeri	Orang	7	7	7	7	7	7
	b. Swasta	Orang	5	5	6	6	6	6
	JUMLAH		12	12	13	13	13	13
3	Sekolah Dasar (SD)							
	a. Negeri	Orang	6,346	6,264	6,180	6,180	6,227	6,085
	b. Swasta	Orang	32	25	25	25	278	301
	JUMLAH		6,378	6,289	6,205	6,205	6,505	6,386
4	Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP)							
	a. Negeri	Orang	1,303	1,826	1,922	1,922	1,563	1,737
	b. Swasta	Orang	457	413	483	483	1608	1136
	JUMLAH		1,760	2,239	2,405	2,405	3,171	2,873
5	Sekolah Lanjut Tingkat Atas (SLTA)							
	a. Negeri	Orang	690	719	731	731	788	862
	b. Swasta	Orang	402	412	421	421	61	61
	JUMLAH		1,092	1,131	1,152	1,152	849	923
6	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)							
	a. Negeri	Orang	458	474	478	478	478	478
	b. Swasta	Orang	667	680	692	692	692	260
	JUMLAH		1,125	1,154	1,170	1,170	1,170	738

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
D	SEKOLAH MADRASAH							
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI)							
	a. Negeri	Unit	2	2	2	2	2	2
	b. Swasta	Unit	126	144	137	137	137	140
	JUMLAH		128	146	139	139	139	142
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)							
	a. Negeri	Unit	1	1	1	1	1	1
	b. Swasta	Unit	112	129	124	124	124	134
	JUMLAH		113	130	125	125	125	135
3	Madrasah Aliyah (MA)							
	a. Negeri	Unit	1	1	1	1	1	1
	b. Swasta	Unit	39	43	45	45	45	56
	JUMLAH		40	44	46	46	46	57
E	SISWA MADRASAH							
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI)							
	a. Negeri	Siswa	734	682	806	806	806	763
	b. Swasta	Siswa	15,618	16,812	14,409	14,409	14,409	15,360
	JUMLAH		16,352	17,494	15,215	15,215	15,215	16,123
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)							

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	a. Negeri	Siswa	799	788	806	806	806	806
	b. Swasta	Siswa	13,180	13,664	14,409	14,409	14,409	15,113
	JUMLAH		13,979	14,452	15,215	15,215	15,215	15,919
3	Madrasah Aliyah (MA)							
	a. Negeri	Siswa	1,430	1,365	1,016	1,016	1,016	1,012
	b. Swasta	Siswa	4,372	4,649	5,717	5,717	5,717	6,480
	JUMLAH		5,802	6,014	6,733	6,733	6,733	7,492
F	GURU MADRASAH							
1	Madrasah Ibtidaiyah (MI)							
	a. Negeri	Orang	42	43	50	50	50	50
	b. Swasta	Orang	1,171	1,247	1,447	1,447	1,447	1,375
	JUMLAH		1,213	1,290	1,497	1,497	1,497	1,425
2	Madrasah Tsanawiyah (MTs)							
	a. Negeri	Orang	54	68	65	65	65	67
	b. Swasta	Orang	1,780	1,823	2,034	2,034	2,034	2,164
	JUMLAH		1,834	1,891	2,099	2,099	2,099	2,231
3	Madrasah Aliyah (MA)							
	a. Negeri	Orang	64	48	61	61	61	91
	b. Swasta	Orang	699	701	788	788	788	991

No	Uraian	Satuan	Tahun					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
	JUMLAH		763	749	849	849	849	1,082

Sumber Data: Bangkalan Dalam Angka Tahun 2016.

Untuk menunjang program pendidikan Nasional, pemerintah Kabupaten Bangkalan sejak tahun 2013 telah mengalokasikan dana untuk merealisasikan program pendidikan gratis sampai dengan tingkat SMA.

2.1.3.1.2. Urusan Kesehatan

1. Sarana Prasarana Kesehatan

Dalam mengupayakan kesehatan masyarakat dengan terus menerus menumbuhkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan arti pentingnya memelihara dan menjaga kesehatan serta menyediakan perangkat fisik kesehatan seoptimal mungkin. Perangkat fisik kesehatan yang dimaksud adalah tenaga medis yang profesional, puskesmas atau yang sejenis hingga pelosok desa, obat-obatan murah dan sebagainya.

Hal ini tercermin dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan yang sedang berlangsung yakni “**SEHATI**” (Sehat Bersama Bupati) yang menuju peningkatan taraf kesehatan masyarakat Bangkalan.

Tabel 2.25.
Tenaga Kesehatan di Kabupaten Bangkalan Tahun 2010-2015

No	Uraian	Satuan	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Dokter	Orang	29	38	38	38	34	34
2	Jumlah Dokter Gigi	Orang	13	13	13	13	13	14
3	Jumlah Dokter Spesialis	Orang	0	1	2	1	1	0
4	Jumlah Bidan/Perawat	Orang	355	452	452	452	452	834
5	Jumlah Sanitarian	Orang	7	7	7	7	2	2
6	Jumlah Paramedis Lain	Orang	9	9	9	9	9	9
7	Jumlah Tenaga Non Medis	Orang	35	35	35	35	30	30

Sumber data : Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 dan Bangkalan

Dalam Angka 2016

Dalam pemecahan masalah kesehatan tidak terlepas dari pemecahan masalah ekonomi. Banyak ahli yang telah membuktikan adanya keterkaitan yang erat antara derajat kesehatan dengan perkembangan ekonomi suatu wilayah.

Jadi penghasilan (*income*) merupakan factor determinan yang penting pada kesehatan karena bagi penduduk yang cukup dan mampu akan berbeda dengan penduduk yang miskin dalam menyikapi mengenai kesehatan. Penduduk yang cukup dan mampu dari segi *income* akan menempatkan masalah

kesehatan pada nomor utama, pada rumah miskin masalah kesehatan menjadi hal yang mahal. Dengan tingkat pendapatan yang sangat terbatas. Pengeluaran rumah tangga hanya untuk memenuhi konsumsi pangan sehari-hari.

Nampak pada table 2.25. sarana kesehatan yang mudah diakses masyarakat dengan statusnya dan table 2.26 fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan status kepemilikan.

Tabel 2.26.
POSYANDU menurut jenisnya di Kabupaten Bangkalan

Kecamatan		Posyandu				
		Purnama	Mandiri	Pratama	Madya	Jumlah
1	Kamal	13	12	15	15	55
2	Labang	9	0	0	32	41
3	Kwayar	0	0	66	0	66
4	Modung	25	9	3	26	63
5	Blega	20	1	5	40	66
6	Konang	0	0	26	21	47
7	Galis	29	4	0	41	74
8	Tanah Merah	16	4	0	49	69
9	Tragah	18	0	2	21	41
10	Socah	13	4	14	31	62
11	Bangkalan	48	20	4	6	78
12	Burneh	50	4	0	10	64
13	Arosbaya	47	2	5	8	62
14	Geger	20	0	0	43	63
15	Kokop	16	1	14	33	64
16	Tanjung Bumi	15	2	0	37	54
17	Sepulu	25	8	0	7	54

Kecamatan		Posyandu				
		Purnama	Mandiri	Pratama	Madya	Jumlah
18	Klampis	40	1	0	29	70
Jumlah/Total		418	72	154	449	1093
Total 2014		350	48	150	502	1050
2013						
2012		325	26	250	486	1087
2011		354	20	181	895	1450
2010		304	39	287	496	1126

Sumber Data: Bangkalan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel 2.27.
Fasilitas Kesehatan Menurut Kepemilikan Tahun 2015

No	Fasilitas	Pemerintah	BUMN	Swasta	Jumlah
1	Rumah Sakit Umum	1		1	2
2	Rumah Sakit Khusus			1	1
3	Puskesmas Rawat Inap	22			22
	Jumlah tempat tidur	236			236
4	Puskesmas Keliling	7			7
5	Puskesmas pembantu	11			11
6	Rumah Bersalin			1	1
7	Balai Pengobatan/Klinik		2	1	3
8	Praktek Dokter Bersama			1	1
9	Praktek Dokter Perorangan			41	41
10	Praktik Pengobatan Tradisional			1	1
11	Apotek			66	66
12	Toko Obat			17	17

Sumber : Bangkalan Dalam Angka Tahun 2016

Kemudahan akses sarana kesehatan itu dengan program yang dilaksanakan di kabupaten Bangkalan (SEHATI) dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan, rupanya masih perlu perjuangan panjang.

2.1.3.1.3 Urusan Pekerjaan Umum

Pembangunan Infrastruktur ditandai dengan meningkatnya pemerataan dan kualitas sarana prasarana pekerjaan umum guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan daya saing daerah.

A. Sarana dan Prasarana Jaringan Irigasi

Sebagian besar sektor pertanian di Kabupaten Bangkalan memanfaatkan curah hujan guna mensuplai sistem pengairan untuk areal pertaniannya. Untuk daerah irigasi pada kawasan pertanian ini sebagian besar menggunakan metode konvensional atau sistem irigasi non teknis yang juga tergantung juga dari curah hujan. Adapun Daerah Irigasi (DI) yang ada di Kabupaten Bangkalan berdasarkan Dinas Pengairan Bangkalan terdapat Tujuh Puluh Delapan lokasi.

Terdapat 60 lokasi sumber air dan terdapat 15 lokasi yang mempunyai debit relatif besar, yang tersebar di 11 Kecamatan. Dari ke-15 sumber air tersebut, sumber air Pocong mempunyai debit terbesar.

B. Jalan

Jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal sepanjang 721.365 Km pada Tahun 2013. Jenis prasarana jalan di Kabupaten Bangkalan berupa jalan aspal, kerikil/makadam, tanah, paving dan beton rabat. Untuk jalan aspal terdapat pada ruas – ruas jalan utama Kecamatan, sedangkan makadam masih banyak terdapat pada jalan desa dan jalan lingkungan.

Selanjutnya diperlukan perhatian dan penanganan dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan agar kondisi jalan tetap terpelihara sehingga memudahkan akses bagi warga serta memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pengangkutan hasil– hasil produksi di wilayah Kabupaten Bangkalan menuju pasar–pasar potensial dan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan.

Tabel 2.28.
Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Tahun 2012– 2015
Kabupaten Bangkalan

NO	URAIAN	SATUAN	2012	2013	2014	2015
1.	Kondisi Baik	Km	355.300	396.337	484.900	484.900
2.	Kondisi Sedang	Km	180.400	144.658	109.920	109.920
3.	Kondisi rusak	Km	185.665	180.370	126.545	126.545
4.	Jumlah Jalan Kabupaten	Km	721.365	721.365	721.365	721.365

Sumber :Bangkalan Dalam Angka 2016

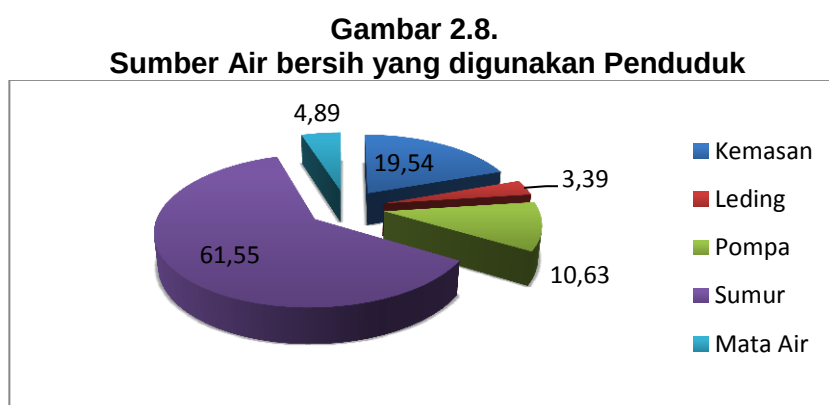
2.1.3.1.4 Urusan Perumahan

Keberhasilan penyelenggaraan urusan perumahan dapat dilihat melalui beberapa *indicator* kinerja, diantaranya adalah sarana air bersih yang dimanfaatkan penduduk dan sarana pembuangan air besar yang digunakan penduduk.

A. Air Bersih atau Air Minum

Pemanfaatan air yang berasal dari PDAM atau ledeng dikonsumsi oleh masyarakat di 5 wilayah Kecamatan; Kecamatan Kota Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Kokop dan Kecamatan Modung serta kecamatan Kamal. Disamping kebutuhan air yang berasal dari PDAM masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ada juga yang memakai air sumur.

Adapun sarana air bersih yang digunakan penduduk sebagaimana tergambar pada grafik dibawah ini :



Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka Tahun 2016

Dari total jumlah rumah tangga 225.559, yang terdeteksi menggunakan Ledeng sebagai sumber air minumnya adalah 3.39% (7.646), memanfaatkan sumur sebanyak 61.55% (138.832), pompa sebanyak 10.63% (23.977), mata air sebanyak 4.89% (11.030), dan air minum dalam kemasan sebanyak 19.54% (44.074).

Adapun sarana pembuangan air besar yang digunakan penduduk tercantum dalam tabel 2.28 :

Tabel 2.29.

Jumlah Rumah Tangga dan Jenis sarana Tempat Buang Air Besar

No	Jenis Sarana Buang Air Besar	Jumlah Rumah Tangga
1	Septik Tank	0
2	Leher Angsa	85.219
3	Cemplung	115.354

Sumber Data :Bangkalan dalam Angka Tahun 2016

2.1.3.1.5. Urusan Penataan Ruang

Perkembangan kinerja urusan penataan ruang di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30.

Indikator Kinerja Urusan Penataan Ruang 2011-2015

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Tersusunnya Dokumen RDTR	Dokumen	-	-	1	1	1
Jumlah pelaporan penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan	Kali	2	2	2	2	2

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang

2.1.3.1.6 Urusan Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif dengan melibatkan stakeholders serta meningkatkan kualitas dan manajemen data dengan memanfaatkan teknologi informasi.

Dokumen perencanaan daerah yang menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2005-2025, perencanaan jangka menengah yang berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018. Pelaksanaan perencanaan tahunan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahunnya. RKPD dimaksud merupakan implementasi target tahunan RPJMD.

Tabel 2.31.
Indikator Urusan Perencanaan Pembangunan

Uraian	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Tersedianya Dokumen / Review Perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

2.1.3.1.7 Urusan Perhubungan

Pembangunan di bidang perhubungan dilaksanakan dengan memelihara, meningkatkan kuantitas dan kualitas serta pemerataan prasarana dan sarana perhubungan untuk mewujudkan tertib berlalu lintas dan mengurangi kecelakaan.

Tabel 2.32.
Indikator Urusan Perhubungan

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	NA	4904	5916	6.392	65,569	6.569
Jumlah arus penumpang angkutan umum	Orang	3.056.277	1.595.069	1.595.069	1.793.918	1.883.613	1.746.013
Jumlah angkutan darat	Unit	11.692	45.809	45.859	37.381	6,569	7.182
Jumlah rambu yang terpasang	Unit	159	180	100	28	311 Unit	92 Unit
Jumlah terminal	Unit	3	3	3	3	-	1

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

2.1.3.1.8. Urusan Lingkungan Hidup

Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan dengan menjaga dan meningkatnya kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan melalui peran serta masyarakat serta menjaga kuantitas dan kualitas sumberdaya alam secara berkelanjutan melalui rehabilitasi, konservasi dan peran serta masyarakat.

Tabel 2.33.
Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Uraian	Satuan	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
Persentase penanganan sampah	%	90	90	100,69	100,68
Tindak lanjut pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan	%	100	100	100	100
Persentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan	%	21	21	10,14	12

Sumber : Badan Lingkungan Hidup

2.1.3.1.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan urusan Kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan serta meningkatkan kualitas pengelolaan dokumen, data dan informasi penduduk.

Tabel 2.34.
Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Penduduk Ber e- KTP / Satuan Penduduk wajib e-KTP	%	12.98	7.54	73.94	20.64	64,31	3,25
Presentase Bayi Ber Akte Kelahiran	%	39.22	20.88	24.44	27.19	30	17,62
Rasio Penduduk Ber Kartu Keluarga	%	22.01	19.32	35.83	96.68	41,20	12,39

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

2.1.3.1.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keadilan dan kesetaraan gender melalui pemerataan akses dan tingkat partisipasi aktif serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang anti kekerasan terhadap perempuan dan anak di kalangan masyarakat.

Tabel 2.35.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Uraian	Satuan	TAHUN			
		2012	2013	2014	2015
Rasio KDRT	%	0,0004	0,00045	0,0013	0,0014
Persentase jumlah tenaga kerja di bawah umur	%	NA	2,39	0,0-	0,16
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	NA	1,44	5,50	1,41
Cakupan Organisasi / Lembaga Wanita yang dibina	Organisasi	NA	9	29,03	10,71
Partisipasi angkatan kerja perempuan	%	NA	61,70	44,10	46,50

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

2.1.3.1.11. rusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pembangunan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dilakukan melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dengan peningkatan pelayanan KB dan pemberdayaan keluarga kecil berkualitas; meningkatkan pembinaan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam upaya mewujudkan keluarga sejahtera; meningkatkan jaringan pelayanan dan partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Berencana; serta meningkatkan kuantitas peserta Keluarga Berencana.

Tabel 2.36.
Indikator Kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rata-rata jumlah anak per keluarga	%	2,30	2,29	2,27	2,25	2,61	2,46
Cakupan peserta KB aktif (terhadap jumlah PUS)	%	70,78	74,55	74,52	74,18	74,18	74,40
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	%	58,43	58,04	57,44	57,39	54,89	53,97

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

URUSAN SOSIAL
PELAKSANAAN URUSAN SOSIALDILAKUKAN DIANTARANYA DENGAN
MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP PMKS MELALUI PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN DAN PEMBERDAYAAN
PMKS.

Tabel 2.37.
Indikator Kinerja Urusan Sosial

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
PMKS yg memperoleh bantuan sosial	Orang	36	63	98	153	30	40
Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	Orang	36	63	98	153	30	45
Jumlah Panti Asuhan / Panti Jompo yang mendapat bantuan	Yayasan	10	5	5	0	0	0

Sumber : Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2.1.3.1.14 Urusan Ketenagakerjaan

Pembangunan di bidang ketenagakerjaan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja melalui pengembangan informasi dan bursa kerja; meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam menciptakan, memperluas dan mengembangkan lapangan kerja/kesempatan kerja; serta meningkatkan perlindungan tenaga kerja untuk menciptakan keserasian hubungan kerja.

Tabel 2.38.
Indikator Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pencari kerja yang ditempatkan	Orang	234	213	228	74	1210	226
Tingkat pengangguran terbuka	%	5.79	3.91	5.32	6.55	103,77	75,95
Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	Orang	2581	2569	2702	2759	1694	2739

Sumber : Dinas Sosial, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

2.1.3.1.15 Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan akses modal, kualitas SDM, kelembagaan koperasi dan kesejahteraan anggota serta mengembangkan UMKM.

Tabel 2.39.
Indikator Kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Unit	274.807	211.608	120.427	121.027	121.611
Jumlah Koperasi	Unit	479	762	770	777	781
Jumlah Anggota Koperasi	Orang	62.593	71.720	71.998	72.676	72.755
Jumlah koperasi aktif	Unit	275	487	489	656	666
Volume usaha koperasi dan UMKM	Rp	69.894.269	95.048.257	97.234.367	104.388.611	104.388.611

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM

2.1.3.1.16 Urusan Penanaman Modal

Urusan penanaman modal dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan investasi melalui promosi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem dan prosedur pelayanan perizinan investasi.

Tabel 2.40.
Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal

Uraian	Satuan	TAHUN		
		2013	2014	2015
Nilai Investasi PMDN, PMA dan Investasi Daerah	Rp (Juta)	878.162	429.818	1.604.449

Sumber :Bagian Penanaman Modal

2.1.3.1.17. Urusan Kebudayaan

Urusan kebudayaan dilaksanakan untuk mengembangkan kebudayaan dan pelestarian nilai-nilai luhur melalui peran aktif masyarakat dan swasta.

Tabel 2.41.
Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah kelompok kesenian	Kelompok	14	14	14	16	22	24
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	2	4	5	5	7	9
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	4	4	5	5	11	8

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.3.1.18. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga dilaksanakan untuk mengembangkan potensi generasi muda melalui peningkatan kesempatan pendidikan, ketrampilan, kewirausahaan serta melindungi pemuda dari penyimpangan nilai-

nilai moral serta meningkatkan kualitas prasarana dan sarana serta prestasi olah raga melalui peran serta masyarakat.

Tabel 2.42.
Indikator Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah klub olahraga	Klub	139	141	145	147	149	151
Jumlah organisasi olahraga	Organisasi	11	12	13	14	15	16
Jumlah organisasi pemuda	Organisasi	14	18	20	21	23	24

Sumber : Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.3.1.19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri dilaksanakan untuk mewujudkan stabilitas daerah yang didukung oleh kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban; meningkatkan etika dan moral budaya politik sesuai dengan prinsip demokrasi Pancasila serta menjunjung nilai-nilai HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan meningkatkan wawasan kebangsaan; serta meningkatkan semangat nasionalisme bagi aparat dan masyarakat.

Tabel 2.43.
Indikator Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah personil Satpol PP	orang	350	349	369	N/A	N/A
Jumlah pelanggaran Perda	Kasus	272	210	84	338	175
Frekuensi penyelenggaraan forum antar umat beragama	Kecamatan	12	4	4	4	5
Pembinaan terhadap Ormas, Orpol dan LSM (Keg. Penyuluhan pada masyarakat)	kali	1	1	1	5	5

Sumber : Bakesbangpol dan Kantor Satpol PP

2.1.3.1.20. Urusan Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dilaksanakan untuk meningkatkan koordinasi antara DPRD, Pemerintah Daerah dan masyarakat; meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur pemerintah; meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan; meningkatkan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah; mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah; meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; meningkatkan kesadaran dan penegakan hukum; serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah desa.

Tabel 2.44.
Indikator Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Cakupan ijin yang diterbitkan	%	79,2	79,7	79,9	79,9	100	100
Jumlah anggota korpri yang dibina	Orang	NA	NA	500	200	200	350
Ketepatan waktu penyelesaian laporan keuangan	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Jumlah Perda yang dihasilkan	Perda	13	17	11	17	8	4
Ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen (LAKIP Kabupaten, LKPJ, Penyebarluasan Informasi Kepada Masyarakat)	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Realisasi PAD	Rp	40.975.170.911,35	65.039.401.772,82	80.268.572.727,06	92.722.219.765,83	135.785.459.733,88	175.622.298.613,43
Rasio PAD terhadap APBD	%	4,53	5,76	6,83	6,6	9,38	9,50
Realisasi Belanja	%	90,27	89,78	91,78	99,08	98,28	98,93
Jumlah temuan pengawasan dari Inspektorat	temuan	329	361	379	374	400	431
Jumlah temuan yang terselesaikan	temuan	329	361	379	374	400	431
Jumlah RAPERDA yang disahkan	Raperda	13	17	11	17	8	5
Jumlah PERBUP dan Keputusan Bupati yang disahkan	Perbup/SK	45/397	58/474	90/556	94/648	48/426	255
Jumlah batas wilayah administrasi	Titik	-	-	56	56	70	91

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
yang dibangun	koordinat						
Ketepatan waktu penyusunan LPPD	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
Jumlah peserta diklat struktural yang dilaksanakan	Orang	45	45	45	45	182	121
Jumlah kegiatan pelayanan sosial	kegiatan	5	5	5	5	5	5
Sistem Tata Kelola Barang Daerah yang terbangun		SIMBADA	SIMBADA	SIMBADA	SIMBADA	SIMBADA	SIMBADA
Cakupan pasar (fasilitas perdagangan) yang diperbaiki	%					10,34	10,70
Jumlah kegiatan keagamaan	kegiatan	8	5	6	8	8	7

Sumber : SKPD penyelenggara Urusan Otonomi Daerah , Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

2.1.3.1.21. Urusan Ketahanan Pangan

Pembangunan di bidang ketahanan pangan dilaksanakan untuk meningkatkan ketahanan pangan melalui swasembada beras serta pengembangan pangan alternatif; meningkatkan dayaguna sarana dan prasarana irigasi; serta mengoptimalkan sistem dan distribusi sarana produksi pertanian.

Tabel 2.45.
Indikator Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
Regulasi Ketahanan Pangan	Ada/Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Ada (Perda No 5 Th 2013)
Ketersediaan pangan utama	Ton/kapita	944.022	1.027.417	1.001.167	821.170	1.008.255
Lumbung Pangan Desa	unit	4	3	7	0	7

Sumber : Badan Ketahanan Pangan

2.1.3.1.22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dilaksanakan melalui penguatan kelembagaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Tabel 2.46.
Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa

Uraian	Satuan	TAHUN						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Lembaga	281	281	281	281	281	281	281
Jumlah Desa Swasembada	Desa	281	281	281	281	281	281	281

Sumber : Bangkalan Dalam Angka Tahun 2016

2.1.3.1.23. Urusan Statistik

Urusan statistik dilaksanakan untuk meningkatkan kuantitas dan akurasi data serta meningkatkan akses informasi ke seluruh *stakeholder*.

Tabel 2.47.
Indikator Kinerja Urusan Statistik

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Buku Bangkalan Dalam Angka	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku PDRB Kabupaten Bangkalan	Ada/ Tidak	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber :Bagian Data dan Statistik

2.1.3.1.24. Urusan Kearsipan

Urusan kearsipan dilaksanakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan arsip serta meningkatkan kesadaran birokrasi dalam pengelolaan arsip.

Tabel 2.48.
Indikator Kinerja Urusan Kearsipan

Uraian	Satuan	TAHUN					
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Pengelolaan arsip secara baku	SKPD	61	61	61	61	61	61
Peningkatan sumber daya pengelola kearsipan	orang	18	24	30	36	200	75

Sumber: Kantor Perpustakaan dan Arsip

2.1.3.1.25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika dilaksanakan untuk meningkatkan ketersediaan akses data dan informasi bagi instansi dan masyarakat; mengembangkan infrastruktur jaringan komunikasi data di instansi; serta mengembangkan sistem pelayanan pemerintahan dan pembangunan melalui e-Gov. Di Kabupaten Bangkalan memiliki satu buah *web site* resmi milik pemerintah yaitu www.bangkalankab.go.id.

Tabel 2.49.
Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika

Uraian	TAHUN				
	2011	2012	2013	2014	2015
Web site milik Pemerintah daerah	1	1	1	1	1

Sumber :Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika

2.1.3.1.26. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan dilaksanakan untuk meningkatkan penyediaan buku/bahan bacaan sesuai kebutuhan pengguna; meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan; meningkatkan pembinaan; kualitas pengelolaan dan pelayanan perpustakaan; serta meningkatkan budaya baca masyarakat.

Tabel 2.50.
Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan

Uraian	Satuan	TAHUN						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Orang	25116	26.326	28.631	27.773	27.200	35.048	4.5423
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	buku	8.152	8.391	22.839	23.081	34.672	38.411	39.638

Sumber :Kantor Perpustakaan dan Arsip

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.2.1 Urusan Pertanian

Urusan pertanian dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok tani tanaman pangan dan ternak; meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dan peternak; serta meningkatkan kualitas budi daya, pengelolaan pasca panen dan pengembangan jaringan pemasaran hasil pertanian.

Tabel 2.51.
Indikator Kinerja Urusan Pertanian

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2009	2010	2011	2012	2013
Jumlah Produktivitas Padi atau bahan pangan utama lainnya						
- Padi	Kw/Ha	58,94	50,96	53,66	56,25	64,91
- Jagung	Kw/Ha	21,64	22,63	22,13	26,41	21,65
Cakupan luas lahan yang teririgasi teknis	%					
Produksi hasil peternakan						
- Daging	Ton	3554,15	3434,25	3716,49	4547,16	4027,65
- Telur	Ton	2967,49	2920,03	3418,87	1190,17	1195,73
- Susu	Ltr/ekor	25,54	28,09	44,32	29,11	17,90

Sumber :Dinas Pertanian dan Peternakan

2.1.3.2.2. Urusan Kehutanan

Urusan kehutanan dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok tani hutan dan kebun; meningkatkan peran masyarakat sebagai penyedia bibit tanaman penghijauan; serta meningkatkan pengelolaan pasca panen perkebunan dan kemitraan.

Tabel 2.52.
Indikator Kinerja Urusan Kehutanan

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Produksi hasil hutan kayu	m ³	3.942,79	2.277,7	2.312,76	2.778	2.646,51
Produksi hasil hutan non kayu	kg	40,00	75,00	235,00	650,00	725,00
Rehabilitasi lahan kritis	%	0,48	0,52	0,56	0,52	27

Sumber :Dinas Kehutanan dan Perkebunan

2.1.3.2.3. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Urusan energi dan sumber daya mineral dilaksanakan untuk meningkatkan pengelolaan Sumber Daya Mineral yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan yang berwawasan lingkungan.

Tabel 2.53.
Indikator Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Uraian	Satuan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Rumah Tangga penerima instalasi pemanfaatan energi baru terbarukan						
a. PLTS Terpusat	Rumah Tangga	30	30	0	137	60
b. PLTS Tersebar	Rumah Tangga	12	0	7	0	20
c. Biogas	Rumah Tangga	0	0	0	110	64

Sumber :Dinas Pertambangan dan Energi

2.1.3.2.4. Urusan Pariwisata

Urusan pariwisata dilaksanakan untuk meningkatkan daya tarik dan daya saing obyek wisata dan meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan melalui promosi pariwisata.

Tabel 2.54.
Indikator Kinerja Urusan Pariwisata

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Objek Wisata	objek	14	14	14	15	14
Jumlah kunjungan Wisata	orang	2.322.658	2.424.681	2.531.905	2.033.507	1.821.946

Sumber :Dinas Pemuda Olahraga, Kedudayaan dan Pariwisata

2.1.3.2.5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Urusan kelautan dan perikanan dilaksanakan untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok tani ikan; meningkatkan peran Balai Benih Ikan; serta meningkatkan produksi komoditas perikanan.

Tabel 2.55.
Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan

Uraian	Satuan	TAHUN				
		2011	2012	2013	2014	2015
Produksi Perikanan budidaya	ton	22,156.13	23,485.50	24,660.00	3.123,6	3.777,5
Produksi perikanan tangkap	ton	3,105.21	3,106.09	3,137.40	24.966,56	25.115,25
Konsumsi ikan perkapita	Kg/ kapita/ thn	22.30	23.40	23.60	23,80	23,90

Sumber :Dinas Kelautan dan Perikanan

2.1.3.2.6. Urusan Perdagangan

Urusan perdagangan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas sarana prasarana pasar tradisional; meningkatkan perlindungan konsumen; serta mengembangkan manajemen usaha, perdagangan dan pengendalian distribusi.

Tabel 2.56.
Indikator Urusan Perdagangan

Uraian	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran terhadap PDRB ADHB (%)	25,79	26,40	26,98	27,62	28,05

Sumber :PDRB/ APE Kabupaten Bangkalan 2014

2.1.3.2.7. Urusan Industri

Urusan industri dilaksanakan untuk meningkatkan penguasaan, pengembangan dan penerapan iptek dalam usaha perekonomian terutama UMKM dan meningkatkan industri mikro dan kecil melalui penguatan modal dan perluasan jaringan pemasaran.

Tabel 2.57.
Indikator Urusan Perindustrian

Uraian	TAHUN				
	2009	2010	2011	2012	2013
Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB ADHB (%)	4,03	4,11	4,09	4,07	4,11
Pertumbuhan industri	3.825	3.835	3.874	3.869	3.870

Sumber :PDRB/ APE Kabupaten Bangkalan 2014

Tabel 2.58.
Jumlah Perusahaan dan jumlah Tenaga Kerja di Perusahaan Industri

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Industri Besar						
	a. Jumlah Perusahaan	4	4	4	4	4	4
	b. Jumlah Tenaga Kerja	579	690	754	690	690	690
2	Industri Sedang						
	a. Jumlah Perusahaan	5	7	9	10	11	11
	b. Jumlah Tenaga Kerja	129	157	182	212	268	268
3	Industri Kecil						
	a. Jumlah Perusahaan	176	181	188	177	181	189
	b. Jumlah Tenaga Kerja	1.661	1.731	1.773	1.599	1.607	1.693
4	Industri Mikro						
	a. Jumlah Perusahaan	254	256	259	280	280	283
	b. Jumlah Tenaga Kerja	1.515	1.524	1.533	1.480	1.480	1.494
5	Industri Non Formal						
	a. Jumlah Sentra	131	134	136	138	140	141
	b. Jumlah Tenaga Kerja	13.963	14.113	14.153	14.283	14.328	14.348

Sumber : Bangkalan Dalam Angka Tahun 2016

2.1.3.2.8. Urusan Ketrasmigrasian

Urusan ketrasmigrasian dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan calon transmigran dan meningkatkan kerjasama dan fasilitasi calon transmigran.

Tabel 2.59.
Indikator Urusan Ketrasmigrasian

Uraian	TAHUN						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah transmigran umum/swakarsa	31 jiwa	-	-	-	-	-	-

Sumber :Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan transmigrasi

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Kondisi Ekonomi Daerah Setiap Sektor

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan hingga saat ini masih di bawah Provinsi Jawa Timur, namun sejak dioperasikannya jembatan Suramadu, secara geografis Kabupaten Bangkalan memiliki peluang yang sangat besar untuk mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan Kabupaten lain di pulau Madura. Pada Tahun 2012, sektor Pertambangan dan Penggalian telah memberikan kontribusi PDRB sebesar 42,20 persen dan menempati urutan pertama, disusul sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 19,90 persen.

Pada Tahun 2013 sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 40,17 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,58 persen. Sedangkan pada Tahun 2014 diproyeksikan sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 40,50 persen, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 20,32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kenaikan pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga
Berlaku Tahun 2010-2014

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.82	18.34	19.90	20.58	20.32	33.49
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	13.09	12.79	13.70	14.01	13.77	22.29
	a. Tanaman Pangan	7.44	7.22	7.67	7.92	7.83	12.42
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
	c. Perkebunan Semusim	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.08
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.49	0.48	0.48	0.48	0.48	0.83
	e. Perkebunan Tahunan	0.83	0.80	0.85	0.84	0.82	1.38
	f. Peternakan	4.11	4.07	4.47	4.54	4.41	7.29
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	0.16	0.15	0.16	0.16	0.16	0.26
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.09	0.09	0.10	0.10	0.10	0.18
	3 Perikanan	5.64	5.46	6.10	6.47	6.45	11.01
B	Pertambangan dan Penggalian	48.04	47.89	42.20	40.17	40.50	1.83
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	46.95	46.77	41.03	39.03	39.30	-
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	-	-	-	-	-	-
	3 Pertambangan Bijih Logam	-	-	-	-	-	-
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.09	1.11	1.17	1.14	1.20	1.83
C	Industri Pengolahan	1.77	1.80	1.93	1.99	1.99	3.29

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	a. Industri Batu Bara	-	-	-	-	-	-
	b. Industri Pengilangan Migas	-	-	-	-	-	-
	2 Industri Makanan dan Minuman	0.38	0.40	0.45	0.46	0.47	0.79
	3 Pengolahan Tembakau	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.59	0.60	0.61	0.65	0.66	1.10
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	0.25	0.27	0.31	0.30	0.30	0.50
	11 Industri Logam Dasar	-	-	-	-	-	-
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	0.12	0.12	0.14	0.15	0.15	0.24
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	14 Industri Alat Angkutan	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.15
	15 Industri Furnitur	0.14	0.14	0.14	0.15	0.14	0.24
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
	1 Ketenagalistrikan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.04
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	-	-	-	-	-	-
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.11
F	Konstruksi	6.72	7.30	8.78	9.34	9.83	16.13
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.60	9.80	11.00	11.41	11.29	18.80
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	2.36	2.40	2.67	2.81	2.77	4.40
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	7.24	7.41	8.33	8.60	8.52	14.40
H	Transportasi dan Pergudangan	1.11	1.04	1.04	1.06	1.05	1.73
	1 Angkutan Rel	-	-	-	-	-	-
	2 Angkutan Darat	0.50	0.48	0.51	0.52	0.52	0.87
	3 Angkutan Laut	0.21	0.20	0.20	0.21	0.21	0.33
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	0.29	0.24	0.20	0.19	0.17	0.28

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	5 Angkutan Udara	-	-	-	-	-	-
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	0.12	0.12	0.13	0.14	0.16	0.26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.69	0.70	0.78	0.80	0.82	1.40
	1 Penyediaan Akomodasi	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
	2 Penyediaan Makan Minum	0.68	0.69	0.77	0.78	0.81	1.38
J	Informasi dan Komunikasi	3.33	3.17	3.40	3.54	3.41	5.55
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.18	1.19	1.32	1.38	1.35	2.20
	1 Jasa Perantara Keuangan	0.55	0.54	0.59	0.63	0.61	1.00
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	0.28	0.29	0.32	0.33	0.33	0.54
	3 Jasa Keuangan Lainnya	0.35	0.36	0.40	0.41	0.41	0.67
	4 Jasa Penunjang Keuangan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L	Real Estate	0.80	0.81	0.87	0.87	0.84	1.40
M,N	Jasa Perusahaan	0.18	0.18	0.19	0.19	0.19	0.31
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3.93	4.12	4.62	4.71	4.50	7.41
P	Jasa Pendidikan	2.84	2.75	3.00	3.02	2.97	4.94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.26	0.26	0.28	0.28	0.28	0.46
R,S,T,U	Jasa lainnya	0.63	0.59	0.60	0.58	0.56	0.91

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan 2016

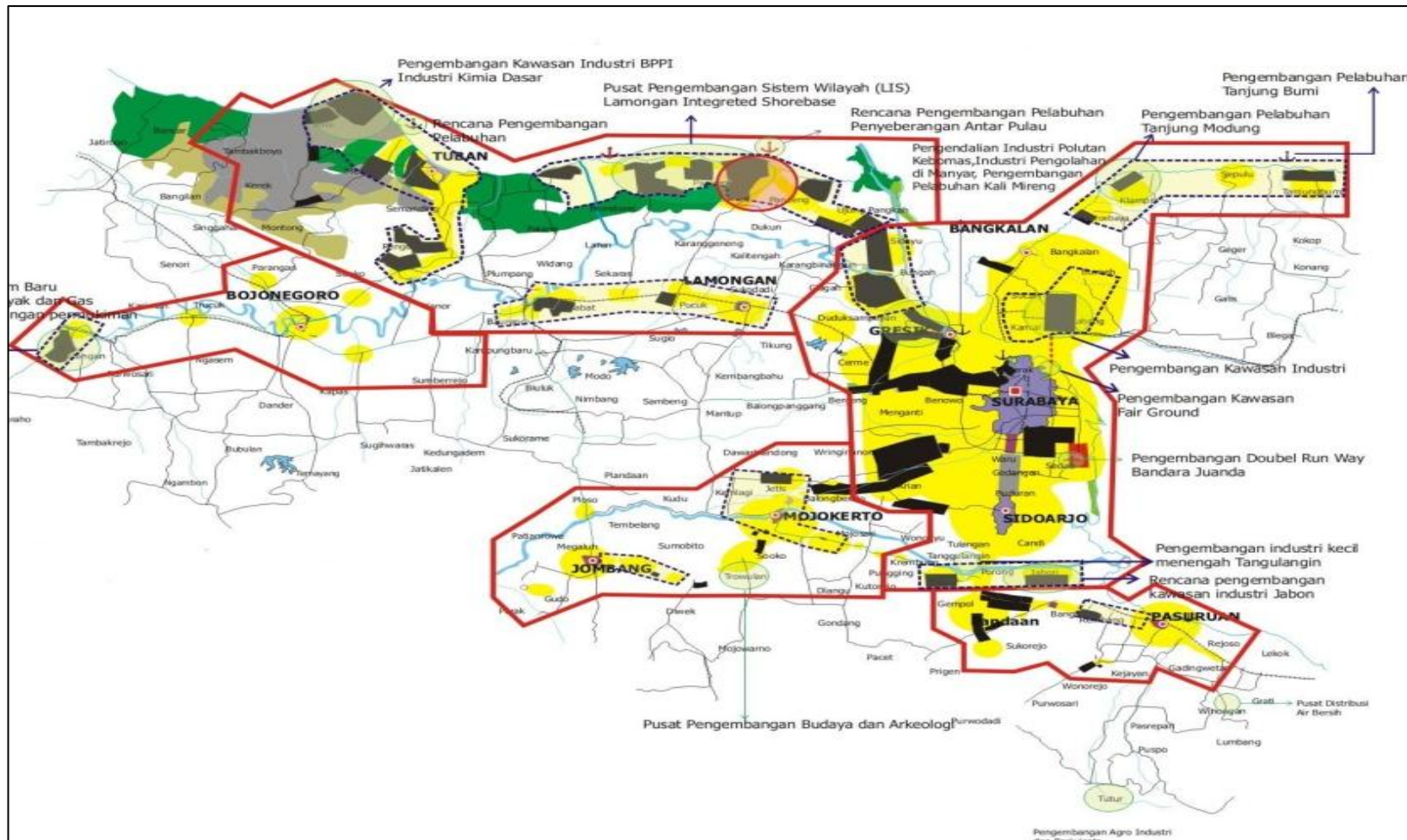
*) Angka Diperbaiki **) Angka Sangat Sementara

2. Posisi Strategis Kabupaten Bangkalan

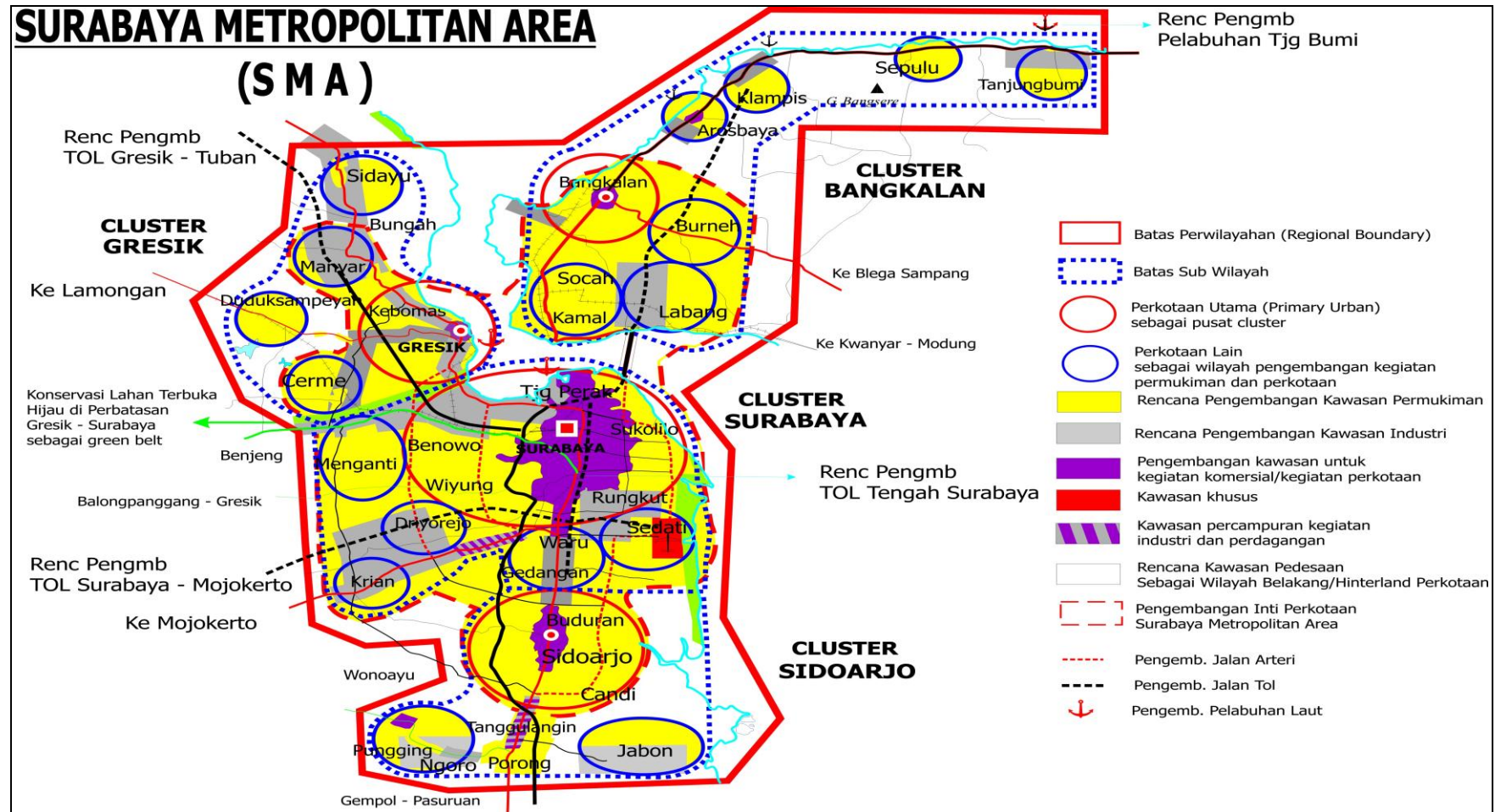
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah menetapkan Kabupaten Bangkalan dalam ruang lingkup Gerbang Kertasusila (GKS) sebagai Kawasan Strategis Nasional. Kondisi ini mengakibatkan adanya perubahan yang signifikan terhadap peranan dan struktur ruang kabupaten dalam konstelasi Lokal, regional maupun nasional. Dalam ruang lingkup regional Bangkalan akan menjadi *primary urban* atau perkotaan utama di kluster Madura dalam struktur *Surabaya Metropolitan Area* (SMA). SMA merupakan antisipasi dari perkembangan kota Surabaya sehingga kawasan sekitarnya menjadi kawasan penyangga termasuk di dalamnya Kabupaten Bangkalan yang meliputi wilayah pengembangan Kamal, Socah, Labang, Burneh, Arosbaya, Klampis, Sepulu dan Tanjung Bumi.

Sebagai daerah penyangga kota Surabaya yang mendukung sektor industri, Kabupaten Bangkalan dapat terus mengoptimalkan kinerja ekonomi wilayah yang telah berkembang. Untuk itu perlu pengembangan sarana dan prasarana infrastruktur transportasi perkotaan yaitu peningkatan fungsi terminal angkutan kota, pengembangan pelabuhan di pantai utara Bangkalan, serta mendukung pembangunan kawasan suramadu dan jalan tol yang mengaksesnya.

Gambar 2.9.
Gerbang Kerta Susila Plus



Gambar 2.10.
Surabaya Metropolitan Area



2.1.4.2. Wilayah/Infrastruktur

1. Prasarana Jalan

a. Jenis dan Fungsi Jalan

Panjang jalan Kabupaten Bangkalan sekitar 721.365 Km. Jaringan jalan di Kabupaten Bangkalan cenderung membentuk pola linier terutama untuk jalan utama. Berdasarkan fungsi jalan, maka jalan-jalan yang terdapat di Kabupaten Bangkalan termasuk ke dalam; jalan arteri, jalan kolektor dan jalan lokal.

Koridor Surabaya-Madura saat ini telah dilayani oleh Jembatan Suramadu selain layanan transportasi penyeberangan Ujung-Kamal. Jembatan Suramadu menjadi koneksi Arteri Primer Jaringan pulau Jawa dengan jaringan pulau Madura. Jembatan Suramadu juga berfungsi sebagai konektor antara jaringan jalan tol Surabaya dengan jaringan arteri primer dan jaringan jalan tol pada masa depan. Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Madura – Surabaya terletak di Kecamatan Labang. Pembangunan jembatan tersebut diharapkan mampu menjadi akses yang menunjang perkembangan di Pulau Madura secara keseluruhan. Untuk kawasan perumahan dan permukiman di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal.

b. Kondisi Jalan

Seperti yang telah dijelaskan bahwa jaringan jalan kabupaten di Kabupaten Bangkalan sebagian besar telah beraspal sepanjang 697.815 Km. Jenis prasarana jalan di Kabupaten Bangkalan berupa jalan aspal, kerikil/macadam, tanah, paving dan beton rabat. Untuk jalan aspal terdapat pada ruas – ruas jalan utama Kecamatan, sedangkan jalan tanah dan makadam masih banyak terdapat pada jalan desa dan jalan lingkungan.

Selanjutnya diperlukan perhatian dan penanganan dari pemerintah Kabupaten Bangkalan agar kondisi jalan yang baik tetap terpelihara sehingga memudahkan akses bagi warga serta memberikan keuntungan dan kemudahan bagi pengangkutan hasil–hasil produksi di wilayah Kabupaten Bangkalan menuju pasar–pasar potensial dan memberikan daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan.

2. Sarana Dan Prasarana Pendukung Transportasi

Sarana angkutan umum di Kabupaten Bangkalan dilayani oleh jenis angkutan MPU, bus dan mobil barang serta angkutan laut. Jalur atau rute angkutan umum yang ada berupa angkutan pedesaan yang menghubungkan antar kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Angkutan Bus melayani jalur antar kota di Pulau Madura–Surabaya. Sedangkan angkutan laut melayani penyeberangan Bangkalan–Surabaya, Bangkalan–Gresik dan Bangkalan–Kalimantan Data Jumlah angkutan darat di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2009–2012 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.61.
Jumlah Angkutan Darat Kabupaten Bangkalan
Tahun 2009–2013

No	Jenis Angkutan	2009	2010	2011	2012	2013
1	MPU	910	900	837	761	712
2	Bis Umum	188	190	119	173	167
3	Bis Bukan Umum	49	52	43	72	84
4	Mobil Barang Umum	705	725	730	1056	1218
5	Mobil Barang Bukan Umum	3.068	3.168	3.175	3.854	4.211

Sumber Data :Bangkalan Dalam Angka 2014

Angkutan umum merupakan jasa angkutan umum yang menghubungkan daerah–daerah yang ada di Kabupaten Bangkalan. Berikut ini rute angkutan umum di Kabupaten Bangkalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.62.
Data Jalur Angkutan Umum Kabupaten Bangkalan

No	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jenis Kendaraan
I	A. Angkutan Pedesaan		
1	DD	Terminal Kamal–Perumnas	Station Wagon
2	D1	Kamal-Bangkalan-Tanah Merah-Galis-Blega-Lomaer	Station Wagon
3	D2	Kamal-Bangkalan-Tanah Merah	Station Wagon
4	D3	Kamal-Bangkalan PP	Station Wagon
5	D4	Kamal-Bangkalan-Burneh-Nyerondung-Tragah-	Station Wagon

No	Kode Trayek	Jaringan Trayek	Jenis Kendaraan
		Kwanyar PP	
6	D5	Bangkalan-Burneh-Langkap-Labang PP	Station Wagon
7	E1	Kamal-Bangkalan-Arosbaya-Sepulu-Tanjung Bumi PP	Station Wagon
8	E2	Bangkalan-Arosbaya-Sepulu-Tanjung Bumi PP	Station Wagon
9	E3	Kamal-Bangkalan-Arosbaya-Geger-Kombangan PP	Station Wagon
10	F1	Kamal-Labang-Kwanyar-Modung-Kedundung-Blega PP	Station Wagon
11	F2	Kamal-Labang-Kwanyar-Tanah Merah PP	Station Wagon
12	F3	Kamal-Jukong-Labang-Kesek-Sukolilo-Kwanyar PP	Station Wagon
13	F4	Kamal-Labang-Kwanyar-Tragah-Nyondung-Burneh-Bangkalan PP	Station Wagon
II	B. Angkutan AKDP		
1		Kamal-Sumenep	Station Wagon
2		Kamal-Pamekasan	Station Wagon
3		Kamal-Sampang	Station Wagon
4		Kamal-Tamberu	Station Wagon

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan

2.1.4.3. Peluang Investasi

Kabupaten Bangkalan menjadi primadona baru bagi investor baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) untuk berbisnis. Pasca pembangunan Jembatan Suramadu memberikan peluang bagi Kabupaten Bangkalan untuk bersaing dengan daerah lain dalam usaha menarik pemilik modal, baik yang bergerak di bidang konstruksi, industri maupun migas. Hal ini di dasarkan pada pertimbangan biaya transportasi hasil industri menuju pelabuhan baik laut maupun udara guna memasarkan produknya.

Beberapa investor yang telah menanamkan modalnya di Kabupaten Bangkalan antara lain PT. Pelabuhan Socah, dan PT MISI (Madura Industrial

Seaport City), Wings Group, PT. Adi luhung, PT Suramadu Sukses Sejahtera, PT. Unilever, PT Ben Sentosa, PT Warako dll.

2.1.4.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset pembangunan suatu wilayah yang sangat penting dalam peningkatan kesejahteraan. Sumberdaya manusia yang tangguh, unggul, berkualitas baik fisik maupun mental akan menjadi modal bagi suatu wilayah dalam mengolah sumberdaya yang ada, memanfaatkan potensi, dan menjawab permasalahan pembangunan yang ada. Oleh karena itu, pembangunan SDM diarahkan untuk menyiapkan SDM yang terampil, inovatif, kompetitif, dan disiplin dalam rangka meningkatkan laju pembangunan. Indikator pembangunan SDM dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk.

1. Kualitas SDM

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang berpendidikan sarjana. Berikut disampaikan kualitas SDM pencari kerja di Kabupaten Bangkalan sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.63.

Pencari Kerja Terdaftar Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

No	Uraian	2008	2009	2010	2011	2012
1	Tidak Tamat SD	37	7	95	37	45
2	SD	135	17	155	73	59
3	SLTP	141	35	612	135	123
4	SLTA	601	549	2.440	1.881	2.474
5	Diploma	142	601	2.115	1.605	1.032
6	Sarjana	256	1.097	2.187	2.899	2.018

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2016

2. Tingkat Ketergantungan

Tingkat ketergantungan penduduk digunakan untuk melihat gambaran besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Penduduk muda berusia di bawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu penduduk berusia di atas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Tabel 2.64.
Angka Beban Ketergantungan

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1	Jumlah Penduduk < 15 Tahun	279,010	267,723	271,473	265,835	274,896	270,528
2	Jumlah Penduduk > 65 Tahun	55,494	53,800	57,438	63,132	61,576	64,343
3	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1+2)	334,504	321,523	328,911	328,967	336,472	334,871
4	Jumlah Penduduk 15 – 64 Tahun	572,257	590,340	590,091	608,530	601,025	619,434
5	Ratio Ketergantungan (3/4)	58.45%	54.46%	55.74%	54.06%	55.98%	54.06%

Sumber Data : Indikator Sosial Budaya Kabupaten Bangkalan 2016

2.2 Evaluasi Pencapaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2016 dan Target Tahun 2017

Tabel 2.65.
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Urusan Wajib									
Pendidikan									
Program Pendidikan Anak Usia Dini									Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	NA	-	90,28%	-	93,00%	94,00%	94,00%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	NA	-	87,81%	-	90,00%	91,00%	91,00%	
	Angka Melek Huruf	85,61%		85,83%		86,99%	87,65%	87,65%	
Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun									Dinas Pendidikan
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	110,33%	99,52%	110,22%	113,22 %	99,78%	99,95%	99,95%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	107,86%	107,86	107,66%	108,63 %	98,30%	98,50%	98,50%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,20%	0,20%	0,20%		0,10%	0,09%	0,09%	
	Angka Lulusan (AL) SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	84,52%	50%	87,82%		80,00%	85,00%	85,00%	
	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	90,02%	87,02%	91,12%	93,12 %	91,00%	94,00%	94,00%	
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	82,64%	82,64%	88,42%	88,42 %	81,00%	83,00%	83,00%	
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0,13%	0,13%	0,13%		0,09%	0,08%	0,08%	
	Angka Lulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	100%	100%	100%	100%	99,96%	99,96%	99,96%	
	Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	71,50%	71,50%	80,39%		74,00%	75,00%	75,00%	
Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	85,61%		85,83%		86,99%	87,65%	87,65%	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV								Dinas Pendidikan
	- SD/MI	86,27%	86,27%	88,64%	88,64 %	96,00%	100%	100%	
	- SMP/MTs	88,81%	88,81%	90,30%	90,30	95,00%	100%	100%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
					%				
	- SMA/K/MA	94,70%	94,70%	95,83%	88,64 %	97,50%	100%	100%	
	Persentase Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk jenjang Pendidikan :								
	- SD/MI	51,88%	51,88%	52,32%		82,00%	90,00%	90,00%	
	- SMP/MTs	53,00%	53,00%	53,64%		78,00%	90,00%	90,00%	
	- SMA/K/MA	46,70%	46,70%	47,60%		76,00%	90,00%	90,00%	
	Rasio guru/murid SD/MI	01.19.00 guru : murid	01.19.00 guru : murid	01.18.00 guru : murid		01.20.00 guru : murid	01.20.00 guru : murid	01.20.00 guru : murid	
	Rasio guru/murid SMP/MTs	01.15.00 guru : murid	01.15.00 guru : murid	01.15.00 guru : murid		01.18.00 guru : murid	01.20.00 guru : murid	01.20.00 guru : murid	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	5,5		5,45	5,54 tahun	5,41	5,57	5,57	Dinas Pendidikan
Kesehatan									
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Angka Kematian Bayi /AKB (per 1000KH)	51,38	8,26	50,31	9,38	49,26	48,17	48,17	Dinas Kesehatan
	Persentase cakupan K4	92,3		78,93		97	97	97	
	Persentase cakupan Linakes	99,8		89,66		97,5	98	98	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Persentase cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	67,7		62,06		82,5	83	83	
	Persentase Cakupan ibu nifas	93,6		89,32		97,8	98	98	
	Persentase Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	69,7		89,9		77,5	78	78	
	Persentase Cakupan pelayanan anak balita	77,9		54,09		83,4	85	85	
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Angka Kematian Ibu melahirkan /AKI (per 100000 KH)	x`	77,85	30,82	118,93	30,39	24,98	24,98	Dinas Kesehatan
	Peningkatan jumlah desa siaga aktif	98,6		93,2		100	100	100	
	Peningkatan jumlah Posyandu Puri	44,8		41		36,6	37,5	37,5	
	Ratio Posyandu per satuan balita	17,4		9,8		15	15	15	
	Peningkatan promosi kesehatan	100		100		100	100	100	
	Cakupan rumah	48,8		71,3		75	75	75	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	tangga ber PHBS								
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase turunnya angka kesakitan diare	17,8		12,4		10	10	10	Dinas Kesehatan
	Jumlah AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun	3		3		2,5/100.000 penduduk	2,5/100.000 penduduk	2,5/100.000 penduduk	
	Angka Penemuan penderita baru TB BTA (+)	74,3		59,7		70	70	70	
	Prevalensi kusta yang ditangani	3,3		3,21		2	1	1	
	Jumlah Penderita DBD ditangani	100		100		100	100	100	
	Jumlah Penderita HIV ditangani	100		100		100	100	100	
	Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	29,1		93,7		70	70	70	
	Jumlah Penderita diare yang ditangani	178		125,3		100	100	100	
	Cakupan desa/kelurahan UCI	65		50,2		100	100	100	
	Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah	35 kasus		44 kasus		100	100	100	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Dengan Imunisasi (PD3I)								
	Penanganan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100		100		100	100	100	
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan (%) balita gizi buruk yang mendapat penanganan / perawatan	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Kesehatan
	Prevalensi kekurangan energy protein (KEP)	0,9		0,9		0,6	0,6	0,6	
	Cakupan balita mendapat vitamin A	78,8		70		90	90	90	
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan	100		100		100	100	100	
	Prevalensi Bumil KEK	100		97,8		100	100	100	
	Cakupan ASI	60,1		28,3		50	55	55	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Eksklusif								
	Prevalensi Balita Stunting	0,7		0,8		32	32	32	
	Cakupan Rumah Tangga dengan Garam Beryodium	86,1		93		100	100	100	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Puskesmas yang memiliki sumber daya kesehatan sesuai standar	81,8		86,4		100	100	100	Dinas Kesehatan
	Jumlah rumah tangga sehat	48,8		52,4		85	90	90	
	Jumlah sekolah sehat	81,4		67,1		66	66	66	
	Jumlah pondok pesantren sehat	21,9		33,3		27,2	30,8	30,8	
	Persentase ketersediaan alkes pada puskesmas sesuai standar	60		60		100	100	100	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Prosentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	27,3		36,4		100	100	100	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi pada fasilitas kesehatan	100		100			100	100	Dinas Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan tata kelola obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	80		80		100	100	100	Dinas Kesehatan
Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sertifikasi bahan olahan pangan yang dikeluarkan	100		100		100	100	100	Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang siap terakreditasi	2		3		15	15	15	Dinas Kesehatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	3,6		106,2		72	72	72	Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	Persentase Cakupan pelayanan Lansia	60,56		22,09		75	75	75	Dinas Kesehatan
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Persentase ketersediaan akses	60%		60,00%		100%	100%	100%	Dinas Kesehatan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	pada puskesmas sesuai standar								
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Peningkatan dan optimalisasi kinerja satuan unit kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	76,80%		76,15%		80%	83%	85%	
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan RS	99,92%		95,39%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu
Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tingkat (%) ketersediaan fasilitas kesehatan	0%		95,85%		95,85%	95,85%	100,00%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	akibat konsumsi rokok dan penyakit lainnya								
Program Upaya Kesehatan masyarakat	Cakupan upaya kesehatan masyarakat	96,27%		99,51%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tingkat ketersediaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	93,11%		100%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	cakupan (%) pengembangan lingkungan sehat	50%		79,99%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	akreditasi rumah sakit berdasarkan KARS	akreditasi 5 yan		akreditasi 5 yan		Paripurna	Paripurna	Paripurna	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh
Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan (%) pendampingan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	100%		100%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit denga BLUD	104,09%		82,78%		100%	100%	100%	RSUD Syarifah Ambami Rato Ebuh
	Bed Occupancy Rate (BOR)	74,28%	75,80%	61,41%		69%	70%	71%	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Respon Time IGD	≥ 5 Menit sejak pasien datang		≥ 5 Menit sejak pasien datang	-	≤ 5 Menit sejak pasien datang	< 5 Menit sejak pasien datang	≤ 4 Menit sejak pasien datang	
	Respon Time Farmasi								
	a. obat jadi	30 Menit		30 Menit		≤ 30 Menit	≤ 20 Menit	≤ 10 Menit	
	b. obat racik	60 Menit		60 Menit		≤ 60 Menit	≤ 40 Menit	≤ 30 Menit	
	Cosr Recovery Ratio (CRR)	99,09%		104,11%		110,00%	120,00%	150%	
Pekerjaan Umum									
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Persen panjang jalan dan jembatan yang terpenuhi	76,32%		84,21%		84,71%	85,21%	85,21%	
Program pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan perdesaaan/perkotaan									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan berkondisi baik	81,00%	86,75%	82,20%	70,95 %	83,60%	85,00%	85,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase/gorong-gorong	Persentase jembatan berkondisi baik	96,40%	97,22%	97,20%		97,50%	98,20%	98,20%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan turap/talud/brojong									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	% jaringan irigasi dalam kondisi baik	50,00%	94,14%	52,78%	51,30 %	55,70%	58,70%	58,70%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Persentase ketersediaan terhadap kebutuhan air baku	61,00%		63,00%	61,55 %	64,00%	65,00%	65,00%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Penataan Ruang									
Program perencanaan tata ruang									Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Urusan Perumahan									
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik	35%	33%	40%	64,58 %	45%	50%	50%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pengembangan Perumahan	Rumah tangga pengguna air bersih	45%	46%	50%	46,19 %	55%	60%	60%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	Cakupan rumah layak huni	45%	47,80%	50%	44,70 %	55%	50%	50%	
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	Prosentase Penanganan bahaya kebakaran	48%	80%	48%		48%	-	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Penataan Lingkungan	Prosentase jalan lingkungan desa/kota dalam kondisi baik		40%			50%	52%	52%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pemberdayaan Masyarakat									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program pembangunan infrastruktur perdesaaan/perkotaan									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Persentase balai desa sesuai standard					50%	52%	52%	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Pengawasan dan Pengendalian Pertambangan dan Energi									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program Penguasaan, Pengembangan, Migas, Batubara dan Energi Lainnya serta Aplikasi Teknologi Energi									Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Perencanaan Pembangunan									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin			100%					Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%							Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%		100%	100%	100%	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Pengembangan Data/Informasi									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Sosial Budaya									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program penelitian, pengembangan dan IPTEK									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar									Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Balitbangda									
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	-		-		100%	100%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	-		-		100%	100%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	-		-		100%	100%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Program Penelitian, Pengembangan dan IPTEK	Prosentase rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang sosial dan pemerintahan yang ditindaklanjuti	-		-		NA	100%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Prosentase rekomendasi dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang ditindaklanjuti	-		-		NA	100%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
	Prosentase rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	-		-		NA	100%	100%	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Perhubungan									
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Prosentase angkutan umum yang layak fungsi	35%	613	45%	30%	72%	74%	74%	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor									Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Presentase rambu yang terpasang dan layak fungsi	54,32%	92	63%	74%	80%	80%	60%	Dinas Perhubungan
Program Perencanaan Transportasi	Prosentase rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	50%		135%		105%	50%	50%	Dinas Perhubungan
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi									Dinas Perhubungan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan									
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan terminal dan parkir	76,97%		79,38%		81,79%	84,20%	84,20%	Dinas Perhubungan
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah									Dinas Perhubungan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									Dinas Perhubungan
Lingkungan Hidup									
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	74%	74,50%	76%		78%	80%	80%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	75%		80%		85%	95%	95%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Prosentase perlindungan dan konservasi SDA	25,00%		31,00%		37,00%	45,00%	45,00%	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan	10%	12,07%	12%	12%	16%	18%	18%	Dinas Lingkungan Hidup

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data lingkungan dan akses informasi SDA dan LH	25%		31%		37%	45%	45%	Dinas Lingkungan Hidup
Kependudukan dan Catatan Sipil									
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber-E KTP	50,62%	3,25%	66,19%	66,19 %	80%	81%	81%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	Persentase bayi ber-akte kelahiran	17,62%	17,62%	18,58%	18,58 %	49%	54%	54%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	% keluarga yang memiliki KSK	97,46%	12,39%	96,98%	23,39 %	56%	60%	60%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	% Pemeliharaan SIAK								
Pemberdayaan Perempuan dan Anak									
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Organisasi/Lembaga wanita yang dibina	29,03%	10,71%	10,71%		34%	35%	35%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender dalam pembangunan	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	1,41%	1,41%	3,43%		2%	2,5%	2,5%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan	Angka Partisipasi angkatan kerja perempuan	46,50%	46,50%	47,70%	47,70 %	48%	49%	49%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100,00%	100%		100%	100%	100%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pernikahan Dini	NA		15%		12%	11%	11%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera									
Program Keluarga Berencana	Prosentase Pencapaian peserta KB Aktif thdp. PUS	74,40%	74,40%	71,87%		63%	63,5%	63,5%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pelayanan kontrasepsi	Rasio Aksetor KB MKJP	NA	0,32%	NA		20%	20,5%	21%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri	Cakupan kesertaan ber- KB yang mandiri	NA		17%		18%	19%	19%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	% PUS yang diperiksa	NA		NA		2,05%	2,06%	2,07%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	% klp. PIK R-M/RM yang dibina	NA		95%		95,5%	96%	96%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS	Cakupan Pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba dan PMS	NA		94%		95%	96%	96%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	Rasio Kader klp.BKB Yg terlatih	NA		97%		97,5%	98%	98%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga	Rasio Kader klp. BKB,BKR,BKL yg terlatih	NA		94%		94,5%	95%	95%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	Rasio Kader klp. BKB,BKR,BKL yg terlatih	NA		94%		94,5%	95%	95%	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Sosial									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	Prosentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	8,4		8,3		8	8	8	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	30		0	2,41%	30	30	30	Dinas Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan kegiatan tanggap bencana alam dan bencana sosial	1		2		2	2	2	Dinas Sosial
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	Jumlah panti asuhan/ yayasan yang mendapatkan	0		0		2	2	2	Dinas Sosial
Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar mendapatkan pelayanan sosial	20		0		20	20	20	Dinas Sosial
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah paca mendapatkan pelayanan sosial	20		0		20	20	20	Dinas Sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1		1		1	1	1	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	PSKS yang terbina	18		18		18	18	18	Dinas Sosial
Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan kesos	1 keg		2 keg		2 keg	2 keg	2 keg	Dinas Sosial
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial									
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah									
Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif	Jumlah UMKM	303 UMKM	303 UMKM	13.211 UMKM	19,97 %	500 UM	500 UM	500 UM	Dinas Koperasi UMKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah LKM non BPR/KSP	0	0	0		5 LKM/KSP	5 LKM/KSP	5 LKM/KSP	Dinas Koperasi UMKM
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM	0	0	0		0	0	0	Dinas Koperasi UMKM
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	jumlah koperasi aktif	5 Kop	0,75%	8 kop	683	2 Kop	2 Kop	2 Kop	Dinas Koperasi UMKM
	Jumlah modal koperasi dan UMKM	Rp. 13.306.653.000	205.890.697.000	Rp. 49.476.663.000		Rp. 146.850.000	Rp. 146.850.000	Rp. 146.850.000	
	Volume Usaha KUMKM	Rp. 17.114.172.000	91.893.291	Rp. 12.027.795.000		Rp. 5.219.400.000	Rp. 5.219.400.000	Rp. 5.219.400.000	
	Jumlah SHU/Laba	Rp. 531.651.000		Rp. 1.732.569.000		Rp. 344.050.000	Rp. 344.050.000	Rp. 344.050.000	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									Dinas Koperasi UMKM
Penanaman Modal									
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase sistem kemitraan usaha besar dan kecil menengah yang terealisasi	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase sarana optimalisasi promosi potensi investasi dan produk unggulan di Kabupaten Bangkalan	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Perijinan	Persentase jumlah penerbitan ijin tepat waktu	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah / lembaga lainnya	Persentase realisasi kerjasama antar daerah (yang direncanakan)	100%		100%		100%	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		-		-		-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program peningkatan dan pengembangan PAD		-		-		-	-	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kebudayaan									
Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Daerah	2	8	1		2	2	2	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	NA	2	6		8	8	8	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengelolaan Keragaman Budaya									Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pariwisata									
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi Wisata	14		14		19	19	19	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah keikutsertaan festival seni budaya di tingkat regional dan nasional	1		2		5	5	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Program Pengembangan Kemitraan									Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pemuda dan Olah Raga									
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah peserta bimbingan/sosialisasi keimanan dan ketaqwaan	NA		NA		100 orang	150 orang	150 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Jumlah organisasi atau kelompok pemuda	NA		NA		1 organisasi	1 organisasi	1 organisasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah kelompok usaha pemuda	NA		NA		0	100 orang	100 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah peserta talkshow dan sosialisasi	NA		NA		1000 orang	1000 orang	1000 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	NA		NA	1 Cabang	3 organisasi	6 organisasi	7 organisasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah masyarakat Bangkalan yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi	NA		NA		150 orang	500 orang	500 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga
	Jumlah penduduk yang melakukan olahraga	NA		NA		250 orang	270 orang	250 orang	Dinas Pemuda dan Olahraga

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	jumlah sarana olahraga	NA		NA		1 lokasi	18 paket	2 lokasi	Dinas Pemuda dan Olahraga
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah pol PP per 10.000 penduduk	NA		NA		4	4	4	Satuan Polisi Pamong Praja
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Jumlah Linmas per RT/dusun	NA		NA		1	1	1	Satuan Polisi Pamong Praja
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		NA		NA		100%	100%	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran									Satuan Polisi Pamong Praja
Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan	Persentase kecamatan dengan Ormas dan LSM yang dibina	28%		28%		100%	100%	100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	Jumlah kader yang terlatih dalam kesiapsiagaan	100		100		100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah dokumen peta rawan bencana	1		1		1	1	1	
	Jumlah dokumen rencana kontijensi bencana	0		1		1	1	1	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Kedaruratan dan Logistik penanggulangan bencana	% bencana yang tertangani sesuai SPM	80		80		100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	-		-		1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki akibat bencana	-		11			5	5	
	Jumlah daerah yang dapat pembinaan sosial ekonomi akibat bencana	-		5		6	3	3	
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian									
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Umum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Umum
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Umum

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	disiplin								
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Umum
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Umum
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase Pendistribusian surat yang tepat sasaran	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Umum
Program Penataan Daerah Otonomi Baru									Bagian Umum
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan									Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah									Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial	Prosentase kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang terlaksana	90%	90%	90%		100%	100%	100%	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program Pengembangan Wawasan Keagamaan	Prosentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan keagamaan	90%	90%	90%		100%	100%	100%	Bagian administrasi kesejahteraan rakyat
Program peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Admin dan Otoda
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Admin dan Otoda
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Admin dan Otoda
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Admin dan Otoda
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah									Bagian Admin dan Otoda
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	B		Dalam Proses		A	A	A	Bagian Admin dan Otoda
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Adminstrasi Perekonomian
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Adminstrasi Perekonomian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi Perekonomian
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi Perekonomian
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase hasil monev (pengaduan kepada masyarakat) yang ditindaklanjuti	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi Perekonomian
Program Penataan Daerah Otonomi Baru									Bagian Administrasi Perekonomian
Program Peningkatan Perekonomian Daerah									Bagian Administrasi Perekonomian

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Hukum
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur									
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Hukum
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Hukum
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Produk Hukum daerah yang disahkan dan terselesaikannya penanganan Kasus	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Hukum

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah									Bagian Hukum
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase OPD yang telah menyusun dokumen LAKIP sesuai standar	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan ukuran	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase OPD yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									Bagian Organisasi
Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada OPD	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Organisasi
Program pembangunan dan pengembangan aparatur									Bagian organisasi
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Keuangan dan Perlengkapan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Keuanagn dan Perlengkapan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Keuanagn dan Perlengkapan
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Prosentase terlaksananya pengelola keuangan dan perlengkapan administrasi sekretariat daerah	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Keuanagn dan Perlengkapan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase Tingkat Kelulusan Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa	--		--		100%	100%	100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	--		--		100%	100%	100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	--		--		100%	100%	100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	--		--		100%	100%	100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	--		--		100%	100%	100%	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa
Program penataan peraturan perundangan									Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa
Program pembinaan dan layanan aparatur									Bagian Layanan Pengadaan Barang dan jasa
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	meningkat skor SKPnya								
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol
Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase agenda protokoler terencana yang terfasilitasi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Humas dan Protokol
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi pembangunan
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi pembangunan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi pembangunan
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi pembangunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan									Bagian Administrasi pembangunan
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase ketepatan waktu penyusunan dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah	100%		100%		100%	100%	100%	Bagian Administrasi pembangunan
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		100%		100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	--		--		--	--	--	Sekretariat DPRD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga DPRD	Jumlah Perda yang dihasilkan	8 Perda		7 Perda		17 Perda	17 Perda	17 Perda	Sekretariat DPRD
	Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan	987 Risalah Rapat		1040 Risalah Rapat		1081 Risalah Rapat		1113 Risalah Rapat	
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah.									Sekretariat DPRD
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin								Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	-		100%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81		81		81	81	81	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Prosentase realisasi Pendapatan Daerah	110,22%		97,46%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Prosentase realisasi Pajak dan Retribusi Daerah kelompok Bumi dan Bangunan	131,65%		126,12%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
		102,26%		110,47%		100%	100%	100%	Badan Pendapatan Daerah
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	BPKAD
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang			100%		100%	100%	100%	BPKAD

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
	disiplin								
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan (daerah)	Presentase OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	1		100%		100%	100%	100%	BPKAD
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	BPKAD
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	WDP		WDP	-(*)	WTP	WTP	WTP	BPKAD
Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan Aset Daerah	Presentase bidang tanah bersertifikat	26%		30%		37%	44%	50%	BPKAD
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan/Kota									BPKAD
									Inspektorat
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	75%		76%		80%	90%	90%	Inspektorat
Program peningkatan disiplin aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	--		100%		100%	100%	100%	Inspektorat
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Inspektorat

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Prosentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP B	1,6		9,8		14	20	20	Inspektorat
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.	Prosentase rekomendasi yang diselesaikan atas hasil pengawasan internal	100		75,3		90	90	90	Inspektorat
	Prosentase rekomendasi yang diselesaikan atas hasil pengawasan eksternal	73,9		55,8		75	75	75	
Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase JFA yang memiliki kompetensi sesuai jenjang	100		83,3		80	80	80	Inspektorat
	Prosentase JFP2UPD yang memiliki kompetensi sesuai jenjang	66,7		77,8		80	80	80	
Peningkatan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi									Inspektorat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	96,67%		96,67%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan	95,27%		99,69%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan								Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Presentase jabatan struktural yang terisi	93,88%		93,88%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
	presentase ketersediaan aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	18,60%		18,60%		20%	20%	20%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
	presentase meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat	79,12%		79,50%		80%	81%	81%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
	presentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan disiplin aparatur	presentase pelanggaran disiplin yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumberdaya aparatur
Ketahanan Pangan									
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase Pola Pangan Harapan (PPH)	88		89,5	83,20 %	91	92,5	92,5	Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan	Jumlah rumah tangga yang belum memiliki industri					10	10	10	Dinas Ketahanan Pangan
Program Pemberdayaan Penyuluhan									Dinas Ketahanan Pangan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi									Dinas Ketahanan Pangan
Program pembinaan dan penguatan kelembagaan poktan/ gapoktan/ asosiasi petani tembakau									Dinas Ketahanan Pangan
Program peningkatan kesejahteraan petani									Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan panganekaragaman konsumsi dan peningkatan keamanan pangan	Jumlah rumah tangga yang belum memenuhi pangan B2SA	--		--		140	140	140	Dinas Ketahanan Pangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan	Jumlah desa mandiri pangan	--		--		-	10	10	Dinas Ketahanan Pangan
Pengembangan system distribusi dan stabilitas harga pangan	Jumlah kecamatan yg mendapatkan pelayanan informasi harga pangan/ beras	--		--		-	6	6	Dinas Ketahanan Pangan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan yang dibina	281 LPM		281 LPM	8,80%	281 orang	281 orang	281 orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina	1%	1%	3%		31%	86%	86%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Persentase aparat pemerintahan yang dibina	42%	36%	74%		78,60%	91%	91%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi							86%	86%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa							53,0%	53,0%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Pembinaan dan Fasilitasi pengelolaan keuangan desa									Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Komunikasi dan Informasi									
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Prosentase kebijakan yang harus disebarluaskan	50		60		60	70	90	Dinas Komunikasi dan informatika
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase ketersediaan data center	-		-			70	90	Dinas Komunikasi dan informatika
Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah									Dinas Komunikasi dan informatika
Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	NA	NA		NA		-	-	-	Dinas Komunikasi dan informatika
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Prosentase penggunaan domain resmi pemerintah	20	22	20		20	70	90	Dinas Komunikasi dan informatika

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program kerjasama informasi dan media massa	prosentase jumlah penduduk yang menerima paparan kebijakan	40		50		50	70	90	Dinas Komunikasi dan informatika
Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Prosentase pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi	30		40		40	70	90	Dinas Komunikasi dan informatika
Program keamanan informasi dan persandian.									Dinas Komunikasi dan informatika
Statistik									
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah.	Persentase ketersediaan data center	-		-		NA	70	90	Dinas Komunikasi dan informatika
Kearsipan									
Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola	9.522 arsip	9.522 arsip	11.115 arsip		12.000 arsip	13.000 arsip	13.000 arsip	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	% OPD yang mengelola kearsipannya sesuai dengan ketentuan	55		77		95	100	100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program peningkatan kualitas pelayanan informasi									Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Perpustakaan									
Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	45.423 org		45.945 org		46.300 org	47.000 org	47.000 org	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	Indeks gemar membaca					30	40	40	
	Jumlah perpustakaan desa / kecamatan yang terbentuk					10 perpustakaan	20 perpustakaan	20 perpustakaan	
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi									
Urusan Pilihan									
Pertanian (tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan)									
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang dibina	25	25	25		50	50	50	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Jumlah peningkatan produktivitas padi dan jagung (kw/ha)								Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	Padi	61,82	61,82	60,56		58,49	59,05	59,05	
	Jagung	22,52	22,52	24,44		27,4	27,8	27,8	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Jumlah unit usaha pengolahan yang dibina (unit usaha)	4		4		4	4	4	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian	Cakupan Luas lahan yang terigasi teknis	8.040 Ha	8.104 Ha	8.060 Ha		8.080 Ha	9.000 Ha	9.000 Ha	
Program peningkatan penerapan teknologi pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan	40 Unit		40 Unit		40 Unit	40 Unit	40 Unit	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	jumlah gapoktan yang dibina	--		--		10	10	10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah jaringan irigasi yang diadakan	--		--		33 unit	15 unit	15 unit	
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Jumlah peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (kg/ha)	--		--					Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	- Tebu	--		--		72.473	79.720	79.720	
	- Kelapa	--		--		890,58	935,11	935,11	
	- Jambu Mente	--		--		2.505	2.630	2.630	
	- Cabe Jamu	--		--		748,67	786,1	786,1	
	- Pociok	--		--		2.099,76	2.204,75	2.204,75	
Peternakan									
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Peternakan
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Peternakan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Peternakan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%		100%		100%	100%	100%	Dinas Peternakan
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan								Dinas Peternakan
		Sapi :		Sapi :		Sapi :	Sapi :	Sapi :	
	Sapi	187,62 kg/ekor	187,62 kg/ekor	169 kg/ekor		164 kg/ekor	164,5 kg/ekor	164,5 kg/ekor	
	Kambing	16,5 kg/ekor	17 kg/ekor	15 kg/ekor		15 kg/ekor	15 kg/ekor	15 kg/ekor	
	ayam	1,2 kg/ekor	1,2 kg/ekor	1,1 kg/ekor		1,1 kg/ekor	1,1 kg/ekor	1,1 kg/ekor	
	telur	15,60 kg/ekor	13 kg/ekor	12,98 kg/ekor		13,68 kg/ekor	13,68 kg/ekor	13,68 kg/ekor	
	susu	1.742 lt/ek/th	1.742 lt/ek/th	1.790,3 lt/ek/th		1.744 lt/ek/th	1.744,5 lt/ek/th	1.744,5 lt/ek/th	
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Jumlah hewan sasaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan kesehatan hewan yang ditangani	Unggas= 400 ekor		Unggas= 35.000 ekor		Unggas= 11.890ekor	Unggas= 11.000 ekor	Unggas= 11.000 ekor	Dinas Peternakan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
		Sapi, Kambing, dll= 950 ekor		Sapi, Kambing, dll= 780 ekor		Sapi, Kambing, dll= 296 ekor	Sapi, Kambing, dll= 325 ekor	Sapi, Kambing, dll= 325 ekor	
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah produksi hasil ternak yang terpasarkan	1.574.595 ekor		1.610.094 ekor		1.500.000 ekor	1.500.000 ekor	1.500.000 ekor	Dinas Peternakan
Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Jumlah Teknologi yang Dimanfaatkan	4		2		2	5	5	Dinas Peternakan
Program peningkatan SDM petani									
Perikanan									
Program pengembangan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	20,94%	3.777,50	19,70%		4,00%	4,99%	4,99%	Dinas Perikanan
Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar									
Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya									
Program pengembangan perikanan tangkap	Persentase peningkatan Produksi Perikanan tangkap	0,59%	25.115,25	2,30%		1,00%	0,99%	0,99%	Dinas Perikanan
Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan									Dinas Perikanan
Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut									Dinas Perikanan
Program Peningkatan Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut									Dinas Perikanan
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Ppresentase peningkatan kelompok bidang perikanan	28,65%	21,20%	1,36%		17,31%	19,23%	19,23%	Dinas Perikanan
Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir									Dinas Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan									Dinas Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan ekosistem pesisir dan laut									Dinas Perikanan
Program peningkatan sarana dan prasarana pengolahan pemasaran hasil perikanan									Dinas Perikanan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan perikanan							--	--	Dinas Perikanan
Perdagangan									
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	frekwensi pengawasan barang kadaluarsa	4 Kali	3 Kali			4 Kali	4 Kali	4 Kali	Dinas Perdagangan

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	frekwensi operasi pasar	1 Kali	1 Kali	1 Kali		1	1	1	Dinas Perdagangan
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	80 Org	0	60 Org		70 Org	70 Orang	70 Orang	Dinas Perdagangan
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah promosi (pameran)	1 Kali	0	1 Kali		1	1	1	Dinas Perdagangan
	Peningkatan dan pengembangan ekspor					98%	98%	98%	
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	cakupan pasar (fasilitas perdagangan) yang di perbaiki	10,34%		37,93%		3,45%	10,34%	10,34%	Dinas Perdagangan
	Prosentase perdagangan yang disiplin aturan					12,35%	12,35%	12,35%	
	Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pasar	97,51%		98,47%		100,00%	100,00%	100,00%	
Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah									Dinas Perdagangan
Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal									Dinas Perdagangan
Program Sosialisasi Ketentuan Bidang Cukai									Dinas Perdagangan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarna Perdagangan									Dinas Perdagangan
Perindustrian									

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Prosentase Peningkatan atau pertumbuhan jumlah IKM dan Industri kreatif	2,31	4,50%	2,67	2,67%	2,8	2,91	3,01	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah Pembinaan Pengrajin	1		0		0	10	10	
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah									
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi									
Program Penataan Struktur Industri									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai									Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Ketenagakerjaan									
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Naker yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi dan produktivitas Tenaga Kerja	80		80		80	96	96	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Tahun 2015 (N-2)		Tahun 2016 (N-1)		Target Program RKPD 2017 (Tahun Berjalan)	Target Program RKPD 2018	Target Kinerja pada akhir periode RPJMD (Thn 2018)	OPD Penanggung Jawab
		Target RKPD	Realisasi Capaian RKPD	Target	Realisasi Capaian RKPD	Target	Target	Target	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Prosentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5		5	5%	5	5	5	
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja / Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	1835		1740	5428 Orang	1720	1710	1710	
Transmigrasi									
Program Transmigrasi Lokal									

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Potensi ekonomi Kabupaten Bangkalan terutama bertumpu pada 3 (tiga) sektor utama yaitu sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta jasa-jasa. Potensi yang sangat besar tersebut memerlukan upaya-upaya sedemikian rupa sehingga dapat menggerakkan roda perekonomian dan pertumbuhan ekonomi rakyat. Upaya yang dilakukan sangat dipengaruhi baik oleh faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal terdiri dari kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang ekonomi, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya kebijakan pengembangan ekonomi wilayah Pulau dan Kepulauan Madura, perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Timur umumnya, serta dinamika hubungan perdagangan internasional. Sebagai contoh mulai berlakunya perjanjian Asean Economic Community (AEC) pada tahun 2015. Tujuan dari AEC adalah terciptanya satu pasar asean (*single ASEAN Market*), dimana beberapa hal yang diatur untuk memudahkan perpindahan barang, investasi, modal dan tenaga kerja ahli lintas ASEAN. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah juga sangat dipengaruhi kondisi non ekonomi berupa situasi sosial politik yang kondusif dan stabil. Sedangkan faktor internal terdiri dari serangkaian upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mendukung dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui kebijakan fiskal atau APBD, penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, industri pengolahan, pariwisata dan perdagangan, serta penyediaan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan pasar-pasar.

a. Permasalahan Pembangunan

Adapun permasalahan pembangunan secara umum yang terjadi di Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Utamanya Pendidikan Dan Kesehatan

Pembangunan pendidikan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu, serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Sampai saat ini masih dirasakan rendahnya tingkat pendidikan penduduk dan rendahnya kualitas pelayanan pendidikan. Adapun permasalahan didalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bangkalan adalah:

- 1) Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan seperti ruang kelas dan gedung sekolah yang rusak;
- 2) Masih adanya anak putus sekolah;

- 3) Belum memadainya kualitas dan kuantitas ketersediaan tenaga pendidik;
- 4) Biaya pendidikan cenderung masih tinggi dirasakan oleh masyarakat;
- 5) Relevansi pendidikan dengan dunia kerja masih rendah.

Sedangkan permasalahan pembangunan Kesehatan di Kabupaten Bangkalan adalah :

- 1) Tingginya angkanya kematian ibu dan anak;
- 2) Masih ditemukannya balita status gizi buruk;
- 3) Belum optimalnya pemerataan sarana dan prasarana kesehatan;
- 4) Masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan;
- 5) Pelayanan kesehatan yang terjangkau dan bermutu untuk masyarakat miskin;
- 6) Upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS.

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi Yang Relatif Lambat

Dari tahun ke tahun sektor pertanian masih mendominasi PDRB Kabupaten Bangkalan. Struktur ekonomi agraris yang menjadi sektor ekonomi Bangkalan belum mampu mengangkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sehingga masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur.

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sejak Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2016 secara pelan tapi pasti mengalami penurunan, disisi lain sektor Perdagangan, restoran dan Hotel secara pelan dan pasti meningkat cukup signifikan. Ini menandakan adanya perubahan perilaku bagi masyarakat Bangkalan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat pedagang dan industrialis dan ini perlu direspon oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk melakukan tindak pelatihan dan pendidikan secara optimal bagi masyarakat, seiring dengan pengembangan kawasan Suromadu, sehingga masyarakat Bangkalan kedepannya bukan hanya sebagai penonton tapi secara langsung sebagai pelaku yang akan ikut menentukan arah pengembangan industri dan perdagangan di Kabupaten Bangkalan.

3. Angka Kemiskinan Relatif Cukup Tinggi Dan Masih Terbatasnya Perluasan Dan Penyediaan Lapangan Kerja

Berdasarkan data dari Tim Nasional Percepatan Pengentasan Kemiskinan (TNP2K), jumlah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Kabupaten Bangkalan sebanyak 65.532 RTSM atau 403.251 jiwa. Jumlah ini setara dengan 44% penduduk Bangkalan berada di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan relatif cukup tinggi ini disebabkan beberapa hal antara lain:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar yang terjangkau dan bermutu bagi keluarga miskin belum optimal;
- 2) Masih rendahnya kemampuan dan ketrampilan keluarga miskin;
- 3) Aksesibilitas keluarga miskin dalam rangka usaha skala mikro masih rendah;
- 4) Belum optimalnya pemberdayaan keluarga miskin.

Beberapa sektor yang perlu diperhatikan dalam penanganan kemiskinan di Kabupaten Bangkalan adalah :

- 1) Pengembangan Sektor Koperasi dan UKM, melalui perkuatan modal koperasi, volume usaha koperasi, peningkatan jumlah koperasi utamanya sebagai koperasi sehat dan peningkatan jumlah anggota koperasi;
- 2) Menumbuh kembangkan koperasi utamanya pada wilayah pedesaan merupakan bentuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis kemampuan lokal, berkembangnya koperasi pada banyak wilayah akan mendukung kelancaran arus distribusi barang dan jasa serta akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dan berputar yang akan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi;
- 3) Pengembangan BLK sebagai tempat pemberdayaan masyarakat utamanya masyarakat pedesaan yang akan dikembangkan sesuai potensi masing masing wilayah/kecamatan;
- 4) Pengembangan Industri dan Perdagangan, melalui pengembangan kluster/wilayah industri kecil/kerajinan/ industri kreatif bercirikan Madura yang Islami, melalui pengembangan industri dan perdagangan dengan model ini, akan mempermudah pembinaan, pengawasan, sehingga kualitas tetap dapat terjaga serta menghindarkan adanya persaingan yang tidak sehat antar pengusaha kecil/mikro dan menengah pada kluster/wilayah yang dikembangkan.

4. Rendahnya Nilai Investasi Berskala Besar

Pasca beroperasinya Jembatan Suramadu tidak serta merta diikuti dengan masuknya arus modal berskala besar di Kabupaten Bangkalan. Penanaman investasi dalam bentuk industri relatif sedikit, sehingga cakupan penyerapan tenaga kerja relatif kecil. Berbagai permasalahan yang menghambat investasi antara lain:

- 1) kesiapan infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, sumber daya air, listrik;
- 2) Harga lahan untuk kebutuhan industri yang dinilai masih terlalu tinggi oleh dunia usaha yang membutuhkan lahan dalam skala besar;
- 3) Kemudahan dalam pelayanan investasi dan perijinan yang belum optimal.

5. Belum Memadainya Infrastruktur Daerah (Jalan/Jembatan, Sumber Daya Air, Perhubungan, Keciptakarya)

Permasalahan di sektor perhubungan antara lain, belum optimalnya infrastruktur sarana dan prasarana perhubungan. Pergeseran moda transportasi dari penyeberangan ujung - kamal ke Jembatan Suramadu belum di dukung oleh layanan transportasi yang memadai. Selain itu dapat diuraikan bahwa panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Bangkalan sampai dengan akhir Tahun 2015 sepanjang 501,26 km atau masih 69% dari potensi panjang jalan yang harus dikembangkan 721,97 Km, demikian pula jumlah jembatan dalam kondisi baik sebanyak 214 buah atau 96% dari jumlah potensi jembatan yang wajib dibangun/dikembangkan sejumlah 223 jembatan. Kepentingan umum lainnya dimaksudkan untuk pengembangan infrastruktur sarana prasarana pengembangan perekonomian, pelayanan dasar dan pemerintahan.

6. Masih Belum Mandiri Pemerintah Daerah Dalam Pembangunan Di Daerah

Kemandirian bagi tataran Pemerintahan tercermin dalam kemampuan pembiayaan dengan kemampuan dan kekuatan sendiri, tanpa harus bergantung dengan pihak luar. Kemandirian ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu rasio PAD terhadap APBD, rasio keuangan daerah, optimalisasi PDRB, perimbangan perbandingan pendapatan perkapita dengan kebutuhan hidup masyarakat. Adapun rasio PAD terhadap APBD yang ada di Kabupaten Bangkalan rata-rata sekitar 5,3%. Dimana pada masa yang akan datang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan diharapkan rasio PAD kabupaten Bangkalan pada Tahun 2018 dapat mencapai rata-rata sekitar 6% terhadap APBD.

7. Kurang Optimalnya Pelayanan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik

Permasalahan yang terjadi dalam urusan pemerintahan umum antara lain :

- 1) Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- 2) Belum optimalnya penerapan Pola Pengembangan Karir.

B. Isu Strategis

Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan dan pengembangan yang akan dihadapi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2013 - 2018, maka dibutuhkan solusi - solusi strategis untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama lima tahun mendatang.

Isu-isu strategis yang mengemuka menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan utama pembangunan 5 (lima) tahun kedepan yang sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih.

Beberapa informasi dari masing–masing isu strategis ini, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dengan pokok – pokok informasi sebagai berikut :

- 1) Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bangkalan, meningkat dari tahun ke tahun yaitu, sebesar 57,23% pada tahun 2010, menjadi sebesar 58,23% pada Tahun 2011, sebesar 59,65% pada Tahun 2012, dan sebesar 60,19% untuk Tahun 2013. Adapun pada Tahun 2014 menjadi sebesar 60,71% dan meningkat sebesar 61,49% Tahun 2015.
- 2) Peningkatan dari tahun ke tahun ini, merupakan hal positif, namun demikian dikaitkan dengan level IPM yang harus ditempuh, masih berada pada level menengah. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya Lanjutan dalam rangka menuju level menengah atas.

2. Kekhawatiran terhadap pengikisan budaya agamis, dengan pokok–pokok informasi sebagai berikut :

- 1) Seiring dengan operasionalisasi Jembatan Suramadu, dapat diprediksi bahwa kedepan, akan tumbuh simpul – simpul ekonomi, diantaranya berupa kawasan industri
- 2) Melalui tumbuhnya kawasan industri tersebut, diprediksi akan berpengaruh terhadap perubahan pola kehidupan masyarakat Bangkalan, baik sosial budaya maupun sosial ekonomi
- 3) Pada sisi lain masyarakat Bangkalan memiliki budaya agamis yang perlu dipertahankan, untuk itu, dalam merespons kondisi diatas, diperlukan upaya lanjutan untuk tetap melestarikan budaya agamis di lingkungan masyarakat Bangkalan.

3. Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat, dengan pokok–pokok informasi sebagai berikut :

- 1) Dominasi sektoral PDRB Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun berada pada sektor pertanian.

- 2) Hal ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan merupakan struktur ekonomi agraris, sehingga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi relatif lambat
 - 3) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sempat mengalami peningkatan pertumbuhan sampai dengan tahun 2013 dari tumbuh sebesar 4,90% di tahun 2010 menjadi tumbuh sebesar 6,50% di tahun 2013. Kemudian pertumbuhan kembali melambat secara fluktuatif selama 3 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,02%, meningkat tipis menjadi sebesar 5,07% di tahun 2015, dan diperkirakan melambat kembali pada tahun 2016 hanya menjadi sebesar 5,01%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu diperlukan kebijakan ekonomi yang komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berlandaskan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat.
 - 4) Kondisi ini merupakan hal positif, walau menunjukkan kecenderungan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu diperlukan kebijakan ekonomi yang komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berlandaskan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat untuk menggeser dominasi struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat melaju relatif lebih cepat.
 - 5) Perlunya prasarana infrastruktur guna memicu pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan seperti jalan, pelabuhan, terminal dan moda transportasi.
- 4. Perlunya perluasan penyediaan lapangan kerja,** dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut :
- 1) Rasio pencari kerja terhadap angkatan kerja Kabupaten Bangkalan Tahun 2012 sebesar 7,2% dan terjadi penurunan sebesar 5% pada Tahun 2013. Adapun pada Tahun 2014 menjadi sebesar 5,7% dan pada Tahun 2015 menurun sebesar 3,9%
 - 2) Kondisi data ini menggambarkan informasi positif, namun demikian, masih diperlukan upaya lanjutan melalui penyediaan lapangan kerja dalam rangka menekan angka pengangguran sekecil mungkin.
- 5. Perlunya penanaman investasi berskala besar,** dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut :
- 1) Struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan yang agraris, merupakan cermin bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangkalan lebih digerakkan oleh sektor pertanian

- 2) Hal ini menggambarkan bahwa penanaman investasi dalam bentuk industri relatif sedikit, sehingga cakupan penyerapan tenaga kerja relatif kecil, untuk itu diperlukan upaya lanjutan guna menarik investasi di Kabupaten Bangkalan.

6. Perlunya menekan angka kemiskinan, dengan pokok-pokok informasi sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan pendataan terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangkalan masih memerlukan upaya untuk ditekan lebih rendah
- 2) Berbagai bantuan bagi masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, bantuan bahan pangan pokok, serta berbagai hal lainnya, merupakan cermin dari kontribusi APBD terhadap penanganan masyarakat miskin, namun demikian, dikaitkan dengan kondisi keterbatasan APBD, belum mampu menangani secara menyeluruh
- 3) Untuk itu, dalam rangka menekan angka kemiskinan, masih diperlukan keterlibatan pihak pelaku ekonomi maupun penguatan usaha mandiri bagi masyarakat.

C. Upaya Perbaikan

Adapun upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam proses pembangunan, hasil Musrenbang Kelurahan, Kecamatan dan Kabupaten dilakukan forum diskusi Perangkat Daerah untuk mengintegrasikan berbagai masukan ke dalam kegiatan dan anggaran masing-masing Perangkat Daerah termasuk menggunakan aplikasi pengaduan berbasis teknologi informasi.
- 2) Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.
- 3) Keberhasilan pencapaian sasaran yang ada pada umumnya berkat dukungan profesionalisme aparatur dalam menyukseskan pembangunan daerah, pelayanan publik, meningkatkan kerja sama antar pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat dalam iklim demokratisasi yang memungkinkan segenap elemen masyarakat berpartisipasi dalam setiap aspek kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
- 4) Sebagai upaya dalam rangka meminimalisasi kendala yang ada Pemerintah Kabupaten Bangkalan terus berupaya mengoptimalkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang ada, serta mengoptimalkan koordinasi dalam menangani permasalahan pemerintahan dan pembangunan di masa yang akan datang

- 5) Kekhawatiran terhadap pengikisan budaya agamis
- 6) Seiring dengan operasionalisasi Jembatan Suramadu, dapat diprediksi bahwa kedepan, akan tumbuh simpul – simpul ekonomi, diantaranya berupa kawasan industri, melalui tumbuhnya kawasan industri tersebut, diprediksi akan berpengaruh terhadap perubahan pola kehidupan masyarakat Bangkalan, baik sosial budaya maupun sosial ekonomi, pada sisi lain masyarakat Bangkalan memiliki budaya agamis yang perlu dipertahankan, untuk itu, dalam merespons kondisi diatas, diperlukan upaya lanjutan untuk tetap melestarikan budaya agamis di lingkungan masyarakat Bangkalan.
- 7) Laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat
- 8) Dominasi sektoral PDRB Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun berada pada sektor pertanian, hal ini menggambarkan bahwa struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan merupakan struktur ekonomi agraris, sehingga dalam menunjang pertumbuhan ekonomi relatif lambat sehingga laju pertumbuhan masing–masing tahun masih perlu dipacu lebih cepat. Untuk itu, diperlukan upaya lanjutan untuk menggeser dominasi struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan dapat melaju relatif lebih cepat.
- 9) Perlunya prasarana infrastruktur guna memicu pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan seperti jalan, pelabuhan, terminal dan moda transportasi.
- 10) Perlunya perluasan penyediaan lapangan kerja.
- 11) Perlunya penanaman investasi berskala besar, Struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan yang agraris, merupakan cermin bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat Bangkalan lebih digerakkan oleh sektor pertanian, hal ini menggambarkan bahwa penanaman investasi dalam bentuk industri relatif sedikit, sehingga cakupan penyerapan tenaga kerja relatif kecil, untuk itu diperlukan upaya lanjutan guna menarik investasi di Kabupaten Bangkalan.
- 12) Perlunya menekan angka kemiskinan, berdasarkan pendataan terakhir, angka kemiskinan Kabupaten Bangkalan masih memerlukan upaya untuk ditekan lebih rendah, sehingga berbagai bantuan bagi masyarakat miskin melalui pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, bantuan bahan pangan pokok, serta berbagai hal lainnya, merupakan cermin dari kontribusi APBD terhadap penanganan masyarakat miskin, namun demikian, dikaitkan dengan kondisi keterbatasan APBD, belum mampu menangani secara menyeluruh.

BAB III

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016 dan Perkiraan Tahun 2017

3.1.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2016

Salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan perekonomian di suatu daerah adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (PDB/PDRB). PDB atau PDRB merupakan jumlah seluruh (nilai tambah) atau jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara atau daerah dalam satu tahun. Jadi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan/balas jasa kepada faktor-faktor produksi di daerah tersebut. Dari nilai PDB/PDRB tersebut dapat diturunkan empat indikator penting, yaitu pendapatan per kapita, pendapatan regional per kapita, pertumbuhan dan struktur ekonomi suatu negara atau daerah. Dalam bab ini indikator ekonomi daerah yang digunakan untuk menganalisis perkembangan ekonomi Kabupaten Bangkalan adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan pergeseran struktur ekonomi.

PDB/PDRB dibagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu atas dasar harga berlaku/ADHB (*Current Prices*) dan atas dasar harga konstan/ADHK (*Constant Prices*). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tersebut. PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat PDRB per kapita, pendapatan per kapita dan melihat besarnya pergeseran struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung berdasarkan harga pada tahun tertentu sebagai dasar. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun. Untuk kebutuhan analisis, sesuai dengan ketersediaan data, maka data PDRB untuk melakukan analisis kondisi ekonomi tahun-tahun sebelumnya dan proyeksi di masa mendatang menggunakan data PDRB tanpa sektor migas dan panas bumi.

Pembahasan kondisi perekonomian daerah akan diawali dengan perkembangan pertumbuhan ekonomi yang akan dibandingkan dengan inflasi

daerah. Analisis ini bertujuan untuk melihat apakah pertumbuhan ekonomi daerah dapat mengimbangi atau melebihi dari kenaikan harga barang dan jasa yang ada di daerah tersebut. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah sama atau melebihi tingkat inflasinya maka dapat dikatakan daya beli masyarakat dapat dijaga atau lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah perlu menyajikan perkembangan PDRB Seri 2010 ADHK karena pertumbuhan ekonomi dan inflasi diperoleh dari PDRB ADHK. Berikut adalah perkembangan PDRB Seri 2010 ADHK Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016. Untuk PDRB Serti 2010 ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2015 dan 2016 masih merupakan angka proyeksi yang diterbitkan oleh BPS Kabupaten Bangkalan.

Tabel 3.1.
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Bangkalan
dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,078,178.50	3,155,530.00	3,310,410.30	3,403,306.50	3,538,477.20	3,673,353.2
	Pertanian, Peternakan, 1 Perburuan dan Jasa Pertanian	2,141,024.00	2,173,365.50	2,237,825.80	2,291,567.60	2,388,352.10	2,478,389.4
	a. Tanaman Pangan	1,204,390.00	1,226,695.30	1,268,824.20	1,312,387.60	1,387,464.10	1,452,867.0
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,815.10	2,867.20	2,774.70	2,827.10	2,906.80	2,991.7
	c. Perkebunan Semusim	8,741.00	8,953.00	9,227.30	9,405.60	9,614.20	9,833.7
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	82,646.30	83,870.80	85,311.00	87,654.20	91,331.40	95,644.9
	e. Perkebunan Tahunan	133,032.70	134,481.60	136,610.80	139,250.40	142,419.20	145,789.1

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Peternakan	684,033.70	690,595.70	708,216.80	712,322.30	725,693.60	741,077.6
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	25,365.20	25,902.00	26,861.00	27,720.40	28,922.80	30,185.5
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	14,761.40	15,701.60	16,373.00	16,520.80	17,562.90	18,675.1
	3 Perikanan	922,393.10	966,462.90	1,056,211.50	1,095,218.10	1,132,562.20	1,176,288.7
B	Pertambangan dan Penggalan	7,634,655.00	6,833,650.20	6,249,751.40	6,913,233.60	211,919.30	214,639.8
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7,447,113.70	6,636,684.00	6,046,677.40	6,702,887.90	0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0	0	0	0	0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0	0	0	0	0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalan Lainnya	187,541.30	196,966.20	203,073.90	210,345.80	211,919.30	214,639.8
C	Industri Pengolahan	296,655.50	312,244.00	329,370.20	345,100.10	361,791.90	380,312.1

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0	0	0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0	0	0	0	0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0	0	0	0	0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	64,852.80	71,233.50	76,177.50	82,114.50	89,174.20	96,490.3
	3 Pengolahan Tembakau	282.1	304.8	313.6	348.2	367.9	383.4
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	10,848.90	11,559.90	12,310.20	13,240.00	13,939.40	14,690.7
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	20.1	20.8	22.3	24.4	25.6	26.7
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	97,117.30	98,558.20	104,733.90	109,940.60	111,073.30	113,157.9

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,575.90	5,688.70	5,739.50	5,796.30	6,011.80	6,249.8
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,656.60	5,220.60	5,655.70	6,064.60	6,208.30	6,368.1
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	141.4	157	161.4	171.1	175.8	180.1
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	45,290.10	49,039.60	51,261.00	52,335.30	55,216.40	58,431.1
	11 Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	21,109.90	23,496.60	24,998.00	26,504.10	28,986.10	31,424.2
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	10	10	10	10.1	10.6	11.3

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
	14 Industri Alat Angkutan	17,351.60	17,403.00	17,510.40	17,614.50	18,212.70	18,927.3
	15 Industri Furnitur	22,498.70	22,638.90	23,505.60	23,851.20	24,902.90	26,049.6
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	6,900.20	6,912.40	6,971.20	7,085.10	7,486.70	7,921.6
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,587.80	6,135.30	6,400.70	6,504.80	6,794.10	7,123.8
	1 Ketenagalistrikan	5,587.80	6,135.30	6,400.70	6,504.80	6,794.10	7,123.8
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0	0	0	0	0	0.0
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,079.60	10,622.10	11,167.00	11,528.60	12,051.70	12,643.2
F	Konstruksi	1,205,099.70	1,370,076.80	1,486,569.10	1,614,889.90	1,742,561.50	1,867,089.7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,661,511.30	1,825,230.10	1,989,134.80	2,130,767.30	2,224,567.40	2,326,113.4

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	406,282.80	437,688.50	473,931.40	506,045.90	539,385.10	572,784.6
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,255,228.50	1,387,541.60	1,515,203.40	1,624,721.40	1,685,182.20	1,753,328.8
H	Transportasi dan Pergudangan	180,806.10	180,847.20	187,916.50	197,634.90	205,927.90	215,539.8
	1 Angkutan Rel	0	0	0	0	0	0.0
	2 Angkutan Darat	84,272.40	89,936.70	96,317.40	103,251.50	107,078.50	112,127.6
	3 Angkutan Laut	34,777.10	34,777.10	36,777.10	38,777.10	42,146.90	45,607.1
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	42,015.80	35,015.80	33,015.80	30,515.80	31,019.90	31,446.3
	5 Angkutan Udara	0	0	0	0	0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	19,740.80	21,117.50	21,806.10	25,090.40	25,682.60	26,358.7

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	119,109.00	129,276.10	136,037.00	147,131.70	159,133.20	172,954.1
	1 Penyediaan Akomodasi	1,630.10	1,726.10	1,837.90	1,928.60	1,989.90	2,066.6
	2 Penyediaan Makan Minum	117,478.90	127,550.00	134,199.10	145,203.10	157,143.30	170,887.5
J	Informasi dan Komunikasi	557,036.40	606,244.70	682,773.80	730,611.30	783,043.20	836,973.8
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	200,382.60	216,588.70	238,578.10	249,263.90	257,508.00	266,774.9
	1 Jasa Perantara Keuangan	90,998.50	97,272.40	109,457.40	113,881.80	117,227.00	120,819.3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	48,419.40	52,911.40	57,886.20	60,694.40	63,136.80	65,942.7
	3 Jasa Keuangan Lainnya	60,783.30	66,213.50	71,033.20	74,479.30	76,930.60	79,793.4
	4 Jasa Penunjang Keuangan	181.4	191.4	201.4	208.4	213.6	219.6
L	Real Estate	135,354.90	145,661.90	154,543.20	162,072.60	171,308.30	181,582.7
M,N	Jasa Perusahaan	29,590.70	30,777.50	32,108.30	33,516.60	34,986.70	36,727.0

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	3	4	5	6	7	8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	680,378.20	710,761.70	726,083.60	733,299.70	768,086.10	806,232.1
P	Jasa Pendidikan	465,480.00	488,384.70	506,476.90	529,053.30	559,046.30	590,322.1
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	44,802.70	47,886.10	49,932.90	52,496.00	56,240.50	60,329.8
R,S,T,U	Jasa lainnya	101,813.30	103,762.30	106,752.30	109,346.70	113,824.00	119,796.5
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	8,959,407.50	9,536,995.30	10,157,328.90	10,666,869.60	11,207,267.10	11,768,508.0

Sumber Data : Bangkalan Dalam Angka 2015 dan 2016

**) Angka Proyeksi

Jika dilihat secara sederhana, total PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan Tanpa Sektor Migas dan Panas Bumi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 (proyeksi), mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan Tanpa Sektor Migas dan Panas Bumi sebesar Rp8.959.407,50 (dalam jutaan), menjadi sebesar Rp11.768.508,00 (dalam jutaan) pada tahun 2016 (masih angka proyeksi). Hal ini menunjukkan dalam jangka waktu 6 tahun terakhir volume perekonomian Kabupaten Bangkalan meningkat sebesar Rp2.809.100,51 (dalam jutaan).

Berdasarkan PDRB Seri 2010 ADHK di atas maka dapat diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 (angka proyeksi). Berikut disajikan data laju pertumbuhan PDRB (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Bangkalan selama 7 tahun terakhir.

Tabel 3.2.
Laju Pertumbuhan PDRB (Pertumbuhan Ekonomi) Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016
(dalam persen)

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.55	2.99	2.51	4.91	2.81	3.97	3.81
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	1.85	2.98	1.51	2.97	2.40	4.22	3.77
	a. Tanaman Pangan	2.54	1.99	1.85	3.43	3.43	5.72	4.71
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	11.69	1.99	1.85	-3.23	1.89	2.82	2.92
	c. Perkebunan Semusim	1.55	1.80	2.42	3.06	1.93	2.22	2.28
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	-5.50	5.19	1.48	1.72	2.75	4.20	4.72
	e. Perkebunan Tahunan	1.24	1.44	1.09	1.58	1.93	2.28	2.37
	f. Peternakan	1.62	4.89	0.96	2.55	0.58	1.88	2.12
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	2.63	1.55	2.12	3.70	3.20	4.34	4.37
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	0.88	2.26	6.37	4.28	0.90	6.31	6.33

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3 Perikanan	4.25	3.02	4.78	9.29	3.69	3.41	3.86
B	Pertambangan dan Penggalian	16.19	0.07	-10.49	-8.54	10.62	0.75	1.28
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	16.60	-0.13	-10.88	-8.89	10.85	NA	NA
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	1.02	8.62	5.03	3.10	3.58	0.75	1.28
C	Industri Pengolahan	3.07	5.26	5.25	5.48	4.78	4.84	5.12
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Industri Batu Bara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Industri Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Industri Makanan dan Minuman	6.51	6.72	9.84	6.94	7.79	8.60	8.20
	3 Pengolahan Tembakau	4.55	3.36	8.05	2.89	11.04	5.67	4.20

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	12.04	6.34	6.55	6.49	7.55	5.28	5.39
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	14.72	6.68	3.45	7.14	9.82	4.85	4.18
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	0.38	3.23	1.48	6.27	4.97	1.03	1.88
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	0.51	4.26	2.02	0.89	0.99	3.72	3.96
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	7.16	6.63	12.11	8.33	7.23	2.37	2.57
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.51	6.03	11.09	2.78	6.02	2.75	2.45
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	2.19	11.88	8.28	4.53	2.10	5.50	5.82
	11 Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	6.51	6.63	11.31	6.39	6.02	9.36	8.41
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	1.41	0.50	0.15	0.11	0.39	5.67	5.71
	14 Industri Alat Angkutan	2.82	0.30	0.30	0.62	0.59	3.40	3.92

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	15 Industri Furnitur	0.83	1.31	0.62	3.83	1.47	4.41	4.60
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	2.48	0.77	0.18	0.85	1.63	5.67	5.81
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.85	9.62	9.80	4.33	1.63	4.45	4.85
	1 Ketenagalistrikan	0.85	9.62	9.80	4.33	1.63	4.45	4.85
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.96	5.87	5.38	5.13	3.24	4.54	4.91
F	Konstruksi	4.45	12.95	13.69	8.50	8.63	7.91	7.15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.18	8.98	9.85	8.98	7.12	4.40	4.56
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	9.85	8.29	7.73	8.28	6.78	6.59	6.19
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	8.96	9.21	10.54	9.20	7.23	3.72	4.04
H	Transportasi dan Pergudangan	-12.16	2.28	0.02	3.91	5.17	4.20	4.67

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1 Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Angkutan Darat	5.34	5.97	6.72	7.09	7.20	3.71	4.72
	3 Angkutan Laut	2.50	6.10	0.00	5.75	5.44	8.69	8.21
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	-39.47	-8.69	-16.66	-5.71	-7.57	1.65	1.37
	5 Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	3.91	6.93	6.97	3.26	15.06	2.36	2.63
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11.05	8.40	8.54	5.23	8.16	8.16	8.69
	1 Penyediaan Akomodasi	1.96	6.30	5.89	6.47	4.94	3.18	3.85
	2 Penyediaan Makan Minum	11.19	8.43	8.57	5.21	8.20	8.22	8.75
J	Informasi dan Komunikasi	14.46	5.31	8.83	12.62	7.01	7.18	6.89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3.66	6.56	8.09	10.15	4.48	3.31	3.60
	1 Jasa Perantara Keuangan	1.84	4.20	6.89	12.53	4.04	2.94	3.06

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	4.28	8.61	9.28	9.40	4.85	4.02	4.44
	3 Jasa Keuangan Lainnya	6.12	8.61	8.93	7.28	4.85	3.29	3.72
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.05	3.42	5.51	5.23	3.48	2.52	2.78
L	Real Estate	3.28	6.74	7.61	6.10	4.87	5.70	6.00
M,N	Jasa Perusahaan	3.26	4.22	4.01	4.32	4.39	4.39	4.97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.98	8.91	4.47	2.16	0.99	4.74	4.97
P	Jasa Pendidikan	2.26	3.37	4.92	3.70	4.46	5.67	5.59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.62	6.74	6.88	4.27	5.13	7.13	7.27
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.63	2.53	1.91	2.88	2.43	4.09	5.25
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	4.90	6.35	6.45	6.50	5.02	5.07	5.01

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

*) Angka Sementara **) Angka Diperbaiki ***) Angka Proyeksi

Jika dilihat dari tabel 3.2 di atas dapat diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan sempat mengalami peningkatan pertumbuhan sampai dengan tahun 2013 dari tumbuh sebesar 4,90% di tahun 2010 menjadi tumbuh sebesar 6,50% di tahun 2013. Kemudian pertumbuhan kembali melambat secara fluktuatif selama 3 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,02%, meningkat tipis menjadi sebesar 5,07% di tahun 2015, dan diperkirakan melambat kembali pada tahun 2016 hanya menjadi sebesar 5,01%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat kecenderungan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Bangkalan. Untuk itu diperlukan kebijakan ekonomi yang komprehensif oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang berlandaskan potensi daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2016 diperkirakan terjadi pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh 8,75%, diikuti dengan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial yang tumbuh sebesar 7,27% dan kemudian sektor Kontruksi yang tumbuh sebesar 7,15%. Ketiga sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbesar menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 dipengaruhi oleh ketiga sektor ekonomi tersebut. Hal ini dapat menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk lebih mengutamakan kebijakan ekonominya pada ketiga sektor tersebut.

Untuk melihat apakah perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan selama 7 tahun terakhir memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat adalah dengan membandingkan dengan laju inflasi daerah setiap tahunnya. Perbandingan pertumbuhan ekonomi dengan inflasi daerah memberikan gambaran tentang kondisi daya beli masyarakat. Jika tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lebih besar dibandingkan dengan laju inflasi daerah, maka dapat dikatakan bahwa, secara makro, masyarakat mampu mengakses harga barang dan jasa. Atau, dengan kata lain, daya beli masyarakat tidak terdampak negatif dengan adanya inflasi daerah karena lajunya lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonominya (kesejahteraannya). Berikut adalah data laju implisit PDRB (inflasi) menurut lapangan usaha Kabupaten Bangkalan selama 7 tahun terakhir.

Tabel 3.3.
Laju Implisit PDRB (Inflasi Daerah) Menurut Rincian Lapangan Usaha Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016 (dalam persen)

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8.19	5.52	7.82	6.76	6.72	5.98	5.27
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	9.04	5.81	7.46	7.60	6.64	3.88	4.26
	a. Tanaman Pangan	7.37	6.16	6.24	8.15	6.22	0.30	1.35
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	19.97	4.08	5.23	7.22	5.51	7.48	6.42
	c. Perkebunan Semusim	2.58	4.90	4.64	1.54	3.26	8.11	7.32
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0.90	3.51	0.11	6.79	6.96	11.78	6.86
	e. Perkebunan Tahunan	16.98	6.13	7.38	5.03	7.07	9.48	6.43
	f. Peternakan	11.67	5.48	10.66	7.38	7.30	8.48	8.75
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	13.68	4.61	4.72	5.02	8.69	5.92	4.97
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	6.86	8.24	5.60	4.50	9.16	12.69	7.50

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	3 Perikanan	6.24	4.81	8.70	5.03	6.88	10.39	7.28
B	Pertambangan dan Penggalian	10.44	11.11	0.25	12.74	1.29	0.84	1.22
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	10.54	11.26	0.22	13.10	0.94	NA	NA
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	6.81	5.19	2.12	2.18	13.10	0.84	1.22
C	Industri Pengolahan	6.74	7.39	4.02	5.42	6.48	5.44	5.83
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a. Industri Batu Bara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b. Industri Pengilangan Migas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Industri Makanan dan Minuman	7.53	8.27	4.19	4.94	5.54	3.04	4.25
	3 Pengolahan Tembakau	7.53	4.86	5.58	9.89	3.08	5.82	6.26

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	4.81	2.93	3.08	3.41	1.90	-0.53	0.68
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	4.81	2.61	3.43	4.35	2.38	2.52	1.87
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	6.67	8.87	2.84	7.49	8.04	10.68	9.90
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	3.70	4.32	2.37	3.75	4.48	6.16	4.02
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	3.34	5.14	4.91	3.83	4.43	4.24	4.14
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	6.69	4.99	2.46	0.77	1.77	3.67	3.05
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	4.10	6.94	5.05	2.78	7.34	6.15	5.90
	11 Industri Logam Dasar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	6.69	3.99	4.91	6.13	5.90	-3.67	0.64
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	9.45	9.11	6.19	8.01	9.45	-1.04	9.59
	14 Industri Alat Angkutan	9.45	7.29	5.57	4.00	0.90	1.21	1.95

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	15 Industri Furnitur	8.85	7.68	5.72	6.16	8.39	7.09	6.09
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	11.06	2.01	2.86	3.08	6.69	-0.98	3.59
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0.91	-3.98	-8.28	-5.28	0.65	-0.71	0.83
	1 Ketenagalistrikan	0.91	-3.98	-8.28	-5.28	0.65	-0.71	0.83
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2.52	2.94	8.61	5.44	4.43	4.79	4.73
F	Konstruksi	8.66	7.24	7.78	6.20	7.63	1.70	7.47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.28	4.52	4.00	3.13	2.64	6.63	3.94
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	7.07	4.52	5.15	5.49	2.45	-0.23	3.49
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	4.71	4.52	3.64	2.39	2.70	8.90	4.11
H	Transportasi dan Pergudangan	2.58	1.82	1.94	5.88	5.31	5.65	4.31

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	1 Angkutan Rel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2 Angkutan Darat	1.79	0.82	1.18	3.40	4.01	7.54	4.22
	3 Angkutan Laut	1.59	0.58	4.29	5.18	7.01	-3.42	6.55
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	4.11	2.72	0.57	6.60	7.16	9.28	1.91
	5 Angkutan Udara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	1.30	6.33	3.85	16.26	4.48	8.53	4.98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.86	3.84	4.78	4.98	5.69	5.57	5.06
	1 Penyediaan Akomodasi	5.93	7.18	5.34	4.43	5.18	5.87	5.71
	2 Penyediaan Makan Minum	5.86	3.79	4.78	4.99	5.70	5.57	5.05
J	Informasi dan Komunikasi	0.63	0.71	0.31	0.21	0.16	1.53	0.31
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4.99	5.17	4.31	2.82	4.37	5.60	5.29
	1 Jasa Perantara Keuangan	2.14	4.32	5.58	1.84	3.31	6.38	5.53

Kategori	U R A I A N	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	8.60	6.36	2.97	3.07	5.25	4.55	4.85
	3 Jasa Keuangan Lainnya	6.95	5.49	3.52	4.09	5.25	5.29	5.29
	4 Jasa Penunjang Keuangan	6.44	5.51	4.95	4.48	2.07	6.08	5.56
L	Real Estate	6.75	5.48	1.60	2.78	2.23	5.28	4.35
M,N	Jasa Perusahaan	6.64	5.05	6.02	5.86	2.98	6.54	4.42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.26	7.20	9.33	8.06	5.14	5.14	4.57
P	Jasa Pendidikan	4.13	4.54	6.14	4.98	4.55	5.27	5.08
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.30	2.28	2.84	4.08	4.56	3.32	3.66
R,S,T,U	Jasa lainnya	2.02	3.45	0.55	2.49	4.95	4.29	4.20
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	6.15	5.24	5.98	5.16	5.33	4.86	4.90

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

*) Angka Sementara **) Angka Diperbaiki ***) Angka Proyeksi

Jika dilihat dari tabel 3.3 di atas, maka tingkat inflasi daerah relatif mengalami penurunan. Pada tahun 2010 tingkat inflasi daerah Kabupaten Bangkalan mencapai 6,15% dan kemudian menurun sampai dengan diperkirakan hanya 4,90% di tahun 2016. Penurunan tingkat inflasi daerah sampai di bawah 5% merupakan kinerja kebijakan ekonomi yang relatif cukup baik dan perlu dijaga. Untuk itu, upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi daerah harus tetap dilakukan. Tabel dan grafik berikut akan menunjukkan perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan inflasi daerah.

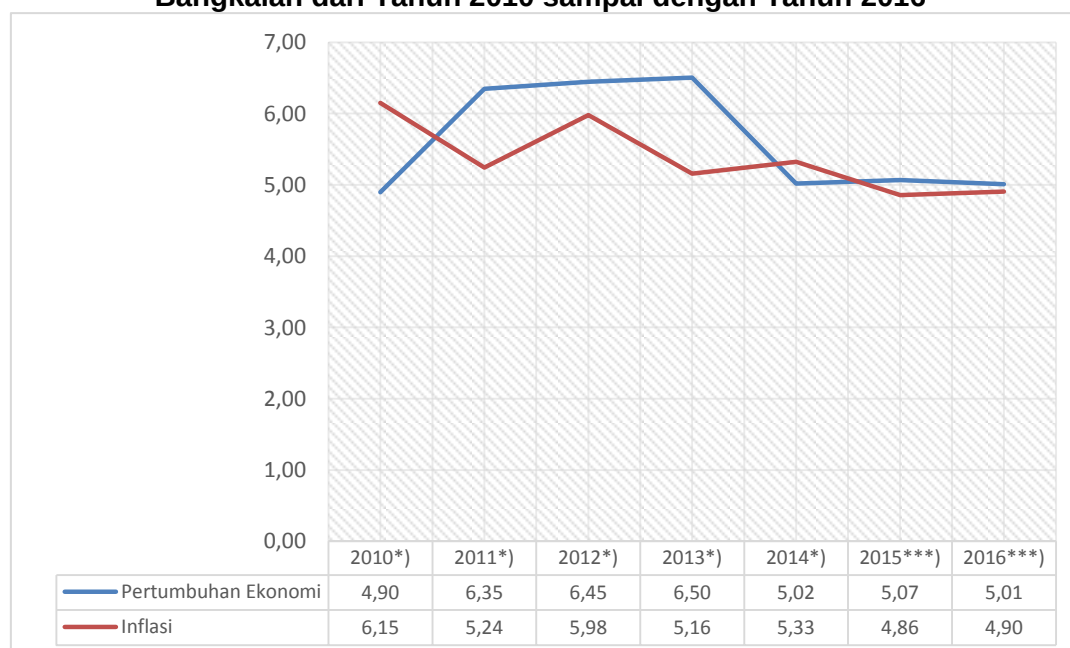
Tabel 3.4.
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016

URAIAN	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Pertumbuhan Ekonomi	4.90	6.35	6.45	6.50	5.02	5.07	5.01
Inflasi	6.15	5.24	5.98	5.16	5.33	4.86	4.90

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

*) Angka Sementara **) Angka Diperbaiki ***) Angka Proyeksi

Grafik 3.1.
Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Daerah Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2016



Jika dilihat dari tabel 3.4 dan grafik 3.1 di atas dapat diketahui bahwa sejak tahun 2014 mengindikasikan adanya ancaman inflasi terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Hal terlihat dengan semakin tipisnya jarak antara tingkat pertumbuhan ekonomi dengan inflasi daerah. Bahkan pada tahun 2014, tingkat inflasi daerah sempat lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun, pada 2 tahun terakhir tingkat pertumbuhan ekonomi daerah lebih besar dibandingkan dengan inflasi daerah. Penurunan inflasi daerah yang dibarengi dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan adanya tekanan pada kemampuan daya beli masyarakat, sehingga akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks penentuan kebijakan kerangka pendanaan dalam pembangunan daerah, informasi pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya harapan peningkatan pada penerimaan daerah. Apabila pada tahun 2016 diperkirakan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,01% maka diharapkan terjadi realisasi penerimaan daerah naik minimal sebesar 5,01% juga. Tingkat inflasi daerah mengindikasikan adanya kenaikan alokasi anggaran. Jika pada tahun 2016 diperkirakan inflasi daerah sebesar 4,90% maka alokasi anggaran akan naik maksimal sebesar 4,90%.

Penjelasan berikutnya adalah melihat seberapa besar perkembangan pendapatan regional per kapita dan pergeseran struktur ekonomi daerah selama beberapa tahun terakhir di Kabupaten Bangkalan. Dasar untuk menganalisis perkembangan pendapatan regional per kapita dan pergeseran struktur ekonomi daerah adalah dengan menggunakan data PDRB Seri 2010 ADHB. Berikut adalah data PDRB Seri 2010 ADHB Kabupaten Bangkalan selama 6 tahun terakhir.

Tabel 3.5.
Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Bangkalan dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2016 (Dalam Jutaan Rupiah)

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,248,153.50	3,590,158.10	4,021,106.10	4,411,658.90	4,861,236.60	5,312,682.0
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,265,431.60	2,471,153.00	2,737,740.40	2,989,533.50	3,236,596.70	3,501,688.8
	a. Tanaman Pangan	1,278,557.00	1,383,542.00	1,547,667.00	1,700,306.50	1,803,055.40	1,913,596.2
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	2,930.00	3,140.30	3,258.30	3,502.60	3,870.90	4,239.6
	c. Perkebunan Semusim	9,169.30	9,827.80	10,284.70	10,825.30	11,963.30	13,132.4
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan	85,547.20	86,913.60	94,410.60	103,750.90	120,839.20	135,223.3

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Lainnya						
	e. Perkebunan Tahunan	141,180.90	153,244.00	163,502.70	178,437.20	199,795.80	217,670.8
	f. Peternakan	721,512.00	806,109.00	887,714.20	958,046.80	1,058,763.80	1,175,859.1
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	26,535.10	28,376.10	30,902.90	34,664.10	38,308.30	41,967.4
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	15,978.20	17,947.50	19,557.20	21,540.90	25,805.40	29,496.7
	3 Perikanan	966,743.70	1,101,057.60	1,263,808.50	1,400,584.60	1,598,834.50	1,781,496.5
B	Pertambangan dan Penggalian	8,482,582.90	7,611,369.10	7,847,910.50	8,793,029.20	265,279.60	271,958.3
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	8,285,307.90	7,399,791.70	7,625,022.20	8,531,912.70	NA	NA
	2 Pertambangan Batubara dan	0	0	0	0	0	0.0

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Lignit						
	3 Pertambangan Biji Logam	0	0	0	0	0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	197,275.00	211,577.40	222,888.30	261,116.50	265,279.60	271,958.3
C	Industri Pengolahan	318,571.30	348,800.60	387,862.90	432,701.60	478,299.50	532,101.7
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0	0	0	0	0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0	0	0	0	0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0	0	0	0	0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	70,214.70	80,352.80	90,178.10	102,596.10	114,808.60	129,506.4
	3 Pengolahan	295.8	337.4	381.5	436.7	488.3	540.6

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
	Tembakau						
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	11,167.20	12,265.90	13,507.10	14,803.70	15,502.80	16,449.7
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	20.6	22	24.7	27.7	29.8	31.6
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	105,732.20	110,345.90	126,040.00	142,949.80	159,840.40	178,957.6
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	5,816.60	6,074.70	6,358.70	6,709.50	7,387.30	7,988.6

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	4,895.90	5,758.60	6,477.60	7,253.40	7,740.40	8,268.1
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	148.4	168.9	174.9	188.8	201.1	212.3
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	48,435.00	55,092.10	59,189.00	64,867.10	72,646.70	81,412.7
	11 Industri Logam Dasar	0	0	0	0	0	0.0
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	21,952.70	25,635.00	28,945.10	32,500.20	34,240.30	37,356.5

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	10.9	11.6	12.6	13.8	14.4	16.7
	14 Industri Alat Angkutan	18,615.70	19,710.30	20,625.80	20,935.20	21,908.90	23,213.5
	15 Industri Furnitur	24,226.80	25,772.20	28,407.80	31,243.90	34,935.60	38,770.9
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	7,038.80	7,253.10	7,540.10	8,175.80	8,554.90	9,376.4
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,365.50	5,403.60	5,339.90	5,461.80	5,664.30	5,988.7
	1 Ketenagalistrikan	5,365.50	5,403.60	5,339.90	5,461.80	5,664.30	5,988.7
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0	0	0	0	0	0.0

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	10,375.60	11,875.00	13,163.40	14,192.00	15,546.10	17,079.8
F	Konstruksi	1,292,369.00	1,583,564.10	1,824,770.90	2,133,480.20	2,341,353.50	2,696,186.3
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,736,539.10	1,983,955.10	2,229,888.80	2,451,613.80	2,729,361.10	2,966,468.5
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	424,629.00	481,020.00	549,468.50	601,098.00	639,197.30	702,478.2
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,311,910.10	1,502,935.20	1,680,420.30	1,850,515.80	2,090,163.80	2,263,990.2

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
H	Transportasi dan Pergudangan	184,090.00	187,711.30	206,513.50	228,716.80	251,779.00	274,882.8
	1 Angkutan Rel	0	0	0	0	0	0.0
	2 Angkutan Darat	84,963.40	91,741.80	101,586.70	113,271.20	126,331.80	137,867.3
	3 Angkutan Laut	34,977.10	36,477.10	40,574.80	45,781.40	48,058.00	55,407.2
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	43,160.00	36,174.40	36,358.60	36,012.90	40,006.30	41,330.1
	5 Angkutan Udara	0	0	0	0	0	0.0
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	20,989.50	23,318.00	27,993.30	33,651.30	37,382.90	40,278.1
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	123,678.60	140,654.70	155,382.70	177,613.40	202,808.00	231,573.4
	1 Penyediaan Akomodasi	1,747.10	1,948.80	2,166.90	2,391.70	2,612.60	2,868.3
	2 Penyediaan Makan Minum	121,931.50	138,705.90	153,215.80	175,221.70	200,195.40	228,705.1

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
J	Informasi dan Komunikasi	560,966.70	612,384.70	691,168.50	740,788.20	806,098.40	864,262.6
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	210,742.70	237,606.50	269,100.60	293,434.40	320,104.80	349,169.3
	1 Jasa Perantara Keuangan	94,933.30	107,140.30	122,778.50	131,970.20	144,509.30	157,169.3
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	51,497.50	57,944.60	65,339.50	72,106.10	78,417.30	85,876.8
	3 Jasa Keuangan Lainnya	64,120.50	72,309.60	80,749.60	89,112.00	96,910.50	105,832.8
	4 Jasa Penunjang Keuangan	191.4	211.9	233	246.1	267.6	290.4
L	Real Estate	142,769.30	156,098.70	170,223.50	182,506.10	203,082.80	224,633.9
M,N	Jasa Perusahaan	31,085.70	34,278.90	37,857.90	40,697.60	45,261.70	49,611.0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	729,381.30	833,045.20	919,623.70	976,488.30	1,075,369.00	1,180,381.7
P	Jasa Pendidikan	486,604.70	541,915.50	590,001.20	644,361.20	716,761.80	795,324.5

Kategori	U R A I A N	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
1	2	4	5	6	7	8	9
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	45,822.40	50,367.50	54,664.90	60,090.20	66,510.50	73,957.0
R,S,T,U	Jasa lainnya	105,329.10	107,930.60	113,807.80	122,338.80	132,809.40	145,644.6
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	9,429,119.50	10,637,327.40	11,913,364.60	13,177,259.80	14,517,326.10	15,991,906.0
	JUMLAH PENDUDUK	918,813	928,024	937,497	945,821	954,305	963,549
	PDRB PER KAPITA	10.26	11.46	12.71	13.93	15.21	16.60

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

*) Angka Sementara **) Angka Diperbaiki ***) Angka Proyeksi

Selaras dengan perkembangan PDRB ADHK, Total PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan mencapai Rp9.429.119,5 juta dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2016 yang diperkirakan mencapai sebesar Rp15.991.906,0 juta. Peningkatan paling besar terjadi pada tahun 2012, yaitu sebesar Rp1.208.208 juta atau meningkat sebesar 12,81% dari tahun 2011. Rata-rata pertumbuhan PDRB ADHB Kabupaten Bangkalan selama 6 tahun terakhir sebesar lebih dari 11%.

Untuk melihat dampaknya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan menghitung PDRB per Kapitanya. Pada umumnya, jumlah penduduk di suatu daerah di Indonesia juga mengalami pertambahan. Namun, jika dilihat persentasenya, kenaikan pertumbuhan pendudukan di Kabupaten Bangkalan rata-rata sekitar 1% per tahunnya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bangkalan dari tahun ke tahun membaik dan semakin sejahtera. Pada tahun 2011 PDRB per Kapita Kabupaten Bangkalan sebesar Rp10,26 juta dan meningkat cukup signifikan diperkirakan menjadi sebesar Rp16,6 juta di tahun 2016. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pertumbuhan ekonomi juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

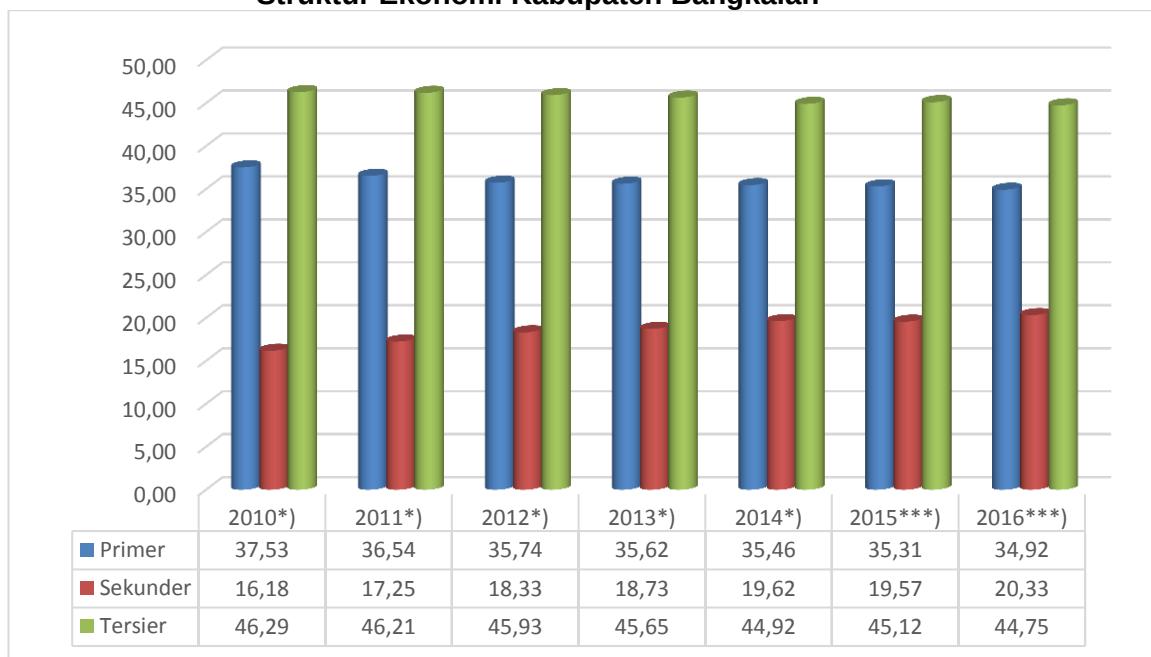
Untuk melihat pergerakan masing-masing sektor ekonomi adalah dengan menganalisis kontribusi dan pergerakannya dari tahun ke tahun masing-masing sektor ekonomi terhadap total PDRB. Sektor ekonomi dalam PDRB Seri 2010 terbagi menjadi 17 sektor, yang dapat dikategorikan menjadi sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer terdiri dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; dan sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan, sektor sekunder terdiri dari sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, dan sektor konstruksi. Terakhir, sektor tersier adalah sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; sektor transportasi dan pergudangan; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa keuangan dan asuransi; sektor *real estate*; sektor jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa pendidikan; sektor jasa kesehatan dan kegiatan

sosial; dan sektor jasa lainnya. Pergeseran antar sektor tersebut tercermin dalam table dan grafik struktur ekonomi di bawah ini.

Tabel 3.6
Peranan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier dalam PDRB Kabupaten Bangkalan Selama 7 Tahun Terakhir (dalam persentase)

URAIAN	2010*)	2011*)	2012*)	2013*)	2014*)	2015***)	2016***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Primer	37.53	36.54	35.74	35.62	35.46	35.31	34.92
Sekunder	16.18	17.25	18.33	18.73	19.62	19.57	20.33
Tersier	46.29	46.21	45.93	45.65	44.92	45.12	44.75

Grafik 3.2.
Struktur Ekonomi Kabupaten Bangkalan



Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

Jika dilihat dari tabel 3.5 dan gambar 3.1 di atas, terlihat bahwa sektor primer dari tahun ke tahun selama 7 tahun terakhir, mengalami kecenderungan menurun, dari yang awalnya memiliki kontribusi sebesar 37,53% di tahun 2010 diperkirakan menjadi hanya sebesar 34,92% di tahun 2016. Begitu juga dengan sektor sekunder, meski tetap menjadi sektor yang memiliki peranan terbesar

dalam struktur PDRB, dari tahun ke tahun selama 7 tahun terakhir mengalami kecenderungan menurun.

Pada tahun 2010, kontribusi sektor primer mencapai 37,53% dari total PDRB. Kemudian berkurang kontribusinya pada tahun 2011 menjadi sekitar 36,54% dan semakin menurun sampai pada kisaran 35% pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Kembali diperkirakan semakin menurun kontribusi sektor primer di Kabupaten Bangkalan terhadap perekonomian daerah menjadi sekitar 34,92% pada tahun 2016. Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor tersier yang mengalami penurunan kontribusi meski pada tahun 2015 diperkirakan naik dan turun kembali di tahun 2016. Pada tahun 2010 kontribusi sektor tersier mencapai 46,29% dan kemudian berkurang kontribusinya sampai dengan tahun 2014 menjadi 44,92%. Selanjutnya, naik kembali pada tahun 2015 menjadi 45,12% dan kembali menurun pada tahun 2016 yang diperkirakan kontribusinya menjadi hanya 44,75%, titik terendah selama 7 tahun terakhir.

Berbeda dengan dua sektor lainnya, sektor primer dan tersier, kontribusi sektor sekunder cenderung mengalami peningkatan selama 7 tahun terakhir. Pada tahun 2010 kontribusi sektor sekunder sebesar 16,18% dan meningkat cukup signifikan pada tahun 2016 yang diperkirakan kontribusinya mencapai 20,33%. Peningkatan pada sektor sekunder dan penurunan pada sektor primer dan tersier menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan dari sektor primer dan tersier ke sektor sekunder selama 7 tahun terakhir.

Peningkatan pada sektor sekunder didominasi dengan subsektor konstruksi. Pada tahun 2010 sektor konstruksi menyumbang kontribusi sebesar 12,66%. Kemudian meningkat secara berturut-turut pada tahun 2011 sebesar 13,71, meningkat lagi menjadi sebesar 14,89% pada tahun 2012, meningkat sebesar 15,32% di tahun 2013 dan naik menjadi 16,19% di tahun 2014. Kemudian turun tipis menjadi 16,13% di tahun 2015 dan naik kembali di tahun 2016 menjadi sebesar 16,86%.

Secara keseluruhan, sektor yang masih memberikan kontribusi terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Meski mengalami tren penurunan, kontribusi sektor ini tetap mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan sampai dengan sepertiga PDRB (diatas 33%). Kemudian diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor

yang memiliki kontribusi terhadap struktur ekonomi Kabupaten Bangkalan konsisten dikisaran angka 18% selama 7 tahun terakhir ini. Kontribusi terbesar ketiga adalah pada sektor konstruksi yang diperkirakan tetap mengalami tren peningkatan sampai dengan sebesar 16% lebih di tahun 2016. Informasi ini menunjukkan perlunya memperkuat kebijakan ekonomi yang bertumpu pada ketiga sektor tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi.

3.1.1.2. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2017

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk menjelaskan perkiraan kondisi ekonomi pada tahun 2017 perlu disajikan data proyeksi PDRB ADHK, PDRB ADHB, Laju Pertumbuhan, Laju Implisit PDRB, dan PDRB Perkapita. Pada sub bab ini hanya akan menjelaskan data proyeksi pada tahun 2017 saja, sedangkan data proyeksi tahun-tahun berikutnya akan dijelaskan pada sub bab berikutnya terkait dengan prospek dan tantangan perekonomian daerah tahun 2018.

Tabel 3.7
Proyeksi PDRB Seri 2010 ADHK dan ADHB, Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit PDRB, dan Proyeksi Distribusi Persentase PDRB Tahun 2017 Kabupaten Bangkalan

Kategori	U R A I A N	Tahun 2017 ***)				
		ADHK (jutaan rupiah)	ADHB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB (%)
1	2	4	5	6	7	8
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,816,086.2	5,815,305.0	3.89	5.37	32.96
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,574,513.6	3,822,762.4	3.88	5.09	21.67
	a. Tanaman Pangan	1,518,769.6	2,090,509.0	4.54	4.50	11.85
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	3,082.6	4,578.5	3.04	4.81	0.03
	c. Perkebunan Semusim	10,063.1	14,237.2	2.33	5.94	0.08
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	99,740.0	146,580.0	4.28	3.95	0.83
	e. Perkebunan Tahunan	149,635.9	232,488.0	2.64	4.06	1.32
	f. Peternakan	761,769.1	1,289,087.3	2.79	6.65	7.31
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	31,453.3	45,282.4	4.20	3.55	0.26
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	19,679.3	33,033.2	5.38	6.27	0.19
	3 Perikanan	1,221,893.3	1,959,509.4	3.88	5.89	11.11

Kategori	U R A I A N	Tahun 2017 ***)				
		ADHK (jutaan rupiah)	ADHB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB (%)
1	2	4	5	6	7	8
B	Pertambangan dan Penggalian	219,551.0	293,762.3	2.29	5.60	1.67
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	219,551.0	293,762.3	2.29	5.60	1.67
C	Industri Pengolahan	400,076.8	587,146.7	5.20	4.89	3.33
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	104,217.7	144,308.2	8.01	3.17	0.82
	3 Pengolahan Tembakau	395.7	587.8	3.20	5.35	0.00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	15,328.7	17,649.0	4.34	2.83	0.10
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	27.6	34.0	3.46	3.99	0.00

Kategori	U R A I A N	Tahun 2017 ***)				
		ADHK (jutaan rupiah)	ADHB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB (%)
1	2	4	5	6	7	8
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	115,656.1	196,363.2	2.21	7.36	1.11
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6,512.4	8,719.6	4.20	4.75	0.05
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	6,543.3	8,848.8	2.75	4.16	0.05
	9 Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	185.0	224.6	2.71	3.03	0.00
	10 Industri Barang Galian bukan Logam	61,924.9	90,235.0	5.98	4.58	0.51
	11 Industri Logam Dasar	0.0	0.0			
	12 Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	33,967.5	41,755.0	8.09	3.41	0.24
	13 Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	11.9	18.9	6.05	6.72	0.00
	14 Industri Alat Angkutan	19,677.3	25,428.3	3.96	5.37	0.14
	15 Industri Furnitur	27,262.1	42,765.3	4.65	5.40	0.24

Kategori	U R A I A N	Tahun 2017 ***)				
		ADHK (jutaan rupiah)	ADHB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB (%)
1	2	4	5	6	7	8
	16 Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	8,366.7	10,209.0	5.62	3.09	0.06
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,472.1	6,481.9	4.89	3.19	0.04
	1 Ketenagalistrikan	7,472.1	6,481.9	4.89	3.19	0.04
	2 Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.0	0.0			
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,271.8	18,686.7	4.97	4.23	0.11
F	Konstruksi	2,012,305.1	3,041,857.1	7.78	4.68	17.24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,441,626.5	3,255,296.4	4.97	4.54	18.45
	1 Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	607,265.0	784,442.1	6.02	5.33	4.45
	2 Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,834,361.6	2,470,854.4	4.62	4.32	14.00
H	Transportasi dan Pergudangan	225,141.4	299,864.7	4.45	4.44	1.70
	1 Angkutan Rel	0.0	0.0			
	2 Angkutan Darat	117,203.2	151,917.4	4.53	5.42	0.86

Kategori	U R A I A N	Tahun 2017 ***)				
		ADHK (jutaan rupiah)	ADHB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB (%)
1	2	4	5	6	7	8
	3 Angkutan Laut	49,372.1	62,612.5	8.26	4.39	0.35
	4 Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	31,460.9	41,814.7	0.05	1.13	0.24
	5 Angkutan Udara	0.0	0.0			
	6 Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	27,105.1	43,520.1	2.83	5.07	0.25
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	187,251.9	264,699.9	8.27	5.58	1.50
	1 Penyediaan Akomodasi	2,148.8	3,145.0	3.98	5.45	0.02
	2 Penyediaan Makan Minum	185,103.1	261,554.9	8.32	5.58	1.48
J	Informasi dan Komunikasi	880,698.8	954,273.9	5.22	4.93	5.41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	275,610.5	380,906.8	3.31	5.59	2.16
	1 Jasa Perantara Keuangan	124,833.4	170,540.5	3.32	5.02	0.97
	2 Asuransi dan Dana Pensiun	68,045.4	91,934.1	3.19	3.75	0.52
	3 Jasa Keuangan Lainnya	82,505.2	118,109.3	3.40	7.93	0.67
	4 Jasa Penunjang Keuangan	226.5	322.9	3.17	7.79	0.00
L	Real Estate	193,409.4	250,715.4	6.51	4.79	1.42
M,N	Jasa Perusahaan	38,244.8	54,438.1	4.13	5.38	0.31

Kategori	U R A I A N	Tahun 2017 ***)				
		ADHK (jutaan rupiah)	ADHB (jutaan rupiah)	Laju Pertumbuhan PDRB (%)	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB (%)
1	2	4	5	6	7	8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	840,192.1	1,289,340.8	4.21	4.82	7.31
P	Jasa Pendidikan	622,720.8	886,483.3	5.49	5.66	5.02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	64,760.7	82,586.7	7.34	4.03	0.47
R,S,T,U	Jasa lainnya	126,221.6	161,274.9	5.36	5.10	0.91
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	12,364,641.5	17,643,120.6	5.07	5.01	100.00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bangkalan

***) Angka Proyeksi

Berdasarkan tabel 3.7 di atas, diperkirakan PDRB ADHK Kabupaten Bangkalan Tahun 2017 sebesar Rp12.364.641,5 juta atau mengalami laju pertumbuhan sebesar 5,07% dari Tahun 2016. Pertumbuhan sebesar 5,07% lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi tahun 2016 sebesar 5,01%. Sama halnya dengan tahun 2016, pertumbuhan tertinggi berada pada 3 sektor, yaitu sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (8,27); sektor konstruksi (7,78); dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (7,34). Jika dibandingkan dengan laju implisit PDRB (inflasi) maka pada tahun 2017 diperkirakan laju inflasi daerah Kabupaten Bangkalan sebesar 5,01, masih di bawah laju pertumbuhan ekonomi (5,07%). Namun demikian, kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Bangkalan karena dengan data historis yang ada, angka proyeksi inflasi daerah semakin mendekati laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan. Hal ini mengindikasikan adanya ancaman terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu adanya upaya dan kebijakan yang komprehensif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan bertumpu pada potensi unggulan daerah dan mengendalikan laju inflasi daerah.

Untuk PDRB ADHB Tahun 2017 diperkirakan mencapai sebesar Rp17.643.120,6 juta atau meningkat sebesar 10,33% dari total PDRB ADHB Tahun 2016. Jumlah penduduk Bangkalan pada tahun 2017 ini diperkirakan akan naik menjadi 972.755 jiwa sehingga nilai PDRB perkapita diproyeksi akan sebesar Rp18,14 juta atau naik sebesar 9,28% dari PDRB perkapita tahun 2016. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan diperkirakan akan terus meningkat, melanjutkan trend kenaikan pada tahun-tahun sebelumnya.

Pergeseran struktur ekonomi juga relatif masih tetap, bahwa pergeseran struktur ekonomi bergerak dari sektor primer dan tersier ke arah sektor sekunder. Penurunan pada sektor primer pada tahun 2017 diperkirakan turun kontribusinya terhadap PDRB menjadi sebesar 34,63%. Begitu juga dengan kontribusi sektor tersier diproyeksikan tetap mengalami penurunan sampai sebesar 44,66%, meski tetap menjadi sektor yang paling dominan. Berbeda dengan kedua sektor di atas, sektor sekunder menjadi sektor yang satu-satunya melanjutkan tren kenaikan (20,71%). Kenaikan kontribusi sektor sekunder didominasi oleh peranan sektor konstruksi (17,24%). Sektor ekonomi yang memiliki peranan paling besar

diperkirakan tetap pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (32,96%) meski terus cenderung menurun dari tahun ke tahun. Kontribusi terbesar kedua dimiliki oleh sektor ekonomi perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (18,45%), dan kemudian diikuti oleh sektor ekonomi konstruksi (17,24%). Kondisi perekonomian Kabupaten Bangkalan di tahun 2017 diperkirakan melanjutkan kondisi ekonomi di tahun 2016, dan diperkirakan akan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang kecuali jika ada faktor eksternal yang ekstrem (*shock*) misalnya krisis ekonomi.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2018

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bangkalan di tahun 2018 diperkirakan sama dengan yang akan dihadapi pada tahun 2017. Semua indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, PDRB perkapita, dan arah pergeseran struktur ekonomi juga diperkirakan akan menunjukkan trend yang sama dengan kondisi tahun 2017. Namun demikian, akan ada optimisme lebih pada laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan di tahun 2018 yang akan diperkirakan naik dibandingkan dengan laju pertumbuhan daerah tahun 2016 dan 2017, serta ada kecenderungan untuk menjauh dari laju inflasi daerah. Data pada tabel di bawah akan menyajikan beberapa data proyeksi indikator makro ekonomi daerah dan PDRB di tahun 2018.

Tabel 3.8
Proyeksi PDRB Seri 2010 ADHK dan ADHB, Proyeksi Laju Pertumbuhan dan Laju Implisit PDRB, dan Proyeksi Distribusi
Persentase PDRB Tahun 2018 Kabupaten Bangkalan

Katgori	U R A I A N	Tahun 2018 ***)				
		ADHK	ADHB	Laju Pertumbuhan PDRB	Laju Implisit PDRB	Distribusi Persentase PDRB
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,956,638.2	6,350,056.1	3.68	5.32	32.58
	1 Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	2,661,514.0	4,165,721.2	3.38	5.41	21.38
	a. Tanaman Pangan	1,572,968.6	2,305,704.2	3.57	6.49	11.83
	b. Tanaman Hortikultura Semusim	3,202.0	4,961.1	3.87	4.32	0.03
	c. Perkebunan Semusim	10,338.6	15,416.6	2.74	5.40	0.08
	d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	104,274.4	158,628.7	4.55	3.51	0.81
	e. Perkebunan Tahunan	153,896.3	247,169.6	2.85	3.37	1.27
	f. Peternakan	784,039.6	1,383,464.3	2.92	4.27	7.10
	g. Jasa Pertanian dan Perburuan	32,794.5	50,376.7	4.26	6.70	0.26
	2 Kehutanan dan Penebangan Kayu	20,765.7	37,139.2	5.52	6.55	0.19
	3 Perikanan	1,274,358.5	2,147,195.7	4.29	5.07	11.02

B	Pertambangan dan Penggalian	225,157.1	315,253.1	2.55	4.64	1.62
	1 Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Pertambangan Batubara dan Lignit	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	3 Pertambangan Bijih Logam	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	4 Pertambangan dan Penggalian Lainnya	225,157.1	315,253.1	2.55	4.64	1.62
C	Industri Pengolahan	420,421.0	649,788.3	5.09	5.31	3.33
	1 Industri Batubara dan Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	a. Industri Batu Bara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	b. Industri Pengilangan Migas	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	2 Industri Makanan dan Minuman	111,978.8	160,547.3	7.45	3.54	0.82
	3 Pengolahan Tembakau	410.6	641.0	3.78	5.07	0.00
	4 Industri Tekstil dan Pakaian Jadi	16,045.4	19,030.7	4.68	3.01	0.10
	5 Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	28.7	36.4	3.73	3.16	0.00
	6 Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	118,589.7	217,025.0	2.54	7.79	1.11
	7 Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman	6,832.9	9,506.6	4.92	3.91	0.05
	8 Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional	6,730.7	9,495.6	2.86	4.32	0.05

	9	Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik	190.1	238.6	2.75	3.38	0.00
	10	Industri Barang Galian bukan Logam	65,275.6	100,499.6	5.41	5.66	0.52
	11	Industri Logam Dasar	0.0	0.0			
	12	Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik	36,401.6	46,540.7	7.17	4.01	0.24
	13	Industri Mesin dan Perlengkapan YTDL	12.7	21.7	6.75	7.21	0.00
	14	Industri Alat Angkutan	20,478.0	27,738.6	4.07	4.82	0.14
	15	Industri Furnitur	28,581.6	47,263.2	4.84	5.42	0.24
	16	Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan	8,864.7	11,203.6	5.95	3.58	0.06
D		Pengadaan Listrik dan Gas	7,841.7	7,134.6	4.95	4.88	0.04
	1	Ketenagalistrikan	7,841.7	7,134.6	4.95	4.88	0.04
	2	Pengadaan Gas dan Produksi Es	0.0	0.0			
E		Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13,940.8	20,219.6	5.04	3.01	0.10
F		Konstruksi	2,166,237.6	3,418,606.6	7.65	4.40	17.54
G		Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,572,051.5	3,589,219.4	5.34	4.67	18.42
	1	Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya	646,355.9	869,421.0	6.44	4.13	4.46

	2	Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor	1,925,695.6	2,719,798.4	4.98	4.85	13.96
H		Transportasi dan Pergudangan	235,839.3	328,948.9	4.75	4.72	1.69
	1	Angkutan Rel	0.0	0.0			
	2	Angkutan Darat	122,682.7	168,107.0	4.68	5.71	0.86
	3	Angkutan Laut	53,581.9	71,357.8	8.53	5.01	0.37
	4	Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	31,648.2	42,313.6	0.60	0.59	0.22
	5	Angkutan Udara	0.0	0.0			
	6	Pergudangan dan Jasa Penunjang Angkutan, Pos dan Kurir	27,926.6	47,170.5	3.03	5.20	0.24
I		Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	203,672.6	304,393.3	8.77	5.72	1.56
	1	Penyediaan Akomodasi	2,234.9	3,453.3	4.01	5.57	0.02
	2	Penyediaan Makan Minum	201,437.8	300,940.0	8.82	5.73	1.54
J		Informasi dan Komunikasi	928,852.0	1,062,955.5	5.47	5.61	5.45
K		Jasa Keuangan dan Asuransi	285,420.4	417,359.5	3.56	5.80	2.14
	1	Jasa Perantara Keuangan	129,137.9	187,898.9	3.45	6.51	0.96
	2	Asuransi dan Dana Pensiun	70,419.3	99,159.5	3.49	4.22	0.51
	3	Jasa Keuangan Lainnya	85,628.9	129,946.2	3.79	6.01	0.67
	4	Jasa Penunjang Keuangan	234.3	355.0	3.42	6.30	0.00
L		Real Estate	206,523.1	278,937.8	6.78	4.19	1.43
M,N		Jasa Perusahaan	39,878.6	59,172.7	4.27	4.24	0.30

O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	878,320.9	1,425,745.0	4.54	5.78	7.32
P	Jasa Pendidikan	658,116.9	988,411.4	5.68	5.50	5.07
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69,129.2	92,966.0	6.75	5.45	0.48
R,S,T,U	Jasa lainnya	133,218.8	178,773.5	5.54	5.03	0.92
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS	13,001,259.6	19,487,941.3	5.15	5.05	100.00

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan

***)Angka Proyeksi

Berdasarkan tabel 3.8 pada tahun 2018 diperkirakan laju pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan menjadi 5,15%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan 2017. Begitu juga dengan laju inflasi daerah diperkirakan tetap berada pada kisaran 5%, yaitu diproyeksikan sebesar 5,05%, naik tipis dibandingkan dengan laju inflasi daerah tahun 2017. Namun demikian, jika dibandingkan antara proyeksi laju pertumbuhan ekonomi dengan proyeksi inflasi, maka hal ini mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan daya beli masyarakat dibandingkan dengan kondisi tahun 2017.

Kondisi dimaksud di atas, tentunya akan dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi nasional yang diharapkan semakin kondusif, membaiknya daya beli masyarakat, realisasi proyek infrastruktur yang tentunya akan mempunyai kontribusi positif terhadap semakin berkembangnya sektor konstruksi dan sektor jasa, sehingga akan memberikan pengaruh pula terhadap sektor pengangkutan dan komunikasi. Selain itu pengaruh positif juga didukung karena semakin meningkatnya keyakinan pelaku ekonomi, sehingga secara otomatis berpengaruh kepada peningkatan pertumbuhan dari sektor-sektor lainnya, seperti sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor; sektor penyediaan akomodasi dan makan minum; sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor Listrik, gas dan air bersih serta sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Perkembangan sektor perdagangan dan sektor penyediaan makan dan minum dipengaruhi dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata di Kabupaten Bangkalan dengan Jembatan Suramadu dan wisata kuliner sebagai calon penggerak utama ekonomi pariwisata.

Adapun prospek ekonomi yang diharapkan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan yang memprioritaskan penanganan infrastruktur tentunya akan berdampak pada perekonomian masyarakat. Pada Tahun 2018, akan dilaksanakan pembangunan infrastruktur antara lain: jalan, jembatan, jaringan irigasi serta infrastruktur pendukung lainnya.

2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan

Salah satu pilar dalam pembangunan adalah sumber daya manusia, oleh karena itu pendidikan menjadi faktor utama baik dari sisi pemerataan pendidikan dan kualitas. Kesehatan menjadi prioritas terpenting setelah pendidikan. Menurunnya angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, meningkatnya rasio dokter/puskesmas/perawat menjadi salah satu bagian terpenting dalam bidang kesehatan.

3. Pertumbuhan ekonomi dan arus investasi yang mulai menunjukkan peningkatan.

Proyeksi melambannya pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 dan peningkatan kembali pada Tahun 2016, diharapkan akan terus dilanjutkan trend kenaikannya pada tahun 2017 dan 2018. Namun demikian kondisi tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya kebijakan Regional dan Nasional. Pertumbuhan ekonomi yang positif dan dengan terjadinya perkembangan wilayah di Kabupaten Bangkalan diharapkan menimbulkan multiplier efek yang besar. Dampak ekonomi yang tinggi tersebut diperkirakan mampu mengalirkan investasi terutama perdagangan, industri dan jasa ke Pulau Madura khususnya Kabupaten Bangkalan.

4. Peningkatan Penyerapan Tenaga Kerja.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan mengalirnya investasi ke Kabupaten Bangkalan diharapkan terjadi penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut terutama diharapkan terjadi di sektor-sektor sekunder dan tersier karena pemulihan perekonomian pada sektor-sektor tersebut akan menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan sektor primer yaitu pertanian dan pertambangan. Diharapkan pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja yang terserap lebih banyak lagi dengan terselesaikannya beberapa pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan investasi dan menumbuhkan lapangan kerja baru.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban

daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan.

Otonomi daerah yang telah digulirkan melalui Undang-Undang Pemerintahan daerah sebenarnya memberikan kesempatan yang seluas luasnya kepada Pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur dan aktifitas lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam era otonomi daerah, pemerintah pusat telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah. Konsekuensi dari pelimpahan kewenangan tersebut diikuti oleh pelimpahan pembiayaan melalui dana transfer. Dengan adanya dana transfer seperti Dana Perimbangan (DAU, DAK, DBH, dll), pemerintah daerah diharapkan mampu menjalankan bidang-bidang kewenangan yang diberikan.

Disisi lainnya, dana transfer yang diberikan kepada daerah, nampaknya masih belum mampu mendukung pemerintah daerah di dalam menjalankan kewenangan yang diberikan. Program-program pembangunan kurang berjalan secara optimal karena keterbatasan anggaran pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena sebagian APBD pemerintah daerah hanya untuk belanja pegawai (gaji), sehingga pemerintah daerah kurang leluasa di dalam mengkreasi program-program pembangunan sebagai akibat keterbatasan pembiayaan. Meningkatnya tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekuensi penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, pengelolaan pendapatan daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Terkait dengan manajemen keuangan daerah, dalam perencanaan pembangunan keuangan daerah ke depan setidaknya ada dua hal krusial yang mendesak untuk dikelola dan dikembangkan secara profesional. Pertama, sistem informasi manajemen keuangan. Sistem ini diharapkan mampu memberikan informasi secara cepat mengenai kinerja keuangan daerah seperti kegiatan apa

saja yang sudah terlaksana, apa hasil dan manfaatnya bagi masyarakat dalam jangka menengah dan jangka panjang. Selain itu, sistem ini juga diperkirakan dapat mempercepat proses perhitungan dan laporan pertanggungjawaban anggaran oleh Pemerintah Daerah. Kedua, pengelolaan aset-aset daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah. Secara umum pemerintah daerah memiliki sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, namun demikian peningkatan tersebut masih belum dapat mencukupi seluruh kebutuhan penyelenggaran pembangunan di daerah. Untuk itu Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah diarahkan untuk mengoptimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, optimalisasi pengelolaan aset dan kekayaan daerah serta optimalisasi kontribusi BUMD. Pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup salah satunya adalah bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

Sumber pendapatan yang bersumber dari pemerintah dalam rangka perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diperoleh

berdasarkan asas desentralisasi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil. Realisasi anggaran pendapatan daerah tahun 2016, dan proyeksi pendapatan daerah tahun 2018, tercantum pada tabel berikut:

Tabel 3.9.
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2017 dan 2018

NO	URAIAN	Perubahan APBD 2016	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)***	Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018***
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	205,282,983,307.11	134,727,955,949.75	189.887.253.465,23.	191.977.619.037,38
1.1.1	Pajak Daerah	28,210,454,463.76	32,294,008,793.00	28.200.454.463,76	29.031.483.212,69
1.1.2	Retribusi Daerah	16,076,567,806.00	15,223,997,579.06	15.981.767.806,00	18.822.987.469,03
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1,818,642,737.00	1,818,642,737.00	1.818.642.737,00	1.890.903.773,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	159,177,318,300.35	85,391,306,840.69	143.886.388.458,47	142.232.244.582,66
1.2	DANA PERIMBANGAN	1,487,724,625,190.96	1,354,664,114,508.00	1.484.637.208.670,00	1.703.215.902.098,00
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	101,217,816,045.96	89,023,681,508.00	81.540.064.000,00	105.999.986.726,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	957,258,254,495.00	1,012,242,530,000.00	1.048.898.713.670,00	1.094.740.296.195,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	429,248,554,650.00	253,397,903,000.00	354.198.431.000,00	502.475.619.177,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	303,096,094,293.90	277,080,711,423.00	68.780.767.000,00	439.013.059.458,10
1.3.1	Hibah	2,629,595,700.00	2,167,083,000.00	-	2.703.256.500,00
1.3.2	Dana Darurat	0.00	0.00	-	-
1.3.3	Bagi hasil pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah lainnya	109,461,536,718.00	83,383,224,377.00	74.160.790.618,00	101.224.425.757,10

NO	URAIAN	Perubahan APBD 2016	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)***	Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018***
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	178,481,051,000.00	178,481,051,000.00	270.865.863.000,00	316.975.203.825,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi Pemerintah Daerah Lainnya	12,494,320,000.00	12,394,320,000.00	-	17.938.060.350,00
1.3.6	Lain-lain Penerimaan	29,590,875.90	655,033,046.00	29.590.875,90	172.113.026,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)		1,996,103,702,791.97	1,766,472,781,880.75	2.019.580.706.629,13	2.334.206.580.597,48

Sumber :

***)Angka Proyeksi

Tabel 3.10.
Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2017 dan 2018

No	URAIAN	Perubahan APBD 2016	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)***	Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018***
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,185,908,490,793.40	1,167,218,646,152.50	1.257.632.643.928,13	1.491.702.620.602,31
2.1.1	Belanja pegawai	861,764,782,604.50	846,155,901,596.92	854.004.938.640,33	1.040.873.170.783,23
2.1.2	Belanja bunga	7,318,366,927.00	7,318,366,927.00	6.391.842.313,00	6.239.800.000,00
2.1.3	Belanja subsidi	0.00	0.00	0,00	-
2.1.4	Belanja hibah	21,782,840,000.00	20,993,126,000.00	50.266.500.000,00	17.115.000.000,00
2.1.5	Belanja bantuan sosial	340,000,000.00	137,000,000.00	340.000.000,00	315.000.000,00
2.1.6	Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah Desa*	2,000,000,000.00	1,987,949,700.00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa*	292,202,501,261.90	290,626,301,928.58	343.129.362.974,80	423.659.649.819,08
2.1.8	Belanja tidak terduga	500,000,000.00	0.00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
2.2	Belanja Langsung	981,210,129,998.42	613,224,033,450.56	779.138.176.635,00	925.051.383.024,17
2.2.1	Belanja pegawai	203,932,316,460.81	122,425,190,048.46		195.657.905.100,00
2.2.2	Belanja barang dan jasa	218,673,214,488.00	94,865,183,886.00		247.209.207.000,80

No	URAIAN	Perubahan APBD 2016	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)***	Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018***
2.2.3	Belanja modal	558,604,599,049.61	395,933,659,516.10		482.184.270.923,37
JUMLAH BELANJA (2.1+2.2)		2,167,118,620,791.82	1,780,442,679,603.06	2.036.770.820.563,13	2.416.754.003.627,48

Sumber :

***)Angka Proyeks

Tabel 3.11.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2016 dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2017 dan 2018

No	URAIAN	Perubahan APBD 2016	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)***	Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018***
3.1	Penerimaan pembiayaan	198,010,684,366.25	197,494,091,004.25	52.373.793.162,00	126.909.923.030,00
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	197,494,091,004.25	197,494,091,004.25	36.857.199.800,00	126.393.329.668,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0.00	0.00	15.000.000.000,00	0.00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahka	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.7	Penerimaan kembali investasi Pamarintah Daerah	516,593,362.00	0.00	516.593.362,00	516.593.362,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan	26,995,766,366.40	25,616,839,614.00	35.183.679.228,00	44.362.500.000,00
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	7,500,000,000.00	7,500,000,000.00	0.00	0.00
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	3,400,000,000.00	2,500,000,000.00	3.950.000.000,00	10.762.500.000,00
3.2.3	Pembayaran pokok utang	16,095,766,366.40	15,616,839,614.00	31.233.679.228,00	33.600.000.000,00
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	0.00	0.00	0.00	0.00

No	URAIAN	Perubahan APBD 2016	Realisasi APBD Tahun 2016	APBD Tahun 2017 (Tahun Berjalan)***	Proyeksi/Target RKPD Tahun 2018***
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1+3.2)	171,014,917,999.85	171,877,251,390.25	17.190.113.934,00	82.547.423.030,00

Sumber :

***)Angka Proyeksi

Dari Tabel di atas, RKPD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 untuk rencana penerimaan pembiayaan pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp.126.909.923.030,00. Penerimaan tersebut terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp. 126.909.923.030,00, dan Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah sebesar Rp. 516.593.362,00. Sedangkan Rencana pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2018 direncanakan sebesar Rp. 44.362.500.000,00. Pengeluaran pembiayaan tersebut dialokasikan untuk Penyertaan Modal (Investasi) Daerah sebesar Rp. 10.762.500.000,00 dan Pembayaran Pokok Hutang sebesar Rp.33.600.000.000,00.

3.2.1.1. Arah kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah, pemerintah Kabupaten Bangkalan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik dari sisi pajak daerah maupun dari sisi retribusi daerah dengan cara melakukan peningkatan intensifikasi pajak daerah serta menggali inovasi baru dalam intensifikasi pajak daerah. Langkah ini akan mampu meningkatkan Pajak dan Retribusi Daerah. Optimalisasi pengelolaan BUMD juga merupakan salah satu alternatif dalam rangka kebijakan pendapatan daerah. BUMD sebagai kepanjangan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik, motor perekonomian, dan sebagai sumber pendapatan daerah harus menerapkan prinsip-prinsip GCG sehingga BUMD akan mampu meningkatkan perannya dalam perekonomian daerah.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang didukung dengan sistem administrasi yang jelas, kemudahan dalam pemungutan pajak dan retribusi, aparatur yang profesional, dan dukungan teknologi informasi yang handal. Selain itu, aparatur dan SKPD penghasil harus didukung dengan *rewards* yang memadai dan *punishment* yang jelas ketika tidak sesuai target dan aturan yang berlaku.

3.2.1.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kerangka belanja daerah tahun 2018, mengacu pada program prioritas RPJMD Kabupaten Bangkalan tahun 2013-2018 yang telah dilakukan perubahan. Selain itu, kerangka belanja daerah juga memperhatikan RKPD Provinsi Jawa timur 2018 serta prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018. Dengan menyeleraskan prioritas dan sasaran kebijakan Provinsi Jawa Timur dan kebijakan nasional, maka dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah Kabupaten Bangkalan agar tetap terarah,

efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah Kabupaten Bangkalan tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah dikelola sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (performance based) dalam rangka mendukung capaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana ditetapkan dalam P-RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2013-2018.
- 2) Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai program-program yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur dalam rangka pertumbuhan ekonomi dengan penguatan potensi dan pemberdayaan masyarakat. Belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung peningkatan daya saing daerah, khususnya dalam pengembangan infrastruktur penunjang perekonomian.
- 3) Pengalokasian Belanja daerah mengedepankan prinsip efisien, efektif dan ekonomis;

3.2.1.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan daerah pada intinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja daerah, apakah anggaran surplus atau defisit. Pada Tahun 2018, APBD Kabupaten Bangkalan diproyeksikan mengalami defisit. Defisit anggaran ini dibiayai dari SiLPA pada tahun sebelumnya. SiLPA dari tahun ke tahun diharapkan terus menurun, karena SiLPA sebagai salah satu tolak ukur tingkat kesinergian antara perencanaan dan penganggaran. Oleh karena itu, agar kebijakan pembiayaan daerah lebih terarah dan memberikan kontribusi yang positif di dalam upaya menggali alternatif sumber-sumber pembiayaan pembangunan, maka kebijakan pembiayaan daerah diarahkan sebagai berikut:

- 1) Penerimaan pembiayaan daerah diarahkan untuk pengelolaan SiLPA dan diharapkan SiLPA akan menjadi bagian dari pendapatan pada periode anggaran berikutnya.
- 2) Pengeluaran Pembiayaan Daerah diarahkan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi), dan pembayaran pokok utang.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018, ditetapkan visi pembangunan jangka menengah daerah adalah :

“TERWUJUDNYA BANGKALAN YANG MAKMUR, MANDIRI DAN AGAMIS”

Visi tersebut mengandung makna :

a. Bangkalan Makmur

Mewujudkan masyarakat makmur merupakan amanah Undang–Undang Dasar (UUD) 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan oleh seorang Pemimpin Daerah. Makmur adalah masyarakat yang sejahtera lahir batin, berkeadilan, bermartabat, serta bebas dari belenggu diskriminasi.

b. Mandiri

Adalah kondisi kehidupan masyarakat usia produktif yang mampu mengakses lapangan kerja (secara sosial ekonomi), sehingga mampu menopang *dependency ratio* (rasio ketergantungan) usia non produktif.

c. Agamis

Adalah kondisi kehidupan masyarakat yang menjaga kelestarian nilai–nilai agama. Budaya Madura yang dikenal agamis perlu ditingkatkan yang tercermin dalam peningkatan ketaatan beragama dan kehidupan masyarakat yang berakhlakul karimah. Selanjutnya visi tersebut dijabarkan dalam misi :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif, Berkualitas Dan Berdaya Saing;
2. Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal;
3. Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi;
4. Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan;
5. Mengembangkan Infrastruktur Bernilai Tambah Tinggi;
6. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien Serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik.

Memperhatikan Visi RPJMD Kabupaten Bangkalan 2013 - 2018, Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur serta Visi RPJMN, memiliki keterkaitan yang saling melengkapi. Sebagaimana diketahui bahwa Visi RPJMN adalah : ***“Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur”*** dan Visi RPJMD Provinsi Jawa Timur adalah : ***“lebih sejahtera, berkeadilan mandiri, berdaya saing dan berakhlak”*** maka Visi RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Timur dan RPJMD Kabupaten Bangkalan, mengarah pada tujuan yang sama yaitu mewujudkan masyarakat yang **adil** dan **makmur** sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Dasar 1945.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa, Tahun 2018 merupakan pembangunan tahap keempat (2015-2019) dalam dokumen RPJPD 2005-2025 Kabupaten Bangkalan, pada tahap ini, ditujukan untuk lebih dimantapkan secara menyeluruh penataan kembali disegala bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian yang berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kabupaten Bangkalan yang merupakan bagian dari Provinsi Jawa Timur mempunyai peluang strategis sebagai bagian dari konsep Gerbang *Kertosusila Plus*. Posisi ini sangat menguntungkan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi masyarakat yang saling memperkuat antar wilayah. Hal ini dapat diupayakan dengan melakukan upaya kerjasama antar wilayah baik yang bersifat bilateral maupun multilateral antar wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Pada pembangunan tahap keempat ini diperlukan faktor pendukung dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang diharapkan menjadi daya tarik investor yaitu pemenuhan infrastruktur dasar sehingga dilakukan langkah-langkah strategis seperti penyediaan kebutuhan energi listrik dan air untuk perkembangan kawasan industri dan perumahan.

Pada aspek pemerintahan dan aparatur tetap mengoptimalkan kebijakan yang telah dilakukan pada tahap kedua yaitu dengan tetap melakukan optimalisasi kinerja Pemerintah Daerah termasuk didalamnya pengelolaan aspek pembangunan politik dan hukum. Melalui pemantapan kinerja ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat yang menciptakan kondusivitas masyarakat dan terwujudnya transformasi komunikasi dan informasi. Disamping itu untuk mendukung kemudahan didalam berinvestasi di

Kabupaten Bangkalan melakukan pengembangan sistem dan prosedur pelayanan perijinan dengan berbasis teknologi informasi.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Guna mewujudkan misi tersebut diatas, ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Tahun 2018, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian dan beriman.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :

- a. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan
- b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
- c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana
- d. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah
- e. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)

- 2) Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas:

- a. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha
- b. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah
- c. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas
- d. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah)
- e. Meningkatnya ketahanan pangan daerah
- f. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif
- g. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan

- 3) Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi.

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :

- a. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah
- b. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan

- 4) Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
- a. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup
 - b. Meningkatnya pemanfaatan sumber daya alam dan energi
- 5) Optimalisasi pembangunan infrastruktur daerah.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
- a. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan
 - b. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air
 - c. Meningkatnya kualitas permukiman
 - d. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
- 6) Peningkatantransparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan diatas adalah :
- a. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
 - b. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif
 - c. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan
 - d. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik
 - e. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien
 - f. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah
 - g. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
 - h. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian
 - i. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif
 - j. Terpenuhinyan kebutuhan data statistik
 - k. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa
 - l. Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan

- m. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan SKPD
- n. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat
- o. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana
- p. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri

Tabel 4. 1.
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Bangkalan Yang Agamis, Produktif, Berkualitas Dan Berdaya Saing;	1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar berdaya saing, berkepribadian dan beriman.	1. Meningkatnya kualitas dan pemerataan pendidikan 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 3. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan pemantapan keluarga berencana 4. Meningkatnya potensi pemuda, olahraga dan seni budaya daerah 5. Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial utamanya untuk PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial)
2. Mempercepat Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Lokal;	2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.	1. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha 2. Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung pertumbuhan daerah

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas 4. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) 5. Meningkatnya ketahanan pangan daerah 6. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif 7. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
	3. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi.	1. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah 2. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
2. Mengembangkan Peran Dunia Usaha Dan Investasi;	2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.	1. Terciptanya peningkatan kualitas dan perlindungan bagi tenaga kerja serta penciptaan lapangan kerja/berusaha 2. Meningkatnya kualitas koperasi dan UKM (Usaha Kecil Menengah) 3. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif
	3. Peningkatan investasi yang berdaya dukung tinggi.	1. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah 2. Peningkatan perlindungan konsumen, pelayanan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan
3. Mengelola Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan;	2. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.	1. Meningkatnya produksi, produktivitas dan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas 2. Meningkatnya ketahanan pangan daerah

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		3. Meningkatnya produksi sektor industri kecil dan menengah dan industri kreatif 4. Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan
	3. Peningkatan potensi dan daya saing daerah serta pertumbuhan ekonomi.	1. Meningkatnya investasi/penanaman modal daerah
	4. Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.	1. Meningkatnya kualitas SDA dan lingkungan hidup 2. Meningkatnya Pemanfaatan SDA dan Energi 3. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air 4. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan 5. Meningkatnya kondisi infrastruktur dan konservasi sumber daya air 6. Meningkatnya kualitas permukiman

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		7. Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi
6. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Efisien Serta Berorientasi Pada Pelayanan Publik.	6. Peningkatan transparansi, profesionalisme, produktivitas aparatur, pelayanan publik dan peran serta masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan.	1. Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) 2. Terwujudnya manajemen perencanaan yang efektif 3. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan dan peningkatan kualitas layanan kependudukan 4. Meningkatnya kualitas layanan publik melalui tata pemerintahan yang baik 5. Meningkatnya fungsi kesekretariatan dan pengembangan lembaga Pemerintahan yang professional, efektif dan efisien 6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan asset daerah

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		7. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan 8. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas pegawai serta layanan kepegawaian 9. Meningkatnya peran serta lembaga legislatif sebagai mitra eksekutif dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan dan peningkatan layanan kepada masyarakat secara lebih efektif 10. Terpenuhinya kebutuhan data statistik 11. Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media masa 12. Tersedianya calon transmigran yang siap di berangkatkan ke tempat tujuan 13. Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah dan SKPD

Visi: Menuju Bangkalan Makmur, Mandiri dan Agamis		
MISI	TUJUAN	SASARAN
		14. Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat 15. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana 16. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme anggota korpri

4.2 Prioritas Pembangunan

Bertolak dari kemajuan yang telah dicapai dalam Tahun 2015 dan tahun 2016 serta perkiraan capaian Tahun 2017, ternyata kondisi yang ada masih menunjukkan permasalahan dan tantangan yang harus diatasi dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2018. Permasalahan dan tantangan Tahun 2018 tersebut yaitu :

- 1) Belum Optimalnya Pemenuhan Hak Dasar Masyarakat Utamanya Pendidikan Dan Kesehatan;
- 2) Laju Perekonomian Yang Relatif Lambat;
- 3) Angka Kemiskinan Relatif Cukup Tinggi Dan Masih Terbatasnya Perluasan Dan Penyediaan Lapangan Kerja;
- 4) Disparitas/ Kesenjangan Kota dan Desa;
- 5) Belum Memadainya Infrastruktur Daerah;
- 6) Masih Belum Mandiriya Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Daerah;

Dari permasalahan-permasalahan dan tantangan yang ada di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 tersebut diatas dan mempertimbangkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi, sesuai dengan tema Pembangunan Tahun 2018 yaitu **Peningkatan Daya Saing Investasi Melalui Pembangunan Infrastruktur Strategis Dan Optimalisasi Sumber Daya Alam Yang Berelanjutan**, maka ditetapkan prioritas pembangunan sebagai berikut :

- 1) Percepatan pembangunan infrastruktur
- 2) Penguatan potensi ekonomi kerakyatan
- 3) Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
- 4) Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat
- 5) Peningkatan derajat kesehatan
- 6) Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa
- 7) Perwujudan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya.

4.3. Koneksitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Program Nawacita Jokowi-JK

Sebagai bagian dari Republik Indonesia, Kabupaten Bangkalan juga berpegang teguh pada rencana kerja dari Pemerintah Pusat. Dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, program kerja yang dicanangkan adalah Nawacita. Program Nawacita terdiri 9 Program yang dicanangkan sebagai tonggak pembangunan nasional yang seyogyanya akan diadaptasi oleh seluruh wilayah di Indonesia. Ke-9 Nawacita itu adalah:

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Marta terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritime,
- 2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan,
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,
- 4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019,
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya,

- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia,
- 9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga,

Adapun keselarasan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan program Nawacita Jokowi dapat dilihat pada tabel 4.2. di bawah ini.

Tabel 4.2.
Koneksitas Nawacita dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018

Program Nawacita Jokowi-JK	Prioritas Kabupaten Bangkalan 2018
1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Marta terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	7) Perwujudan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya.
2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.	6) Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 7) Perwujudan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya.

Program Nawacita Jokowi-JK	Prioritas Kabupaten Bangkalan 2018
3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.	1) percepatan pembangunan infrastruktur 2) penguatan potensi ekonomi ekonomi kerakyatan 6) Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa
4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.	6) Pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa 7) Perwujudan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya.
8) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; dengan wajib belajar 12 Tahun bebas pungutan; peningkatan layanan kesehatan masyarakat dengan menginisiasi kartu "Indonesia Sehat" serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong <i>land reform</i> dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.	1) percepatan pembangunan infrastruktur 2) penguatan potensi ekonomi kerakyatan 4) peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat 5) Peningkatan derajat kesehatan
9) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.	1) Percepatan pembangunan infrastruktur 2) meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan 3) Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup. 4) peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat

Program Nawacita Jokowi-JK	Prioritas Kabupaten Bangkalan 2018
	6) Pemberdayaa Masyarakat dan pemerintah desa
7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.	1) percepatan pembangunan infrastruktur 2) Penguatan potensi Ekonomi masyarakat 3) peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian lingkungan hidup 4) Peningkatkan derajat pendidikan masyarakat 6) Pemberdayaa Masyarakat dan pemerintah desa
8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.	4) Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat
9) Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.	4) Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat

Tabel sinkronisasi 4.2. tersebut menunjukkan bahwa semua program Nawacita dapat dihubungkan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Namun, pada tabel 4.3. menunjukkan bahwa jika dilihat dari alokasi pagu anggaran, maka seluruh program dan anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sesungguhnya telah mengakomodir seluruh program Nawacita tersebut. Mengapa, karena tema kebangsaan terdapat

dengan jelas pada program dan kegiatan pada SKPD Yang khusus seperti Bakesbangpol dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sedangkan program dan kegiatan yang berhubungan dengan tata kelola tersebar dalam program dan kegiatan seluruh SKPD.

Tabel 4.3 juga menunjukkan bahwa alokasi anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan yang paling tinggi terdapat pada program Nawacita no. 5, yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019 sebesar 40.07%. Hal tersebut sesuai dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Bangkalan di tahun 2018 yang lebih menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Tabel 4.3.
Sinkronisasi Anggaran Pada Setiap Program Pembangunan Pemerintah Pusat (NAWACITA) dengan Anggaran Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.	1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.000.000		1) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		2) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	198.000.000		
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	9.555.000.000		
		5) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	135.000.000		
		6) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	495.000.000		
		7) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	150.000.000		
		8) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	125.000.000		
		9) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	150.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		10) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.000.000		2) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		12) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.485.000.000		
		13) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	50.000.000		
		14) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	350.000.000		
		15) Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.885.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		16) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		3) KECAMATAN BANGKALAN
		17) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.182.630.000		
		18) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		4) KECAMATAN SOCAH
		19) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	519.254.800		
		20) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		5) KECAMATAN KAMAL

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		21) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	337.000.000		
		22) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		6) KECAMATAN LABANG
		23) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		24) Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		25) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		7) KECAMATAN MODUNG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		26) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	392.412.050		
		27) Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		28) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		8) KECAMATAN KWANYAR
		29) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		30) Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		31) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		9) KECAMATAN TRAGAH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		32) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	421.333.600		
		33) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		10) KECAMATAN BLEGA
		34) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	592.129.200		
		35) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		11) KECAMATAN KONANG
		36) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	490.124.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		37) Program peningkatan kinerja kecamatan	9.750.000		
		38) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		12) KECAMATAN GALIS
		39) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	572.694.250		
		40) Program peningkatan kinerja kecamatan	15.750.000		
		41) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		13) KECAMATAN TANAH MERAH
		42) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	426.250.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		43) Program peningkatan kinerja kecamatan	15.000.000		
		44) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		14) KECAMATAN BURNEH
		45) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	185.000.000		
		46) Program peningkatan kinerja kecamatan	4.000.000		
		47) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		15) KECAMATAN AROSBAYA
		48) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	449.688.300		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		49) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		16) KECAMATAN GEGER
		50) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	256.873.500		
		51) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		17) KECAMATAN KLAMPIS
		52) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	503.353.000		
		53) Program peningkatan kinerja kecamatan	32.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		54) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		18) KECAMATAN TANJUNG BUMI
		55) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	457.568.750		
		56) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		19) KECAMATAN SEPULU
		57) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	398.015.200		
		58) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		20) KECAMATAN KOKOP

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		59) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	90.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS I			24.238.826.650	2.47%	
2	Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan	1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	990.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.157.300		2) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000		
		5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		6) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	575.177.500		
		7) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	950.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	450.000.000		
		9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.575.000.000		3) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		10) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		11) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		12) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.970.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		13) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	7.800.000.000		
		14) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	200.000.000		
		15) Program Pengelolaan Data Center	250.000.000		
		16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.000.000		4) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		17) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		18) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		19) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.798.084.255		
		20) Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.881.996.425		
		21) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.500.000		5) BAGIAN UMUM
		22) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		23) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		24) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		25) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	21.324.076.700		
		26) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.072.585.800		
		27) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100.000.000		
		28) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.580.866		6) BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		29) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		30) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	635.779.499		
		31) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	193.000.000		
		32) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	865.111.048		
		33) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000		7) BAGIAN ORGANISASI
		34) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.000.000		
		35) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		36) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	486.909.800		
		37) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	35.000.000		
		38) Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	171.000.000		
		39) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	58.000.000		
		40) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	105.000.000		
		41) Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	116.700.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		42) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	97.513.400		
		43) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.804.945.625		8) BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
		44) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76.583.925		
		45) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.152.650		
		46) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		47) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.617.689.700		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		48) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.381.812.700		
		49) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.250.000		9) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		50) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.300.000		
		51) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		52) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	677.300.000		
		53) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.500.000		10) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		54) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		
		55) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.000.000		
		56) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000		
		57) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		58) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	901.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		59) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	620.000.000		
		60) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.000.000		11) SEKRETARIAT DPRD
		61) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	475.000.000		
		62) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.184.001.499		
		63) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	6.179.001.499		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		64) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	22.804.629.853		
		65) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran	1.930.176.637		
		66) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.300.000		12) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		67) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.130.000		
		68) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		69) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	556.402.800		
		70) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600.000.000		13) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		71) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000		
		72) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		73) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.053.000.000		
		74) Program Pendidikan Kedinasan	700.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		75) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	4.880.000.000		
		76) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.169.500.000		
		77) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500.000.000		14) INSPEKTORAT
		78) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000		
		79) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		80) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.338.600.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		81) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	670.000.000		15) DINAS PERDAGANGAN
		82) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		83) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.065.200.000		
		84) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		16) KECAMATAN BANGKALAN
		85) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	713.400.000		
		86) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.771.800		17) KECAMATAN SOCAH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		87) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		88) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.000		18) KECAMATAN KAMAL
		89) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000		
		90) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		19) KECAMATAN LABANG
		91) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000		
		92) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.000.000		20) KECAMATAN MODUNG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		93) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000		
		94) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.000.000		21) KECAMATAN KWANYAR
		95) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		
		96) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		22) KECAMATAN TRAGAH
		97) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.500.000		
		98) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		99) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.658.000		23) KECAMATAN BLEGA
		100) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000		
		101) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		102) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		24) KECAMATAN KONANG
		103) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.655.000		
		104) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		105) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.750.000		25) KECAMATAN GALIS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		106) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.738.550		
		107) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		108) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.269.000		26) KECAMATAN TANAH MERAH
		109) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		110) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		27) KECAMATAN BURNEH
		111) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		28) KECAMATAN AROSBAYA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		112) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		113) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000		29) KECAMATAN GEGER
		114) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		115) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000		30) KECAMATAN KLAMPIS
		116) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		31) KECAMATAN TANJUNG BUMI
		117) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		118) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		32) KECAMATAN SEPULU
		119) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.419.700		
		120) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		121) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.000.000		33) KECAMATAN KOKOP
		122) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.000.000		
		123) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		124) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		34) BADAN PENDAPATAN DAERAH
		125) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000		
		126) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		127) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.585.000.000		
		128) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892.450.000		35) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		129) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		130) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	265.000.000		
		131) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.089.050.000		
		132) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		36) DINAS KETAHANAN PANGAN
		133) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		134) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	895.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		135) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335.489.600		37) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		136) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		137) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.355.000.000		
		138) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		
		139) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.339.000.000		38) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		140) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000		
		141) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		142) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.560.936.333		
		143) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	845.600.000		39) DINAS PETERNAKAN
		144) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		145) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.062.208.255		
		146) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.400.000		40) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		147) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		148) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.733.396.050		
		149) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.185.000.000		41) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		150) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		151) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.085.000.000		
		152) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	765.000.000		42) DINAS PERIKANAN
		153) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		154) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.354.986.840		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		155) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		
		156) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		43) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		157) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		158) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.118.517.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS II			147.450.345.609	15.00%	
3	Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000		1) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.265.000.000		
		5) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	10.300.000.000		
		6) Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	23.337.620.000		
		7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28.951.500.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.545.000.000		
		9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.990.440.000		
		10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan	52.370.000.000		
		11) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	54.768.000.000		
		12) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	14.274.953.960		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512.327.900		2) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		14) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.770.050		
		15) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.228.509.850		
		16) Program Pengembangan Perumahan	13.750.000.000		
		17) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.770.000.000		
		18) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	20.336.256.612		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		19) Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas	4.806.000.000		
		20) Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	1.709.000.000		
		21) Program Perencanaan Sosial Budaya	625.000.000		3) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		22) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	800.000.000		
		23) Program Penyelenggaraan Penataan Ruag	500.000.000		
		24) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.350.000.000		4) DINAS PERHUBUNGAN
		25) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	391.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		26) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	3.221.550.000		
		27) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625.000.000		5) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		28) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		
		29) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		
		30) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		31) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	577.740.550		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		32) Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	250.000.000		
		33) Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	175.000.000		
		34) Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	2.900.000.000		
		35) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.300.000		6) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		36) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.209.400		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		37) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	594.131.690		
		38) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.665.000.000		7) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		39) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		40) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.150.957.592		
		41) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		42) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.283.071.249		
		43) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.450.000.000		
		44) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.746.932.808		
		45) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.969.030.600		
		46) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99.453.381		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		47) Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	4.198.800.000		8) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		48) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	332.000.000		9) DINAS PETERNAKAN
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS III			296.602.555.642	30.17%	
4	Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya	1) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.228.000.000		
		3) Program Pengembangan Data/Informasi	660.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		4) Program Pelaksanaan Audit TIK	184.285.000		2) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		5) Program Peningkatan SDM di Bidang Keamanan Informasi	291.870.000		
		6) Program Pelayanan Keamanan Informasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	285.000.000		
		7) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.945.000		3) BAGIAN HUKUM
		8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		10) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	591.000.000		
		11) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.075.000.000		
		12) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000		4) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		13) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	650.000.000		
		14) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.152.069.400		5) INSPEKTORAT

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		15) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan	150.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS IV			7.718.169.400	0.78%	
5	Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.302.050		1) DINAS PENDIDIKAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.772.021.420		
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		4) Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.115.543.050		
		5) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	33.447.599.817		
		6) Program Pendidikan Non Formal	191.674.000		
		7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.838.702.950		
		8) Program pengembangan lingkunagn sehat sekolah	1.712.833.192		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.807.967.750		2) DINAS KESEHATAN
		10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		11) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	17.498.788.411		
		12) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	95.000.000		
		13) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.283.324.025		
		14) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	93.392.624.107		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		15) Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000		
		16) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	956.665.000		
		17) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	438.560.000		
		18) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.840.190.000		
		19) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	660.720.000		
		20) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	150.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		21) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	16.394.400.000		
		22) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.075.000.000		
		23) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	80.000.000		
		24) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.431.967.500		
		25) Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.500.000.000		
		26) Program Keselamatan Kerja dan Olahraga	46.612.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		27) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	514.151.700		
		28) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.655.400		3) RSUD SYAMRABU
		29) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		30) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.532.650.000		
		31) Program Pembinaan Lingkungan Sosial	5.104.000.140		
		32) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	5.200.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		33) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	59.470.900		
		34) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	450.400.000		
		35) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.197.823.100		
		36) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	587.222.350		
		37) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	111.303.000.000		
		38) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.000.000		4) DINAS PERHUBUNGAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		39) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.550.000.000		
		40) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000		
		41) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		42) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	7.001.461.685		
		43) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	200.000.000		
		44) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6.525.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		45) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi	3.674.875.000		
		46) Program Perencanaan Transportasi	458.000.000		
		47) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450.000.000		5) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		48) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		49) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.050.000.000		
		50) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		51) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.495.000.000		
		52) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.478.000.000		
		53) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.750.000.000		
		54) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	420.000.000		
		55) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.160.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		56) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.391.530		6) BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		57) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		58) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	407.878.900		
		59) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		7) BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		60) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		61) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	628.190.600		
		62) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	575.000.000		8) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		63) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100.000.000		
		64) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	160.000.000		
		65) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	30.000.000		
		66) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.048.976.950		9) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		67) Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100.000.000		
		68) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	150.000.000		
		69) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	95.000.000		
		70) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	125.000.000		
		71) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-		
		72) Program Transmigrasi Lokal	69.187.800		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS V			393.984.531.327	40.07%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
6	Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya	1) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000		1) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		2) Program Peningkatan SDM Pengelolaan Infrastruktur TIK	100.000.000		2) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		3) Program Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	500.000.000		
		4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.184.000.000		3) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.500.000		
		6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		7) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.770.000.000		
		8) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	350.000.000		
		9) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		10) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	75.000.000		
		11) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	50.000.000		
		12) Program Keluarga Berencana	630.000.000		
		13) Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75.000.000		
		14) Program Pelayanan Kontrasepsi	350.000.000		
		15) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	620.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		16) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	200.000.000		
		17) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	70.000.000		
		18) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	60.000.000		
		19) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	50.000.000		
		20) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	90.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		21) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	60.000.000		
		22) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		4) DINAS SOSIAL
		23) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	140.000.000		
		24) Program Pembinaan Anak Terlantar	125.000.000		
		25) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		26) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	50.000.000		
		27) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	340.000.000		
		28) Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	190.000.000		
		29) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		5) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		30) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		31) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	879.315.000		
		32) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	20.300.000		
		33) Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	200.000.000		6) BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		34) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100.000.000		7) DINAS PERDAGANGAN
		35) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.296.105.500		8) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		36) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	1.027.100.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		37) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	612.945.390		9) DINAS KETAHANAN PANGAN
		38) Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan	271.771.985		
		39) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	204.000.000		10) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		40) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.148.589.000		
		41) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	110.000.000		
		42) Program Peningkatan Produksi Pertanian	2.375.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		43) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	1.631.900.000		
		44) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	21.110.000		
		45) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	183.000.000		11) DINAS PETERNAKAN
		46) Program Peningkatan SDM Petani	25.000.000		
		47) Program Pengembangan Nilai Budaya	110.000.000		12) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		48) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.017.743.100		
		49) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	477.375.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		50) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	841.150.000		
		51) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.200.000.000		
		52) Program Pengembangan Kemitraan	460.000.000		
		53) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	290.000.000		13) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		54) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	672.000.000		
		55) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	75.000.000		
		56) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	415.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		57) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	115.000.000		
		58) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	485.000.000		
		59) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	20.300.000.000		
		60) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	175.000.000		14) DINAS PERIKANAN
		61) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	-		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		62) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	75.000.000		
		63) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	75.000.000		
		64) Program Pengembangan Budidaya Perikanan	261.000.000		
		65) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut	-		
		66) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.450.000.000		
		67) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	750.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		68) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.000.000.000		
		69) Program Penataan Struktur Industri	310.000.000		15) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		70) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	814.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS VI			52.063.904.975	5.30%	
7	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik	1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	545.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	600.000.000		2) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.717.000.000		3) DINAS SOSIAL
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.341.201.700		
		5) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	330.000.000		
		6) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	800.000.000		
		7) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	512.750.000		4) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	190.000.000		
		9) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	211.226.500		
		10) Program Peningkatan Perekonomian Daerah	225.000.000		5) BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		11) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	422.416.200		6) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		12) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	149.843.800		
		13) Program Pelayanan Perijinan	131.106.640		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		14) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	240.000.000		7) DINAS PERDAGANGAN
		15) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	175.000.000		
		16) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	200.000.000		
		17) Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	719.215.950		
		18) Program Pembangunan/Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	8.706.688.600		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		19) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	200.000.000		
		20) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.167.950.000		8) BADAN PENDAPATAN DAERAH
		21) Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	595.774.000		
		22) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	328.000.000		9) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		23) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.043.500.000		10) DINAS PETERNAKAN
		24) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	200.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		25) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	30.000.000		11) DINAS PERIKANAN
		26) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	212.500.000		
		27) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	-		
		28) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	10.300.000.000		12) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS VII			31.294.173.390	3.18%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
8	Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia	1) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	16.495.748.200		1) DINAS PENDIDIKAN
		2) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.691.086.800		
		3) Program Peningkatan Operasional Pendidikan	3.128.717.950		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		4) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	303.600.000		2) BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS VIII			21.619.152.950	2.20%	
9	Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga	1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.965.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.000.000		2) DINAS PERHUBUNGAN
		3) Program Operasional Monitoring Issue Publik	750.000.000		3) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		4) Program Pengumpulan Jajak Pendapat/Survey	141.000.000		

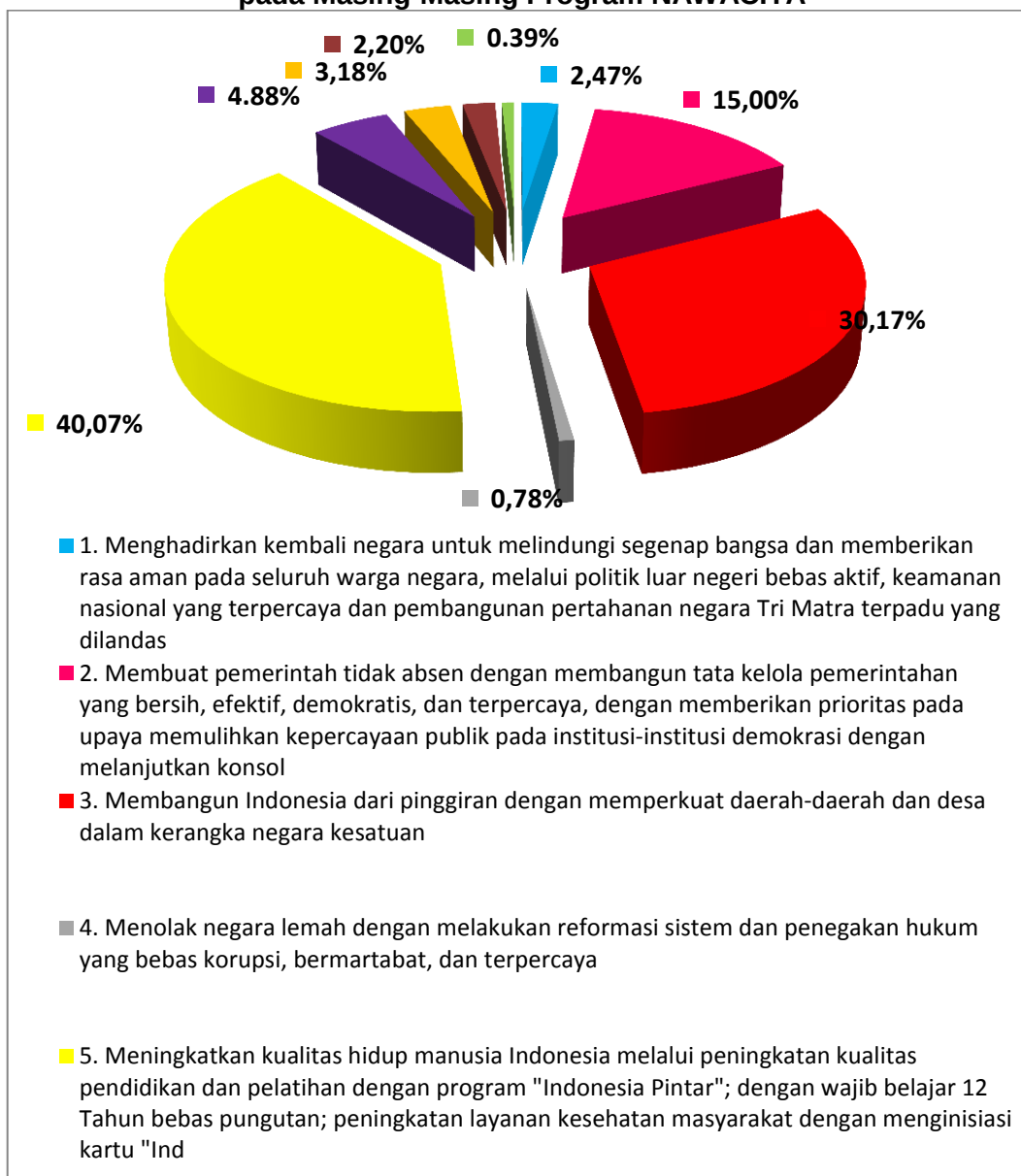
NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5) Program pengelolaan opini dan aspirasi publik	105.000.000		
		6) Program Layanan Pengaduan Masyarakat	50.000.000		
		7) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	50.000.000		
		8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.067.189.200		
		9) Program kerjasama informasi dan media massa	456.177.000		
		10) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	948.000.000		
		11) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	550.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		12) Program peningkatan SDM bidang TIK	500.000.000		
		13) Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	330.250.000		
		14) Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	116.380.000		4) BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		15) Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial	19.800.000		
		16) Program Pengembangan Wawasan Keagamaan	966.845.000		
		17) Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	19.800.000		
		18) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	24.500.000		5) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		19) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	35.000.000		6) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS IX			8.255.941.200	0.84%	
TOTAL PAGU SEMUA PROGRAM PRIORITAS			983.227.601.143	100%	

Porsi alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 pada masing-masing program Nawacita juga tergambarkan pada diagram *pie* 4.1 di bawah ini.

Gambar 4.1.
Persentase Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018
pada Masing-Masing Program NAWACITA



4.4. Koneksitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan dengan Program Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

Secara regional, Kabupaten Bangkalan berada dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Karena itu, selain menselaraskan program prioritas pembangunan dengan program Nawacita, pemerintah Kabupaten Bangkalan juga berusaha menselaraskan dengan prioritas pembangunan dari Provinsi Jawa Timur.

Program Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan).
- 2) Pengembangan Kualitas SDM.
- 3) Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran.
- 4) Pengembangan Industri dan Perdagangan.
- 5) Pengembangan Koperasi dan UMKM, serta Kelembagaan Pembiayaan.
- 6) Peningkatan Kedaulatan Pangan.
- 7) Peningkatan Infrastruktur.
- 8) Kemaritiman dan Kelautan.
- 9) Harmonisasi Sosial.

Keselarasan antara Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018 dapat terlihat pada tabel 4.4. di bawah ini. Pada tabel tersebut dapat terlihat bahwa telah terjadi keselarasan antara Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan 2018. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.4. di bawah ini:

Tabel 4.4.
Koneksitas Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dengan
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

Program Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017	Prioritas Kabupaten Bangkalan Tahun 2018
1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Peningkatan Mutu Pendidikan, dan Pembangunan Budaya dan Pariwisata	1. Percepatan pembangunan infrastruktur. 4. Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat.. 5. Peningkatan derajat kesehatan. 6. Pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa .
7. Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan yang Berdayasaing, Pengembangan Koperasi dan UMKM	2. Penguatan potensi ekonomi kerakyatan 3. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup 4. Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat
5. Kedaulatan Pangan	3. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
4. Peningkatan Infrastruktur	1. Percepatan pembangunan infrastruktur 7. Perwujudan Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya (diskusi dahulu)
2. Pembangunan Kemaritiman dan Kelautan	3. Peningkatan produktivitas pertanian dalam arti luas, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
4. Harmonisasi Sosial Yang Berakhlak Mulia	4. Peningkatan derajat pendidikan bagi masyarakat

Tidak hanya menggambarkan keselarasan program prioritas Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dengan program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, dokumen RKPD juga memberikan informasi tentang alokasi anggaran pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada masing-masing program prioritas pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2017 pada tabel 4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5.
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada Masing-Masing Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	PENINGKATAN MUTU PELAYANAN DASAR (PENDIDIKAN DAN KESEHATAN)	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.302.050		1) DINAS PENDIDIKAN
		2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.772.021.420		
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	16.495.748.200		
		5) Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.115.543.050		
		6) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	33.447.599.817		
		7) Program Pendidikan Non Formal	191.674.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.838.702.950		
		9) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.691.086.800		
		10) Program Peningkatan Operasional Pendidikan	3.128.717.950		
		11) Program pengembangan lingkungan sehat sekolah	1.712.833.192		
		12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.807.967.750		2) DINAS KESEHATAN
		13) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		14) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	17.498.788.411		
		15) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	95.000.000		
		16) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.283.324.025		
		17) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	93.392.624.107		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		18) Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000		
		19) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	956.665.000		
		20) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	438.560.000		
		21) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.840.190.000		
		22) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	660.720.000		
		23) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	150.000.000		
		24) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	16.394.400.000		
		25) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.075.000.000		
		26) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	80.000.000		
		27) Program Upaya Kesehatan Masyarakat			

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			13.431.967.500		
		28) Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.500.000.000		
		29) Program Keselamatan Kerja dan Olahraga	46.612.000		
		30) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	514.151.700		
		31) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.655.400		3) RSUD SYAMRABU
		32) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		33) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.532.650.000		
		34) Program Pembinaan Lingkungan Sosial	5.104.000.140		
		35) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	5.200.000		
		36) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	59.470.900		
		37) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan			

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			450.400.000		
		38) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.197.823.100		
		39) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	587.222.350		
		40) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	111.303.000.000		
		41) Program Pelayanan Kontrasepsi	350.000.000		4) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		42) Program Pengembangan Wawasan Keagamaan	966.845.000		5) BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		43) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	575.000.000		6) DINAS PERPUSTAKAAN

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					DAN KEARSIPAN
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS I			355.107.466.812	36.12%	
2	PENGEMBANGAN KUALITAS SDM	1) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.000.000		2) DINAS PERHUBUNGAN
		3) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	550.000.000		3) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		4) Program peningkatan SDM bidang TIK	500.000.000		
		5) Program Pelaksanaan Audit TIK	184.285.000		
		6) Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	330.250.000		
		7) Program Peningkatan SDM di Bidang Keamanan Informasi	291.870.000		
		8) Program Peningkatan SDM Pengelolaan Infrastruktur TIK	100.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		9) Program Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	500.000.000		
		10) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	350.000.000		4) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		11) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100.000.000		
		12) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	75.000.000		
		13) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	50.000.000		
		14) Program Keluarga Berencana	630.000.000		
		15) Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75.000.000		
		16) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	620.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		17) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	200.000.000		
		18) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	70.000.000		
		19) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	60.000.000		
		20) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	50.000.000		
		21) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	90.000.000		
		22) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	60.000.000		
		23) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		5) BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
		24) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		6) BAGIAN UMUM
		25) Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	116.380.000		7) BAGIAN ADMINISTRASI

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					KESEJAHTERAAN RAKYAT
		26) Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial	19.800.000		
		27) Program Peningkatan Perekonomian Daerah	225.000.000		8) BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		28) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.075.000.000		9) BAGIAN HUKUM
		29) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.152.650		10) BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
		30) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000		11) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		31) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	650.000.000		
		32) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000		12) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		33) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000		13) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		34) Program Pendidikan Kedinasan	700.000.000		
		35) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	4.880.000.000		
		36) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.169.500.000		
		37) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000		14) INSPEKTORAT
		38) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		15) KECAMATAN SOCAH
		39) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000		16) KECAMATAN LABANG
		40) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		17) KECAMATAN TRAGAH

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		41) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		18) KECAMATAN BLEGA
		42) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		19) KECAMATAN KONANG
		43) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		20) KECAMATAN GALIS
		44) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		21) KECAMATAN TANAH MERAH
		45) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		22) KECAMATAN AROSBAYA
		46) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		23) KECAMATAN GEGER
		47) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		24) KECAMATAN SEPULU
		48) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		25) KECAMATAN KOKOP
		49) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000		26) BADAN PENDAPATAN DAERAH
		50) Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan			

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Asli Daerah	595.774.000		
		51) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	1.027.100.000		27) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		52) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.283.071.249		28) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		53) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.746.932.808		
		54) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.969.030.600		
		55) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	35.000.000		29) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		56) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	204.000.000		30) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					DAN PERKEBUNAN
		57) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	1.631.900.000		
		58) Program Peningkatan SDM Petani	25.000.000		31) DINAS PETERNAKAN
		59) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	75.000.000		32) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		60) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	415.000.000		
		61) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	115.000.000		
		62) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	485.000.000		
		63) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.048.976.950		33) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		64) Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		65) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	150.000.000		
		66) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	125.000.000		
		67) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-		
		68) Program Transmigrasi Lokal	69.187.800		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS II			27.159.211.057	2.76%	
3	PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN	1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	330.000.000		1) DINAS SOSIAL
		2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	140.000.000		
		3) Program Pembinaan Anak Terlantar	125.000.000		
		4) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	50.000.000		
		6) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	340.000.000		
		7) Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	190.000.000		
		8) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	800.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS III			2.075.000.000	0.21%	
4	PENGEMBANGAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN	1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	545.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	670.000.000		2) DINAS PERDAGANGAN
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.065.200.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	240.000.000		
		6) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100.000.000		
		7) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	175.000.000		
		8) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	200.000.000		
		9) Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	719.215.950		
		10) Program Pembangunan/Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	8.706.688.600		
		11) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	200.000.000		
		12) Program Peningkatan Produksi Pertanian	2.375.000.000		3) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		13) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	95.000.000		4) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		14) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	10.300.000.000		
		15) Program Penataan Struktur Industri	310.000.000		
		16) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	814.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS IV			28.525.104.550	2.90%	
5	PENGEMBANGAN KOPERASI DAN UMKM, SERTA KELEMBAGAAN PEMBIAYAAN	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		1) DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	879.315.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	20.300.000		
		5) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	512.750.000		
		6) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	190.000.000		
		7) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	211.226.500		
		8) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	422.416.200		2) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		9) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	149.843.800		
		10) Program Pelayanan Perijinan	131.106.640		
		11) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	24.500.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		12) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.450.000.000		3) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS V			4.006.458.140	0.41%	
6	PENINGKATAN KEDAULATAN PANGAN	1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		1) DINAS KETAHANAN PANGAN
		2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	895.000.000		
		4) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	612.945.390		
		5) Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan	271.771.985		
		6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.148.589.000		2) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					DAN PERKEBUNAN
		7) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	328.000.000		
		8) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	110.000.000		
		9) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	21.110.000		
		10) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	183.000.000		3) DINAS PETERNAKAN
		11) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.043.500.000		
		12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	200.000.000		
		13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	332.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS VI			7.255.916.375	0.74%	
7	PENINGKATAN INFRASTRUKTUR	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000		1) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.265.000.000		
		5) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	10.300.000.000		
		6) Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	23.337.620.000		
		7) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28.951.500.000		
		8) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.545.000.000		
		9) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.990.440.000		
		10) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan	52.370.000.000		
		11) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	54.768.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		12) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	14.274.953.960		
		13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512.327.900		2) DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		14) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.770.050		
		15) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.228.509.850		
		16) Program Pengembangan Perumahan	13.750.000.000		
		17) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.770.000.000		
		18) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	20.336.256.612		
		19) Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas	4.806.000.000		
		20) Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air			

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Tanah	1.709.000.000		
		21) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	800.000.000		3) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		22) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000		
		23) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	200.000.000		4) DINAS PERHUBUNGAN
		24) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	391.000.000		
		25) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	3.221.550.000		
		26) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6.525.000.000		
		27) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi	3.674.875.000		
		28) Program Perencanaan Transportasi	458.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		29) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.495.000.000		5) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		30) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.478.000.000		
		31) Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	2.900.000.000		6) BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		32) Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	4.198.800.000		7) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS VII			307.326.603.372	31.26%	
8	KEMARITIMAN DAN KELAUTAN	1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	765.000.000		1) DINAS PERIKANAN
		2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.354.986.840		
		4) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		
		5) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	175.000.000		
		6) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	-		
		7) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	75.000.000		
		8) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	75.000.000		
		9) Program Pengembangan Budidaya Perikanan	261.000.000		
		10) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	30.000.000		
		11) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	212.500.000		
		12) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	-		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		13) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut	-		
		14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.450.000.000		
		15) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	750.000.000		
		16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.000.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS VIII			6.183.486.840	0.63%	
9	HARMONISASI SOSIAL	1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.965.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Perencanaan Sosial Budaya	625.000.000		
		3) Program Operasional Monitoring Issue Publik	750.000.000		2) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		4) Program Pengumpulan Jajak Pendapat/Survey	141.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5) Program pengelolaan opini dan aspirasi publik	105.000.000		
		6) Program Layanan Pengaduan Masyarakat	50.000.000		
		7) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	50.000.000		
		8) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.067.189.200		
		9) Program kerjasama informasi dan media massa	456.177.000		
		10) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	948.000.000		
		11) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.341.201.700		3) DINAS SOSIAL
		12) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.000.000		4) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		13) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	198.000.000		
		14) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		15) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	9.555.000.000		
		16) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	135.000.000		
		17) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	495.000.000		
		18) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	150.000.000		
		19) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	125.000.000		
		20) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	150.000.000		
		21) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.000.000		5) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		22) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		23) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.485.000.000		
		24) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan			

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
			50.000.000		
		25) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	350.000.000		
		26) Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.885.000.000		
		27) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	303.600.000		6) BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		28) Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	19.800.000		
		29) Program Pengembangan Nilai Budaya	110.000.000		7) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		30) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.017.743.100		
		31) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	477.375.000		
		32) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	841.150.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		33) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.200.000.000		
		34) Program Pengembangan Kemitraan	460.000.000		
		35) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	290.000.000		8) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		36) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	672.000.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS XI			28.293.236.000	2.88%	
10	NON PRIORITAS JATIM 2018	1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	990.000.000		1) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000		
		3) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.228.000.000		
		4) Program Pengembangan Data/Informasi	660.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.157.300		2) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		6) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000		
		7) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		8) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	575.177.500		
		9) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	950.000.000		
		10) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	450.000.000		
		11) Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	600.000.000		
		12) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000		
		13) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.000.000		3) DINAS PERHUBUNGAN

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		14) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.550.000.000		
		15) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000		
		16) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		17) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	7.001.461.685		
		18) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.350.000.000		
		19) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.575.000.000		4) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		20) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		21) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		22) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.970.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		23) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	7.800.000.000		
		24) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	200.000.000		
		25) Program Pelayanan Keamanan Informasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	285.000.000		
		26) Program Pengelolaan Data Center	250.000.000		
		27) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450.000.000		5) DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		28) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		29) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.050.000.000		
		30) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		
		31) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.750.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		32) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	420.000.000		
		33) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.160.000.000		
		34) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.000.000		6) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		35) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		36) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		37) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.798.084.255		
		38) Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.881.996.425		
		39) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.184.000.000		7) DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					PERLINDUNGAN ANAK
		40) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.500.000		
		41) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		42) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.770.000.000		
		43) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.717.000.000		8) DINAS SOSIAL
		44) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		45) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625.000.000		9) BADAN PENANGGULANGA N BENCANA DAERAH
		46) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		
		47) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan			

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		48) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	577.740.550		
		49) Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	250.000.000		
		50) Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	175.000.000		
		51) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.500.000		10) BAGIAN UMUM
		52) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		53) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		54) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	21.324.076.700		
		55) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.072.585.800		
		56) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		57) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.391.530		11) BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		58) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		59) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	407.878.900		
		60) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.580.866		12) BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		61) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000		
		62) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	635.779.499		
		63) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	193.000.000		
		64) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	865.111.048		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		65) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		13) BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		66) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		67) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	628.190.600		
		68) Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	200.000.000		
		69) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.945.000		14) BAGIAN HUKUM
		70) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		71) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000		
		72) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	591.000.000		
		73) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000		15) BAGIAN ORGANISASI

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		74) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.000.000		
		75) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		76) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	486.909.800		
		77) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	35.000.000		
		78) Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	171.000.000		
		79) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	58.000.000		
		80) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	105.000.000		
		81) Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	116.700.000		
		82) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	97.513.400		
		83) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.804.945.625		16) BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		84) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76.583.925		
		85) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		86) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.617.689.700		
		87) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.381.812.700		
		88) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.250.000		17) BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		89) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.300.000		
		90) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		91) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	677.300.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		92) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.500.000		18) BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
		93) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		
		94) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.000.000		
		95) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		96) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	901.000.000		
		97) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	620.000.000		
		98) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.300.000		19) BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		99) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.209.400		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		100) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	594.131.690		
		101) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.000.000		20) SEKRETARIAT DPRD
		102) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	475.000.000		
		103) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.184.001.499		
		104) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	6.179.001.499		
		105) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	22.804.629.853		
		106) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran	1.930.176.637		
		107) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.300.000		21) DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		108) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.130.000		
		109) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		110) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	556.402.800		
		111) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600.000.000		22) BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		112) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		113) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.053.000.000		
		114) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500.000.000		23) INSPEKTORAT
		115) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		116) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		117) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.338.600.000		
		118) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.152.069.400		
		119) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		24) KECAMATAN BANGKALAN
		120) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	713.400.000		
		121) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		122) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.182.630.000		
		123) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.771.800		25) KECAMATAN SOCAH
		124) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		125) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	519.254.800		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		126) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.000		26) KECAMATAN KAMAL
		127) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000		
		128) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		129) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	337.000.000		
		130) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		27) KECAMATAN LABANG
		131) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		132) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		133) Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		134) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.000.000		28) KECAMATAN MODUNG
		135) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		136) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		137) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	392.412.050		
		138) Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		139) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.000.000		29) KECAMATAN KWANYAR
		140) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		
		141) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		142) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		143) Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		144) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		30) KECAMATAN TRAGAH
		145) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.500.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		146) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		147) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	421.333.600		
		148) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.658.000		31) KECAMATAN BLEGA
		149) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000		
		150) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		151) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	592.129.200		
		152) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		32) KECAMATAN KONANG
		153) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.655.000		
		154) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		155) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	490.124.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		156) Program peningkatan kinerja kecamatan	9.750.000		
		157) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.750.000		33) KECAMATAN GALIS
		158) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.738.550		
		159) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		160) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	572.694.250		
		161) Program peningkatan kinerja kecamatan	15.750.000		
		162) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.269.000		34) KECAMATAN TANAH MERAH
		163) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		164) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	426.250.000		
		165) Program peningkatan kinerja kecamatan	15.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		166) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		35) KECAMATAN BURNEH
		167) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		168) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	185.000.000		
		169) Program peningkatan kinerja kecamatan	4.000.000		
		170) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		36) KECAMATAN AROSBAYA
		171) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		172) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	449.688.300		
		173) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000		37) KECAMATAN GEGER
		174) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		175) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	256.873.500		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		176) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000		38) KECAMATAN KLAMPIS
		177) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		178) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	503.353.000		
		179) Program peningkatan kinerja kecamatan	32.000.000		
		180) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		39) KECAMATAN TANJUNG BUMI
		181) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.000.000		
		182) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		183) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	457.568.750		
		184) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		40) KECAMATAN SEPULUH
		185) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.419.700		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		186) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		187) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	398.015.200		
		188) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.000.000		41) KECAMATAN KOKOP
		189) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.000.000		
		190) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		191) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	90.000.000		
		192) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		42) BADAN PENDAPATAN DAERAH
		193) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		194) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.585.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		195) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.167.950.000		
		196) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892.450.000		43) BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		197) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		198) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	265.000.000		
		199) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.089.050.000		
		200) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.296.105.500		
		201) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.665.000.000		44) DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		202) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		203) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.150.957.592		
		204) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		
		205) Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa	99.453.381		
		206) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335.489.600		45) DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		207) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		208) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.355.000.000		
		209) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		
		210) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100.000.000		
		211) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	160.000.000		

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		212) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan	30.000.000		
		213) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.339.000.000		46) DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		214) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000		
		215) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		216) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.560.936.333		
		217) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	845.600.000		47) DINAS PETERNAKAN
		218) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		219) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.062.208.255		

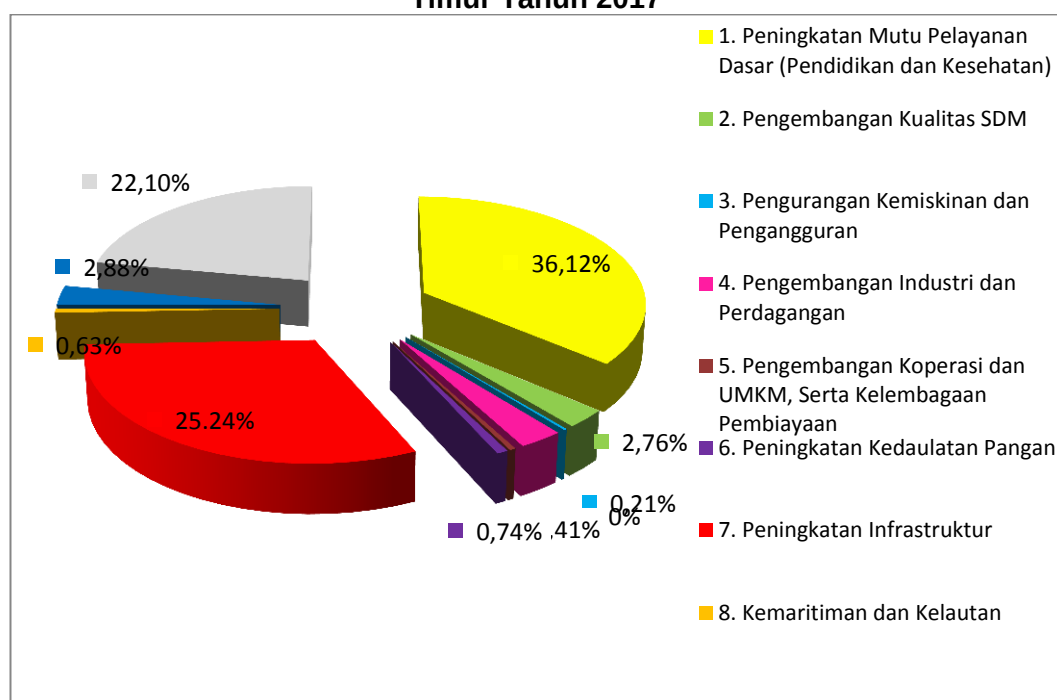
NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		220) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.400.000		48) DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		221) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		222) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.733.396.050		
		223) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.185.000.000		49) DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		224) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		225) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.085.000.000		
		226) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	20.300.000.000		
		227) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		50) DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	PRIORITAS PEMERINTAH JAWA TIMUR TAHUN 2017	NAMA PROGRAM KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2018	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		228) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		229) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.118.517.000		
TOTAL PAGU PROGRAM PRIORITAS IX			217.295.117.997	22.10%	
TOTAL PAGU SEMUA PROGRAM PRIORITAS			983.227.601.143	100%	

Sumber : Bappeda Kabupaten Bangkalan 2017 (Data diolah)

Selanjutnya, pada gambar 4.2 adalah gambaran persentase dari Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada Masing-Masing Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018. Prioritas anggaran terbesar dialokasikan untuk prioritas pembangunan provinsi yang pertama, yaitu Peningkatan Mutu Pelayanan Dasar (Pendidikan dan Kesehatan) dengan alokasi sebesar 36,12%. Sedangkan alokasi anggaran terbesar kedua berada pada prioritas pembangunan daerah Provinsi ketujuh, yaitu Peningkatan Infrastruktur dengan alokasi anggaran sebesar 31,26%.

Gambar 4.2.
Persentase Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 pada Masing-Masing Program Prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017



4.5. Pagu Indikatif Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun Anggaran 2018

Sebagai fungsi kontrol bagi pemerintah daerah, maka alokasi anggaran untuk setiap prioritas pembangunan juga disajikan dalam dokumen RKPD ini. Dengan begitu, pemerintah daerah juga akan mampu melakukan evaluasi terhadap besaran anggaran dibandingkan dengan urutan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan penjelasan mengenai kerangka pendanaan sebagaimana yang dijelaskan pada bab III, dan perumusan rancangan rencana kerja awal yang dilakukan oleh SKPD berdasarkan pertemuan forum OPD dan Kecamatan, maka dapat dihasilkan pagu indikatif per prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6.
Alokasi Anggaran Pada Setiap Prioritas Pembangunan Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Percepatan pembangunan infrastruktur	1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	10.300.000.000		1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	23.337.620.000		
		3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28.951.500.000		
		4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.545.000.000		
		5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.990.440.000		
		6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan	52.370.000.000		
		7. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	54.768.000.000		
		8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	14.274.953.960		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.770.000.000		2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		10. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	20.336.256.612		
		11. Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas	4.806.000.000		
		12. Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	1.709.000.000		
		13. Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	600.000.000		3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		14. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000		
		15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	200.000.000		4. DINAS PERHUBUNGAN
		16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.350.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	391.000.000		
		18. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	3.221.550.000		
		19. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6.525.000.000		
		20. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi	3.674.875.000		
		21. Program Perencanaan Transportasi	458.000.000		
		22. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	7.800.000.000		5. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		23. Program Operasional Monitoring Issue Publik	750.000.000		
		24. Program Pengumpulan Jajak Pendapat/Survey	141.000.000		
		25. Program pengelolaan opini dan aspirasi publik	105.000.000		
		26. Program Layanan Pengaduan Masyarakat	50.000.000		
		27. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	50.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		28. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.067.189.200		
		29. Program kerjasama informasi dan media massa	456.177.000		
		30. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	948.000.000		
		31. Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	550.000.000		
		32. Program peningkatan SDM bidang TIK	500.000.000		
		33. Program Pelaksanaan Audit TIK	184.285.000		
		34. Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	330.250.000		
		35. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	200.000.000		
		36. Program Peningkatan SDM di Bidang Keamanan Informasi	291.870.000		
		37. Program Pelayanan Keamanan Informasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	285.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		38. Program Pengelolaan Data Center	250.000.000		
		39. Program Peningkatan SDM Pengelolaan Infrastruktur TIK	100.000.000		
		40. Program Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	500.000.000		
		41. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		42. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	20.300.000		7. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		43. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	865.111.048		8. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		44. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	332.000.000		9. DINAS PETERNAKAN
		45. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	20.300.000.000		10. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Total Pagu Program Prioritas I			289.930.377.820	29,49%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
2.	Penguatan Potensi Ekonomi Kerakyatan	46. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	545.000.000		1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		47. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	450.000.000		2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		48. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	512.750.000		3. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		49. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	190.000.000		
		50. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	211.226.500		
		51. Program Peningkatan Perekonomian Daerah	225.000.000		4. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		52. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	422.416.200		5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					TERPADU SATU PINTU
		53. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	149.843.800		
		54. Program Pelayanan Perijinan	131.106.640		
		55. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100.000.000		6. DINAS PERDAGANGAN
		56. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	175.000.000		
		57. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	200.000.000		
		58. Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	719.215.950		
		59. Program Pembangunan/Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	8.706.688.600		
		60. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	200.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		61. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	200.000.000		7. DINAS PETERNAKAN
		62. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	841.150.000		8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		63. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.200.000.000		
		64. Program Pengembangan Kemitraan	460.000.000		
		65. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	175.000.000		9. DINAS PERIKANAN
		66. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	10.300.000.000		10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		67. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	125.000.000		
		68. Program Penataan Struktur Industri	310.000.000		
		69. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	814.000.000		
		70. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-		
		71. Program Transmigrasi Lokal	69.187.800		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Total Pagu Program Prioritas II			27.432.585.490	2,79%	
3.	Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	72. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	800000000		1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		73. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000		
		74. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.495.000.000		2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		75. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.478.000.000		
		76. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.750.000.000		
		77. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	420.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		78. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.160.000.000		
		79. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	612.945.390		3. DINAS KETAHANAN PANGAN
		80. Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan	271.771.985		
		81. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	204.000.000		4. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		82. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.148.589.000		
		83. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	328.000.000		
		84. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	110.000.000		
		85. Program Peningkatan Produksi Pertanian	2.375.000.000		
		86. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	1.631.900.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		87. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	4.198.800.000		
		88. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	21.110.000		
		89. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	0		5. DINAS PERIKANAN
		90. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	75.000.000		
		91. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	75.000.000		
		92. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	261.000.000		
		93. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	30.000.000		
		94. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	212.500.000		
		95. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	0		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		96. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut	0		
		97. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.450.000.000		
		98. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	750.000.000		
		99. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.000.000.000		
Total Pagu Program Prioritas III			53.358.616.375	5,43%	
4.	Peningkatan Derajat Pendidikan Bagi Masyarakat	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.115.543.050		1. DINAS PENDIDIKAN
		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	33.447.599.817		
		3. Program Pendidikan Non Formal	191.674.000		
		4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.838.702.950		
		5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.691.086.800		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		6. Program Peningkatan Operasional Pendidikan	3.128.717.950		
		7. Program pengembangan lingkunagn sehat sekolah	1.712.833.192		
		8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	575.000.000		2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Total Pagu Program Prioritas IV			43.701.157.759	4,44%	
5.	Peningkatan Derajat Kesehatan	9. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.283.324.025		1. DINAS KESEHATAN
		10. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	93.392.624.107		
		11. Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000		
		12. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	956.665.000		
		13. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	438.560.000		
		14. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.840.190.000		
		15. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	660.720.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		16. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	150.000.000		
		17. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	16.394.400.000		
		18. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.075.000.000		
		19. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	80.000.000		
		20. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.431.967.500		
		21. Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.500.000.000		
		22. Program Keselamatan Kerja dan Olahraga	46.612.000		
		23. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	514.151.700		
		24. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	5.104.000.140		2. RSUD SYAMRABU
		25. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	5.200.000		
		26. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	59.470.900		
		27. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	450.400.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		28. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.197.823.100		
		29. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	587.222.350		
		30. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	111.303.000.000		
		31. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	350.000.000		3. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		32. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100.000.000		
		33. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	75.000.000		
		34. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	50.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		35. Program Keluarga Berencana	630.000.000		
		36. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75.000.000		
		37. Program Pelayanan Kontrasepsi	350.000.000		
		38. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	620.000.000		
		39. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	200.000.000		
		40. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	70.000.000		
		41. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	60.000.000		
		42. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	50.000.000		
		43. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	90.000.000		
		44. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	60.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
Total Pagu Program Prioritas V			266.401.330.822	27,09%	
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa	1. Program Perencanaan Sosial Budaya	625.000.000		1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	330.000.000		2. DINAS SOSIAL
		3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	140.000.000		
		4. Program Pembinaan Anak Terlantar	125.000.000		
		5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000		
		6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	50.000.000		
		7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	340.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8. Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	190.000.000		
		9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	800.000.000		
		10. Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	116.380.000		3. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		11. Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial	19.800.000		
		12. Program Pengembangan Wawasan Keagamaan	966.845.000		
		13. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	19.800.000		
		14. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.283.071.249		
		15. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.450.000.000		
		16. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.746.932.808		
		17. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.969.030.600		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99.453.381		
		19. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	290.000.000		4. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		20. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	672.000.000		
		21. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	75.000.000		
		22. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	415.000.000		
		23. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	115.000.000		
		24. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	485.000.000		
Total Pagu Program Prioritas VI			13.423.313.038	1,37%	

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
7.	Perwujudan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.302.050		1. DINAS PENDIDIKAN
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.772.021.420		
		3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		4. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	16.495.748.200		
		5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.807.967.750		2. DINAS KESEHATAN
		6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		7. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	17.498.788.411		
		8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	95.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.655.400		3. RSUD SYAMRABU
		10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		11. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.532.650.000		
		12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000		4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		15. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.265.000.000		
		16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512.327.900		5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.770.050		
		18. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.228.509.850		
		19. Program Pengembangan Perumahan	13.750.000.000		
		20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	990.000.000		6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000		
		22. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.228.000.000		
		23. Program Pengembangan Data/Informasi	660.000.000		
		24. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.000.000		
		25. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.965.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.157.300		
		27. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000		
		28. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		29. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	575.177.500		
		30. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	950.000.000		
		31. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.000.000		7. DINAS PERHUBUNGAN
		32. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.550.000.000		
		33. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000		
		34. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.000.000		
		35. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		36. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	7.001.461.685		
		37. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.575.000.000		8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		38. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		39. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		40. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.970.000.000		
		41. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450.000.000		9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		42. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		43. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.050.000.000		
		44. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.000.000		10. DINAS KEPENDUDUKAN
		45. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		46. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		47. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.798.084.255		
		48. Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.881.996.425		
		49. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.184.000.000		11. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		50. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.500.000		
		51. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		52. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.770.000.000		
		53. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.717.000.000		12. DINAS SOSIAL
		54. Program Peningkatan Pengembangan Sistem	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		55. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.341.201.700		
		56. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		13. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		57. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		58. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	879.315.000		
		59. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.000.000		14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		60. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	198.000.000		
		61. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		62. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	9.555.000.000		
		63. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	135.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		64. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	495.000.000		
		65. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	150.000.000		
		66. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	125.000.000		
		67. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	150.000.000		
		68. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.000.000		15. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		69. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		70. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.485.000.000		
		71. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	50.000.000		
		72. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	350.000.000		
		73. Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.885.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		74. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625.000.000		16. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		75. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		
		76. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		
		77. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		78. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	577.740.550		
		79. Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	250.000.000		
		80. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	175.000.000		
		81. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	2.900.000.000		
		82. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.500.000		17. BAGIAN UMUM

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		83. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		84. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		85. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		86. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	21.324.076.700		
		87. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.072.585.800		
		88. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100.000.000		
		89. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.391.530		18. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		90. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		91. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja	407.878.900		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Satuan Unit Kerja			
		92. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	303.600.000		
		93. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.580.866		19. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		94. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000		
		95. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	635.779.499		
		96. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	193.000.000		
		97. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		20. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		98. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		99. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	628.190.600		
		100. Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	200.000.000		
		101. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.945.000		21. BAGIAN HUKUM
		102. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		103. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000		
		104. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	591.000.000		
		105. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.075.000.000		
		106. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000		22. BAGIAN ORGANISASI
		107. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.000.000		
		108. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		109. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	486.909.800		
		110. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	35.000.000		
		111. Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	171.000.000		
		112. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	58.000.000		
		113. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	105.000.000		
		114. Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	116.700.000		
		115. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	97.513.400		
		116. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.804.945.625		23. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
		117. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76.583.925		
		118. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.152.650		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		119. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		120. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.617.689.700		
		121. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.381.812.700		
		122. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.250.000		24. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		123. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.300.000		
		124. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		125. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	677.300.000		
		126. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000		
		127. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	650.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		128. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.500.000		25. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
		129. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		
		130. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.000.000		
		131. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000		
		132. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		133. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	901.000.000		
		134. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	620.000.000		
		135. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.300.000		26. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		136. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.209.400		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		137. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	594.131.690		
		138. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.000.000		27. SEKRETARIAT DPRD
		139. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	475.000.000		
		140. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.184.001.499		
		141. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	6.179.001.499		
		142. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	22.804.629.853		
		143. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran	1.930.176.637		
		144. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.300.000		28. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		145. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	196.130.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Aparatur			
		146. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		147. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	556.402.800		
		148. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	24.500.000		
		149. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600.000.000		29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		150. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000		
		151. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		152. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.053.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		153. Program Pendidikan Kedinasan	700.000.000		
		154. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	4.880.000.000		
		155. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.169.500.000		
		156. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500.000.000		30. INSPEKTORAT
		157. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000		
		158. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		159. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.338.600.000		
		160. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.152.069.400		
		161. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000		
		162. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	670.000.000		31. DINAS

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Aparatur			PERDAGANGAN
		163. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		164. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.065.200.000		
		165. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	240.000.000		
		166. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		32. KECAMATAN BANGKALAN
		167. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	713.400.000		
		168. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		169. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.182.630.000		
		170. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.771.800		33. KECAMATAN SOCAH
		171. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	25.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Aparatur			
		172. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		173. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	519.254.800		
		174. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.000		34. KECAMATAN KAMAL
		175. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000		
		176. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		177. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	337.000.000		
		178. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		35. KECAMATAN LABANG
		179. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000		
		180. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		181. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		182. Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		183. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.000.000		36. KECAMATAN MODUNG
		184. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000		
		185. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		186. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	392.412.050		
		187. Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		188. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.000.000		37. KECAMATAN KWANYAR
		189. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		
		190. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		191. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		192. Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		193. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		38. KECAMATAN TRAGAH
		194. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.500.000		
		195. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		196. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		197. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	421.333.600		
		198. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.658.000		39. KECAMATAN BLEGA
		199. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000		
		200. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		201. Program Peningkatan Pengembangan Sistem	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		202. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	592.129.200		
		203. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		40. KECAMATAN KONANG
		204. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.655.000		
		205. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		206. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		207. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	490.124.000		
		208. Program peningkatan kinerja kecamatan	9.750.000		
		209. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.750.000		41. KECAMATAN GALIS
		210. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.738.550		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		211. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		212. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		213. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	572.694.250		
		214. Program peningkatan kinerja kecamatan	15.750.000		
		215. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.269.000		42. KECAMATAN TANAH MERAH
		216. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		217. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		218. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	426.250.000		
		219. Program peningkatan kinerja kecamatan	15.000.000		
		220. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		43. KECAMATAN BURNEH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		221. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		222. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	185.000.000		
		223. Program peningkatan kinerja kecamatan	4.000.000		
		224. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		44. KECAMATAN AROSBAYA
		225. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		226. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		227. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	449.688.300		
		228. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000		45. KECAMATAN GEGER
		229. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		230. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		231. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	256.873.500		
		232. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000		46. KECAMATAN KLAMPIS
		233. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		234. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	503.353.000		
		235. Program peningkatan kinerja kecamatan	32.000.000		
		236. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		47. KECAMATAN TANJUNGBUMI
		237. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.000.000		
		238. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		239. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	457.568.750		
		240. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		48. KECAMATAN SEPULUH

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		241. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.419.700		
		242. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		243. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		244. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	398.015.200		
		245. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.000.000		49. KECAMATAN KOKOP
		246. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.000.000		
		247. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		
		248. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		249. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	90.000.000		
		250. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	400.000.000		50. BADAN PENDAPATAN

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Aparatur			DAERAH
		251. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000		
		252. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		253. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.585.000.000		
		254. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.167.950.000		
		255. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	595.774.000		
		256. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892.450.000		51. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		257. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		258. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	265.000.000		
		259. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja	3.089.050.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Satuan Unit Kerja			
		260. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.296.105.500		
		261. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	1.027.100.000		
		262. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		52. DINAS KETAHANAN PANGAN
		263. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		264. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	895.000.000		
		265. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.665.000.000		53. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		266. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		267. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja	1.150.957.592		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		Satuan Unit Kerja			
		268. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		
		269. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335.489.600		54. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		270. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		271. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.355.000.000		
		272. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		
		273. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100.000.000		
		274. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	160.000.000		
		275. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan	30.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		276. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	35.000.000		
		277. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.339.000.000		55. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		278. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000		
		279. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		280. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.560.936.333		
		281. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	845.600.000		56. DINAS PETERNAKAN
		282. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		283. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.062.208.255		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		284. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	183.000.000		
		285. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.043.500.000		
		286. Program Peningkatan SDM Petani	25.000.000		
		287. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.400.000		57. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		288. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		289. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.733.396.050		
		290. Program Pengembangan Nilai Budaya	110.000.000		
		291. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.017.743.100		
		292. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	477.375.000		
		293. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.185.000.000		58. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		294. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		295. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.085.000.000		
		296. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	765.000.000		59. DINAS PERIKANAN
		297. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		298. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.354.986.840		
		299. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		
		300. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		60. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		301. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		302. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.118.517.000		
		303. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.048.976.950		

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		304. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100.000.000		
		305. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	150.000.000		
		306. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	95.000.000		
Total Pagu Program Prioritas VII			288.980.219.839	29,39%	
TOTAL PAGU SEMUA PROGRAM PRIORITAS			983.227.601.143	100%	

Tabel 4.6 di atas menunjukkan bahwa prioritas pembangunan pertama, yaitu Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki alokasi anggaran terbesar sebesar 29,49%. Sedangkan, alokasi anggaran terbesar kedua ditujukan untuk prioritas pembangunan ketujuh, yaitu Perwujudan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat yang Prima dan Terpercaya, dengan alokasi sebesar 29,39%. Prioritas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat yang merupakan prioritas pembangunan keempat hanya memiliki alokasi anggaran sebesar 4,44%. Dengan demikian, arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 adalah lebih menekankan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah serta peningkatan kualitas pelayanan masyarakat pada sektor birokrasi. Adapun matrik 4.7 akan menjabarkan tentang keterkaitan antara prioritas pembangunan dengan program terhadap indikator dan target serta OPD yang bertanggungjawab pada masing-masing program tersebut.

Tabel 4.7.
Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Dengan Program Terhadap Indikator Dan Target Serta Opd Yang Bertanggungjawab
Kabupaten Bangkalan Tahun 2018

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
I	Percepatan pembangunan infrastruktur	1) Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	NA	NA	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2) Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	NA	NA	
		3) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan ber kondisi baik	85,00%	
		4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persen panjang jalan dan jembatan yang terpenuhi	85,21%	
		5) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	58,70%	
		6) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan	NA	NA	
		7) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	NA	NA	
		8) Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase saluran drainase/gorong-gorong ber kondisi baik	98,20%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		9) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Prosentase Rumah Tangga bersanitasi baik	50%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		10) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	NA	NA	
		11) Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas	NA	NA	
		12) Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	NA	NA	
		13) Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	Prosentase rekomendasi dan pengembangan bidang inovasi dan teknologi yang ditindaklanjuti	100%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		14) Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	NA	
		15) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase angkutan umum yang layak fungsi	74%	DINAS PERHUBUNGAN
		16) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	NA	NA	
		17) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan terminal dan parkir	84,20%	
		18) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Persentase rambu yang terpasang dan layak fungsi	80%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		19) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	NA	NA	
		20) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi	NA	NA	
		21) Program Perencanaan Transportasi	Persentase rencana pengadaan sarana dan prasarana transportasi	50%	
		22) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase ketersediaan data center	70%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		23) Program Operasional Monitoring Issue Publik	NA	NA	
		24) Program Pengumpulan Jajak Pendapat/Survey	NA	NA	
		25) Program pengelolaan opini dan aspirasi publik	NA	NA	
		26) Program Layanan Pengaduan Masyarakat	NA	NA	
		27) Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	NA	NA	
		28) Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Persentase kebijakan yang harus disebarluaskan	70%	
		29) Program kerjasama informasi dan media massa	Persentase jumlah penduduk yang menerima paparan kebijakan	70%	
		30) Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	Persentase pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi	70%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		31) Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	NA	NA	
		32) Program peningkatan SDM bidang TIK	NA	NA	
		33) Program Pelaksanaan Audit TIK	NA	NA	
		34) Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	NA	NA	
		35) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Persentase ketersediaan data center	70%	
		36) Program Peningkatan SDM di Bidang Keamanan Informasi	NA	NA	
		37) Program Pelayanan Keamanan Informasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	NA	NA	
		38) Program Pengelolaan Data Center	NA	NA	
		39) Program Peningkatan SDM Pengelolaan Infrastruktur TIK	NA	NA	
		40) Program Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	NA	NA	
		41) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	NA	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		42) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	NA	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		43) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	A	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		44) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Teknologi yang Dimanfaatkan	5	DINAS PETERNAKAN
		45) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	jumlah sarana olahraga	18 paket	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA
II	Penguatan Potensi Ekonomi Kerakyatan	1) Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	NA	NA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2) Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Prosentase rekomendasi penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan yang ditindaklanjuti	100%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		3) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah LKM non BPR/KSP	5 LKM/KSP	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		4) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah bantuan pemerintah kepada koperasi dan UMKM	0	
		5) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Jumlah koperasi aktif	2 Koperasi	
		6) Program Peningkatan Perekonomian Daerah	NA	NA	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		7) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase sistem kemitraan usaha besar dan kecil menengah yang terealisasi	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		8) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase sarana optimalisasi promosi potensi investasi dan produk unggulan di Kabupaten Bangkalan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		9) Program Pelayanan Perijinan	Persentase jumlah penerbitan ijin tepat waktu	100%	
		10) Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah promosi (pameran)	1 kali	DINAS PERDAGANGAN
		11) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Frekuensi operasi pasar	1 kali	
		12) Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	70 Orang	
		13) Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	NA	NA	
		14) Program Pembangunan/Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	cakupan pasar (fasilitas perdagangan) yang di perbaiki	10,34%	
			Prosentase perdagangan yang disiplin aturan	12,35%	
			Peningkatan dan pengembangan pengelolaan pasar	100,00%	
		15) Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Illegal	NA	NA	
		16) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Jumlah produksi hasil ternak yang terpasarkan	1.500.000 ekor	DINAS PETERNAKAN

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		17) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah keikutsertaan festival seni budaya di tingkat regional dan nasional	5	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		18) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Jumlah destinasi Wisata	19	
		19) Program Pengembangan Kemitraan	NA	NA	
		20) Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	NA	NA	DINAS PERIKANAN
		21) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah Pembinaan Pengrajin	10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		22) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	NA	NA	
		23) Program Penataan Struktur Industri	NA	NA	
		24) Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	Persentase Peningkatan atau pertumbuhan jumlah IKM dan Industri kreatif	2,91%	
		25) Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	NA	NA	
		26) Program Transmigrasi Lokal	NA	NA	
III	Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas, Pengelolaan Sumber Daya Alam	1) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	NA	NA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
	dan Pelestarian Lingkungan Hidup				
		2) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	NA	NA	
		3) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	80%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		4) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	95%	
		5) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase perlindungan dan konservasi SDA	45%	
		6) Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase data lingkungan dan akses informasi SDA dan LH	45%	
		7) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Prosentase luas RTH Publik terhadap luas perkotaan	18%	
		8) Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Prosentase Pola Pangan Harapan (PPH)	92,50%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		9) Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan	Jumlah rumah tangga yang belum memiliki industri	10	
		10) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok tani yang dibina	50	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		11) Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Jumlah peningkatan produktivitas padi dan jagung (kw/ha)	- Padi: 59.0 - Jagung: 27.8	PERKEBUNAN
		12) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	Jumlah unit usaha pengolahan yang dibina (unit usaha)	4	
		13) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Jumlah alsintan yang diadakan	40 Unit	
		14) Program Peningkatan Produksi Pertanian	Cakupan Luas lahan yang teririgasi teknis	9.000 Ha	
		15) Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	jumlah gapoktan yang dibina	10	
		16) Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	Jumlah jaringan irigasi yang diadakan	15 unit	
		17) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	Jumlah peningkatan produktivitas tanaman perkebunan (kg/ha)	- Tebu : 79720- Kelapa : 935.11- Jambu Mente : 2630- Cabe Jamu : 766.1- Pocok : 2204.75	
		18) Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	NA	NA	DINAS PERIKANAN
		19) Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	NA	NA	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		20) Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	NA	NA	
		21) Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	4,99%	
		22) Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	0,99%	
		23) Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	NA	NA	
		24) Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	NA	NA	
		25) Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut	NA	NA	
		26) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	NA	NA	
		27) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	NA	NA	
		28) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	NA	NA	
IV	Peningkatan Derajat Pendidikan Bagi Masyarakat	1) Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	94,00%	DINAS PENDIDIKAN
			Angka Partisipasi Murni (APM) PAUD	91,00%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Angka Melek Huruf	87,65%	
		2) Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	99,95%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	98,50%	
			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	0,09%	
			Angka Lulusan (AL) SD/MI/Paket A	100%	
			Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	85,00%	
			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	94,00%	
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	83,00%	
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	0,08%	
			Angka Lulusan (AL) SMP/MTs/Paket B	99,96%	
			Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	75,00%	
		3) Program Pendidikan Non Formal	Angka Melek Huruf	87,65%	
		4) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV		
			- SD/MI	100%	
			- SMP/MTs	100%	
			- SMA/K/MA	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Persentase Guru yang telah lulus Sertifikasi untuk jenjang Pendidikan :		
			- SD/MI	90,00%	
			- SMP/MTs	90,00%	
			- SMA/K/MA	90,00%	
			Rasio guru/murid SD/MI	1: 20 guru : murid	
			Rasio guru/murid SMP/MTs	1: 20 guru : murid	
		5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	5,57	
		6) Program Peningkatan Operasional Pendidikan			
		7) Program pengembangan lingkungan sehat sekolah	NA	NA	
		8) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	47.000 org	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
			Indeks gemar membaca	40	
			Jumlah perpustakaan desa / kecamatan yang terbentuk	20 perpustakaan	
V	Peningkatan Derajat Kesehatan	1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Puskesmas dengan tata kelola obat dan perbekalan kesehatan sesuai dengan standar	100%	DINAS KESEHATAN
		2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Puskesmas yang memiliki sumber daya kesehatan sesuai standar	100%	
			Jumlah rumah tangga sehat	90	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Jumlah sekolah sehat	66	
			Jumlah pondok pesantren sehat	30,8	
			Persentase ketersediaan alkes pada puskesmas sesuai standar	100%	
		3) Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sertifikasi bahan olahan pangan yang dikeluarkan	100%	
		4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Angka Kematian Ibu melahirkan /AKI (per 100000 KH)	24,98	
			Peningkatan jumlah desa siaga aktif	100	
			Peningkatan jumlah Posyandu Puri	37,5	
			Ratio Posyandu per satuan balita	15	
			Peningkatan promosi kesehatan	100	
			Cakupan rumah tangga ber PHBS	75	
			Cakupan (%) balita gizi buruk yang mendapat penanganan / perawatan	100%	
		5) Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Prevalensi kekurangan energy protein (KEP)	0,6	
			Cakupan balita mendapat vitamin A	90	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 – 24 bulan	100	
			Prevalensi Bumil KEK	100	
			Cakupan ASI Eksklusif	55	
			Prevalensi Balita Stunting	32	
			Cakupan Rumah Tangga dengan Garam Beryodium	100	
		6) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase turunnya angka kesakitan diare	10	
			Jumlah AFP Rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2,5/100.000 penduduk	
			Angka Penemuan penderita baru TB BTA (+)	70	
			Prevalensi kusta yang ditangani	1	
			Jumlah Penderita DBD ditangani	100	
			Jumlah Penderita HIV ditangani	100	
			Jumlah penderita pneumonia balita yang ditangani	70	
			Jumlah Penderita diare yang ditangani	100	
			Cakupan desa/kelurahan UCI	100	
			Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)	100	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Penanganan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	
		7) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang siap terakreditasi	15	
		8) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Persentase Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	72%	
		9) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	Persentase fasilitas kesehatan dalam kondisi baik	100%	
		10) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Angka Kematian Bayi /AKB (per 1000KH)	48,17	
			Persentase cakupan K4	97%	
			Persentase cakupan Linakes	98%	
			Persentase cakupan Komplikasi kebidanan yang ditangani	83%	
			Persentase Cakupan ibu nifas	98%	
			Persentase Cakupan Neonatus dengan komplikasi yang ditangani	78%	
			Persentase Cakupan pelayanan anak balita	85%	
		11) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	Persentase Cakupan pelayanan Lansia	75%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		12) Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	NA	NA	
		13) Program Keselamatan Kerja dan Olahraga	NA	NA	
		14) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	NA	NA	
		15) Program Pembinaan Lingkungan Sosial	Tingkat persentase ketersediaan fasilitas kesehatan akibat konsumsi rokok dan penyakit lainnya	95,85%	RSUD SYAMRABU
		16) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Tingkat persentase ketersediaan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	100%	
		17) Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan persentase pengembangan lingkungan sehat	100%	
		18) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi rumah sakit berdasarkan KARS	Paripurna	
		19) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan RS	100%	
		20) Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan persentase pendampingan kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu	100%	
		21) Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	Tingkat kemandirian keuangan rumah sakit denga	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			BLUD		
			Bed Occupancy Rate (BOR)	70%	
			Respon Time IGD	< 5 Menit sejak pasien datang	
			Respon Time Farmasi		
			a. obat jadi	≤ 20 Menit	
			b. obat racik	≤ 40 Menit	
			Cost Recovery Ratio (CRR)	120%	
		22) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Angka Partisipasi angkatan kerja perempuan	49%	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		23) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	
		24) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Persentase Organisasi/Lembaga wanita yang dibina	35%	
		25) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesenjangan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	2,5%	
		26) Program Keluarga Berencana	Persentase Pencapaian peserta KB Aktif thdp. PUS	63,5%	
		27) Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Persentase Pernikahan Dini	11%	
		28) Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Aksetor KB MKJP	20,5%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		29) Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri	Cakupan kesertaan ber- KB yang mandiri	19%	
		30) Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	Persentase PUS yang diperiksa	2,06%	
		31) Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Persentase kelompok PIK R-M/RM yang dibina	96%	
		32) Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	Cakupan Pemahaman remaja terhadap bahaya narkoba dan PMS	96%	
		33) Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Rasio Kader kelompok BKB yang terlatih	98%	
		34) Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Rasio Kader kelompok BKB, BKR, BKL yang terlatih	95%	
		35) Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	Rasio Kader kelompok BKB, BKR, BKL yang terlatih	95%	
VI	Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa	1) Program Perencanaan Sosial Budaya	NA	NA	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelayanan sosial	30	DINAS SOSIAL
		3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan kegiatan tanggap bencana alam dan bencana sosial	2	
		4) Program Pembinaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar mendapatkan pelayanan sosial	20	
		5) Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Jumlah penyandang cacat mendapatkan pelayanan sosial	20	
		6) Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	Penyelenggaraan kegiatan pembinaan eks penyandang penyakit sosial	1	
		7) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	PSKS yang terbina	18	
		8) Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Penyelenggaraan kegiatan kelembagaan kesejahteraan sosial	2 keg	
		9) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	NA	NA	
		10) Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	NA	NA	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		11) Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial	Persentase kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial yang terlaksana	100%	RAKYAT
		12) Program Pengembangan Wawasan Keagamaan	Persentase terlaksananya kegiatan pelayanan kesejahteraan dan wawasan keagamaan	100%	
		13) Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	NA	NA	
		14) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah lembaga pemberdayaan kemasyarakatan yang dibina	281	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		15) Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina	86%	
		16) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	NA	NA	
		17) Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Persentase aparat pemerintahan yang dibina	91%	
		18) Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	NA	NA	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		19) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah peserta bimbingan/sosialisasi keimanan dan ketaqwaan	150 orang	
		20) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Jumlah organisasi atau kelompok pemuda	1 organisasi	
		21) Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Jumlah kelompok usaha pemuda	100 orang	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		22) Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Jumlah peserta talkshow dan sosialisasi	1000 orang	
		23) Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah cabang olahraga yang berprestasi	6 organisasi	
		24) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Jumlah masyarakat Bangkalan yang berpartisipasi dalam olahraga rekreasi	500 orang	
			Jumlah penduduk yang melakukan olahraga	270 orang	
VII	Perwujudan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya	1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	DINAS PENDIDIKAN
		2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		4) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
				5) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		6) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		7) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		8) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase pemanfaatan teknologi informasi pada fasilitas kesehatan	100%	
		9) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	RSUD SYAMRABU
		10) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		11) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
			Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	83%	
		12) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		13) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		14) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		15) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
		16) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		17) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		18) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		19) Program Pengembangan Perumahan	Rumah tangga pengguna air bersih	60%	
			Cakupan rumah layak huni	50%	
		20) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		21) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		22) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		23) Program Pengembangan Data/Informasi	NA	NA	
		24) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		25) Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan pembangunan yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100%	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		26) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		27) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	NA	
		28) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		29) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		30) Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan			DINAS PERHUBUNGAN
		31) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	
		32) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		33) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		34) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		35) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		36) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		37) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		38) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		39) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		40) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		41) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		42) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		43) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		44) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak	100%	DINAS KEPENDUDUKAN

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			fungsi		
		45) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		46) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		47) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
			Indeks kepuasan masyarakat	100%	
		48) Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk ber-E KTP	81%	
			Persentase bayi ber-akta kelahiran	54%	
			Persentase keluarga yang memiliki KSK	60%	
		49) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		50) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		51) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		52) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	DINAS SOSIAL
		53) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		54) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		55) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
			Persentase PSKS yang mendapat pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	8%	
		56) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		57) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		58) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		59) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		60) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		61) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		62) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		63) Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	100%	
		64) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Rasio jumlah pol PP per 10.000 penduduk	4	
		65) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Rasio Jumlah Linmas per RT/dusun	1	
		66) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	NA	NA	
		67) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	NA	NA	
		68) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		69) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		70) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		71) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	NA	NA	
		72) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase kecamatan dengan Ormas dan LSM yang dibina	100%	
		73) Program Pendidikan Politik Masyarakat	NA	NA	
		74) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		75) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		76) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		77) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		78) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		79) Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Jumlah kader yang terlatih dalam kesiapsiagaan	100%	
			Jumlah dokumen peta rawan bencana	1	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Jumlah dokumen rencana kontijensi bencana	1	
		80) Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	Persentase bencana yang tertangani sesuai SPM	100%	
		81) Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	Jumlah dokumen kajian kebutuhan pasca bencana	1	
			Jumlah sarana dan prasarana yang diperbaiki akibat bencana	5	
			Jumlah daerah yang dapat pembinaan sosial ekonomi akibat bencana	3	
		82) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	BAGIAN UMUM
		83) Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
		84) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
		85) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		86) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		87) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Prosentase Pendistribusian surat yang tepat sasaran	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		88) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	NA	NA	
		89) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		90) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		91) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		92) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	NA	NA	
		93) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		94) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		95) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		96) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	NA	NA	
		97) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		98) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		99) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		100) Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase hasil monev (pengaduan kepada masyarakat) yang ditindaklanjuti	100%	
		101) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	BAGIAN HUKUM
		102) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		103) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		104) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		105) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Prosentase Produk Hukum daerah yang disahkan dan terselesaikannya penanganan Kasus	100%	
		106) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	BAGIAN ORGANISASI

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		107) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		108) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		109) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		110) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase OPD yang telah menyusun dokumen LAKIP sesuai standar	100%	
		111) Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	Persentase OPD yang telah menerapkan ketatalaksanaan pemerintahan sesuai ketentuan	100%	
		112) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	NA	NA	
		113) Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Persentase kelembagaan OPD yang tepat fungsi dan ukuran	100%	
		114) Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	Persentase komposisi aparatur yang sesuai standar pada OPD	100%	
		115) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	NA	NA	
		116) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		117) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		118) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
		119) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		120) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		121) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Persentase terlaksananya pengelola keuangan dan perlengkapan administrasi sekretariat daerah	100%	
		122) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		123) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		124) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		125) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		126) Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	NA	NA	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		127) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	NA	NA	
		128) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
		129) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		130) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		131) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		132) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		133) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		134) Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Presentase agenda protokoler terencana yang terfasilitasi	100%	
		135) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		136) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		137) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	SEKRETARIAT DPRD
		138) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	
		139) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		140) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		141) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		142) Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Jumlah Perda yang dihasilkan	17 Perda	
			Jumlah risalah rapat/sidang yang dihasilkan	NA	
		143) Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran	NA	NA	
		144) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		145) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			fungsi		
		146) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		147) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		148) Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persentase pengaduan masyarakat yang terlayani	100%	
		149) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		150) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase kelulusan peserta pendidikan dan pelatihan	100%	
		151) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		152) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		153) Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah peserta diklat fungsional yang dilaksanakan	NA	
		154) Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	presentase pelanggaran disiplin yang diselesaikan	100%	
		155) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase jabatan struktural yang terisi	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			Persentase ketersediaan aparatur sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi	20%	
			Persentase meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat	81%	
			Persentase dokumen kepegawaian yang diterbitkan tepat waktu	100%	
		156) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	90%	INSPEKTORAT
		157) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		158) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		159) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP B	20%	
		160) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase rekomendasi yang diselesaikan atas hasil pengawasan internal	90%	
			Persentase rekomendasi yang diselesaikan atas hasil pengawasan eksternal	75%	
		161) Program Peningkatan Profesionalisme tenaga	Prosentase JFA yang memiliki kompetensi sesuai jenjang	80%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		pemeriksa dan aparatur pengawasan	Prosentase JFP2UPD yang memiliki kompetensi sesuai jenjang	80%	
		162) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PERDAGANGAN
		163) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		164) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		165) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Frekuensi pengawasan barang kadaluarsa	4 Kali	
		166) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN BANGKALAN
		167) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		168) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		169) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		170) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak	100%	KECAMATAN SOCAH

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			fungsi		
		171) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		172) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		173) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		174) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN KAMAL
		175) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		176) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		177) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		178) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN LABANG
		179) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		180) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		181) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		182) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		183) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN MODUNG
		184) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		185) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		186) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		187) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		188) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN KWANYAR
		189) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
			fungsi		
		190) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		191) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		192) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		193) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN TRAGAH
		194) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		195) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		196) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		197) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		198) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN BLEGA

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		199) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		200) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		201) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		202) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		203) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN KONANG
		204) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		205) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		206) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		207) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		208) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		209) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN GALIS
		210) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		211) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		212) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		213) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		214) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		215) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN TANAH MERAH
		216) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		217) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		218) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		219) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		220) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN BURNEH
		221) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		222) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		223) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		224) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN AROSBAYA
		225) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		226) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		227) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		228) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN GEGER

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		229) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		230) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		231) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		232) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN KLAMPIS
		233) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		234) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		235) Program peningkatan kinerja kecamatan	NA	NA	
		236) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN TANJUNGBUMI
		237) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		238) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		Keuangan			
		239) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		240) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	
		241) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	KECAMATAN SEPULUH
		242) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		243) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		244) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		245) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi	100%	KECAMATAN KOKOP
		246) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		247) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		248) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		249) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		250) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BADAN PENDAPATAN DAERAH
		251) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang dibina dan meningkat skor SKPnya	100%	
		252) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		253) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	
		254) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase realisasi Pajak dan Retribusi Daerah kelompok Bumi dan Bangunan	100%	
		255) Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	Persentase realisasi Pendapatan Daerah	100%	
		256) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		257) Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	
		258) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Presentase OPD menyampaikan laporan keuangan sesuai standart akuntansi pemerintahan (SAP)	100%	
		259) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		260) Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda	WTP	
		261) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	Presentase bidang tanah bersertifikat	44%	
		262) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS KETAHANAN PANGAN
		263) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		264) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		265) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		266) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		267) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		268) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	NA	
		269) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		270) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		271) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		272) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	NA	NA	
		273) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Jumlah arsip yang dikelola	13.000 arsip	
		274) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Persentase OPD yang mengelola kearsipannya sesuai dengan ketentuan	100%	
		275) Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan	NA	NA	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		276) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	NA	NA	
		277) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		278) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	NA	NA	
		279) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		280) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		281) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase aparatur yang disiplin	100%	DINAS PETERNAKAN
		282) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		283) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		284) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Jumlah hewan sasaran kegiatan pencegahan dan penanggulangan kesehatan hewan yang ditangani	Unggas= 11.000 ekor; Sapi, Kambing, dll= 325 ekor	
		285) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Jumlah produksi hasil peternakan	Sapi : 164,5 kg/ekor	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
				Kambing :	
				15 kg/ekor	
				Ayam Ras :	
				1,1 kg/ekor	
				Telur :	
				13,68 kg/ekor	
				Susu :	
				1.744,5 lt/ek/th	
		286) Program Peningkatan SDM Petani	NA	NA	
		287) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	
		288) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		289) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		290) Program Pengembangan Nilai Budaya	Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Budaya di Daerah	2	
		291) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	8	
		292) Program Pengelolaan Keragaman Budaya	NA	NA	

DINAS KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		293) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		294) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		295) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		296) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PERIKANAN
		297) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	
		298) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		299) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase peningkatan kelompok bidang perikanan	19,23%	
		300) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur layak fungsi	100%	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		301) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang diselesaikan	100%	

No.	Prioritas Pembangunan	Program/Pembangunan	Kinerja		SKPD
			Indikator	Target	
1	2	3	4	5	6
		302) Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	Persentase ketercapaian kinerja satuan unit kerja	100%	
		303) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis Kompetensi dan produktifitas Tenaga Kerja	96	
		304) Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka	5%	
		305) Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Jumlah Pekerja / Buruh yang menjadi Peserta Program Jamsostek	1710	
		306) Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	NA	NA	

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

5.1 Pagu Indikatif Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bangkalan Untuk Tahun Anggaran 2018

Pada bab IV dijelaskan bahwa pagu indikatif prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 didasarkan pada kerangka pendanaan dan rancangan awal rencana program dan kegiatan SKPD tahun 2018 berdasarkan forum SKPD dan kecamatan, maka penentuan pagu indikatif untuk program-program prioritas juga didasarkan pada hal yang sama. Namun, untuk penentuan pagu indikatif program-program prioritas daerah ini harus juga didasarkan pada pagu indikatif prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018. Oleh karena itu, pagu indikatif program-program prioritas daerah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dapat ditentukan sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Angka Pagu Indikatif Per Prioritas Pembangunan dan Program

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1.	Percepatan pembangunan infrastruktur	1. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	10.300.000.000		1. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		2. Program Pembangunan Turap/Talud/Brojong	23.337.620.000		
		3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	28.951.500.000		
		4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	2.545.000.000		
		5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	19.990.440.000		
		6. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan/Perkotaan	52.370.000.000		
		7. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	54.768.000.000		
		8. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan/Peningkatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	14.274.953.960		
		9. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	3.770.000.000		2. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		10. Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman	20.336.256.612		
		11. Program Inventarisasi Pengembangan Kelistrikan dan Migas	4.806.000.000		
		12. Program Inventarisasi Pengembangan dan Konservasi Air Tanah	1.709.000.000		
		13. Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi	600.000.000		3. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		14. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	250.000.000		
		15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	200.000.000		4. DINAS PERHUBUNGAN
		16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.350.000.000		
		17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	391.000.000		
		18. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	3.221.550.000		
		19. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	6.525.000.000		
		20. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi	3.674.875.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		21. Program Perencanaan Transportasi	458.000.000		
		22. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	7.800.000.000		5. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		23. Program Operasional Monitoring Issue Publik	750.000.000		
		24. Program Pengumpulan Jajak Pendapat/Survey	141.000.000		
		25. Program pengelolaan opini dan aspirasi publik	105.000.000		
		26. Program Layanan Pengaduan Masyarakat	50.000.000		
		27. Program pengelolaan informasi dan komunikasi publik	50.000.000		
		28. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.067.189.200		
		29. Program kerjasama informasi dan media massa	456.177.000		
		30. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi	948.000.000		
		31. Program Pemberdayaan Teknologi Informasi dan Komunikasi	550.000.000		
		32. Program peningkatan SDM bidang TIK	500.000.000		
		33. Program Pelaksanaan Audit TIK	184.285.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		34. Program Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	330.250.000		
		35. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	200.000.000		
		36. Program Peningkatan SDM di Bidang Keamanan Informasi	291.870.000		
		37. Program Pelayanan Keamanan Informasi Sistem Elektronik Pemerintah Daerah	285.000.000		
		38. Program Pengelolaan Data Center	250.000.000		
		39. Program Peningkatan SDM Pengelolaan Infrastruktur TIK	100.000.000		
		40. Program Pengembangan Aplikasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik	500.000.000		
		41. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		6. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		42. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	20.300.000		7. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		43. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	865.111.048		8. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		44. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	332.000.000		9. DINAS PETERNAKAN

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		45. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	20.300.000.000		10. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Total Pagu Program Prioritas I			289.930.377.820	29,49%	
2.	Penguatan Potensi Ekonomi Kerakyatan	1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	545.000.000		1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	450.000.000		2. BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		3. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	512.750.000		3. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		4. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	190.000.000		
		5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	211.226.500		
		6. Program Peningkatan Perekonomian Daerah	225.000.000		4. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		7. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	422.416.200		5. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	149.843.800		
		9. Program Pelayanan Perijinan	131.106.640		
		10. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	100.000.000		6. DINAS PERDAGANGAN
		11. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	175.000.000		
		12. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	200.000.000		
		13. Program Investasi Peningkatan Infrastruktur Sarana dan Prasarana Pasar Daerah	719.215.950		
		14. Program Pembangunan/Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pasar	8.706.688.600		
		15. Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	200.000.000		
		16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	200.000.000		7. DINAS PETERNAKAN
		17. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	841.150.000		8. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		18. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1.200.000.000		
		19. Program Pengembangan Kemitraan	460.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		20. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	175.000.000		9. DINAS PERIKANAN
		21. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	10.300.000.000		10. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		22. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	125.000.000		
		23. Program Penataan Struktur Industri	310.000.000		
		24. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	814.000.000		
		25. Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai	-		
		26. Program Transmigrasi Lokal	69.187.800		
Total Pagu Program Prioritas II			27.432.585.490	2,79%	
3.	Peningkatan Produktivitas Pertanian Dalam Arti Luas, Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pelestarian Lingkungan Hidup	1. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	800.000.000		1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	500.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	14.495.000.000		2. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		4. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	12.478.000.000		
		5. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1.750.000.000		
		6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	420.000.000		
		7. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	6.160.000.000		
		8. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	612.945.390		3. DINAS KETAHANAN PANGAN
		9. Program Peningkatan Hasil Olahan Bahan Pangan	271.771.985		
		10. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	204.000.000		4. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		11. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	3.148.589.000		
		12. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian	328.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		13. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	110.000.000		
		14. Program Peningkatan Produksi Pertanian	2.375.000.000		
		15. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian Lapangan	1.631.900.000		
		16. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Pertanian	4.198.800.000		
		17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan	21.110.000		
		18. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan	0		5. DINAS PERIKANAN
		19. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumber Daya Laut	75.000.000		
		20. Program Peningkatan Mitigasi Bencana Alam Laut dan Prakiraan Iklim Laut	75.000.000		
		21. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	261.000.000		
		22. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	30.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		23. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	212.500.000		
		24. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	0		
		25. Program Pengelolaan Ekosistem Pesisir dan Laut	0		
		26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	1.450.000.000		
		27. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya	750.000.000		
		28. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.000.000.000		
Total Pagu Program Prioritas III			53.358.616.375	5,43%	
4.	Peningkatan Derajat Pendidikan Bagi Masyarakat	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.115.543.050		1. DINAS PENDIDIKAN
		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	33.447.599.817		
		3. Program Pendidikan Non Formal	191.674.000		
		4. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.838.702.950		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.691.086.800		
		6. Program Peningkatan Operasional Pendidikan	3.128.717.950		
		7. Program pengembangan lingkunagn sehat sekolah	1.712.833.192		
		8. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	575.000.000		2. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Total Pagu Program Prioritas IV			43.701.157.759	4,44%	
5.	Peningkatan Derajat Kesehatan	1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	11.283.324.025		1. DINAS KESEHATAN
		2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	93.392.624.107		
		3. Program Pengawasan Obat dan Makanan	150.000.000		
		4. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	956.665.000		
		5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat	438.560.000		
		6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	2.840.190.000		
		7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	660.720.000		
		8. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	150.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		9. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	16.394.400.000		
		10. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	1.075.000.000		
		11. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	80.000.000		
		12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat	13.431.967.500		
		13. Program Pelayanan Kesehatan Tradisional	1.500.000.000		
		14. Program Keselamatan Kerja dan Olahraga	46.612.000		
		15. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	514.151.700		
		16. Program Pembinaan Lingkungan Sosial	5.104.000.140		2. RSUD SYAMRABU
		17. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	5.200.000		
		18. Program Pengembangan Lingkungan Sehat	59.470.900		
		19. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	450.400.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		20. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	3.197.823.100		
		21. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	587.222.350		
		22. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	111.303.000.000		
		23. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	350.000.000		3. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		24. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	100.000.000		
		25. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	75.000.000		
		26. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan	50.000.000		
		27. Program Keluarga Berencana	630.000.000		
		28. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	75.000.000		
		29. Program Pelayanan Kontrasepsi	350.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		30. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Madiri	620.000.000		
		31. Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat	200.000.000		
		32. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	70.000.000		
		33. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk HIV/AIDS	60.000.000		
		34. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	50.000.000		
		35. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	90.000.000		
		36. Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU	60.000.000		
Total Pagu Program Prioritas V			266.401.330.822	27,09%	
6.	Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintah Desa	1. Program Perencanaan Sosial Budaya	625.000.000		1. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		2. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	330.000.000		2. DINAS SOSIAL
		3. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	140.000.000		
		4. Program Pembinaan Anak Terlantar	125.000.000		
		5. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	100.000.000		
		6. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	50.000.000		
		7. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	340.000.000		
		8. Program Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	190.000.000		
		9. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	800.000.000		
		10. Program Peningkatan Pelayanan Kesejahteraan Sosial	116.380.000		3. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		11. Program Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan yang Bergerak Dibidang Sosial	19.800.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		12. Program Pengembangan Wawasan Keagamaan	966.845.000		
		13. Program Pembinaan Wawasan Kebangsaan	19.800.000		
		14. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.283.071.249		
		15. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1.450.000.000		
		16. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	2.746.932.808		
		17. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1.969.030.600		
		18. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	99.453.381		
		19. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	290.000.000		4. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
		20. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	672.000.000		
		21. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	75.000.000		
		22. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	415.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		23. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	115.000.000		
		24. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	485.000.000		
Total Pagu Program Prioritas VI			13.423.313.038	1,37%	
7.	Perwujudan Pemerintah dan Pelayanan Masyarakat Yang Prima dan Terpercaya	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	83.302.050		1. DINAS PENDIDIKAN
		2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	6.772.021.420		
		3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		4. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	16.495.748.200		
		5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.807.967.750		2. DINAS KESEHATAN
		6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		7. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	17.498.788.411		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		8. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	95.000.000		
		9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	102.655.400		3. RSUD SYAMRABU
		10. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		11. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.532.650.000		
		12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	400.000.000		4. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	60.000.000		
		15. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.265.000.000		
		16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	512.327.900		5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		17. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.770.050		
		18. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.228.509.850		
		19. Program Pengembangan Perumahan	13.750.000.000		
		20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	990.000.000		6. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
		21. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.000.000		
		22. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.228.000.000		
		23. Program Pengembangan Data/Informasi	660.000.000		
		24. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	78.000.000		
		25. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1.965.000.000		
		26. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	759.157.300		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		27. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000		
		28. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		29. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	575.177.500		
		30. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan	950.000.000		
		31. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.000.000		7. DINAS PERHUBUNGAN
		32. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.550.000.000		
		33. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000		
		34. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	161.000.000		
		35. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		36. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	7.001.461.685		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		37. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.575.000.000		8. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		38. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		39. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		40. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.970.000.000		
		41. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	450.000.000		9. DINAS LINGKUNGAN HIDUP
		42. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		43. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.050.000.000		
		44. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	790.000.000		10. DINAS KEPENDUDUKAN
		45. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	50.000.000		
		46. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		47. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.798.084.255		
		48. Program Penataan Administrasi Kependudukan	3.881.996.425		
		49. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.184.000.000		11. DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		50. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.500.000		
		51. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		52. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.770.000.000		
		53. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.717.000.000		12. DINAS SOSIAL
		54. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		55. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.341.201.700		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		56. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		13. DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
		57. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		58. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	879.315.000		
		59. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	375.000.000		14. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		60. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	198.000.000		
		61. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		62. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	9.555.000.000		
		63. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	135.000.000		
		64. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	495.000.000		
		65. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	150.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		66. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	125.000.000		
		67. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	150.000.000		
		68. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	430.000.000		15. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		69. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		70. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.485.000.000		
		71. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	50.000.000		
		72. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	350.000.000		
		73. Program Pendidikan Politik Masyarakat	1.885.000.000		
		74. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	625.000.000		16. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		75. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		76. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		
		77. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		78. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	577.740.550		
		79. Program pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	250.000.000		
		80. Program kedaruratan dan logistik penanggulangan bencana	175.000.000		
		81. Program rehabilitasi dan rekonstruksi penanggulangan bencana	2.900.000.000		
		82. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	529.500.000		17. BAGIAN UMUM
		83. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		84. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		85. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		86. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	21.324.076.700		
		87. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.072.585.800		
		88. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	100.000.000		
		89. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.391.530		18. BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT
		90. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		91. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	407.878.900		
		92. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	303.600.000		
		93. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	93.580.866		19. BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN OTODA
		94. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	7.500.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		95. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	635.779.499		
		96. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	193.000.000		
		97. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		20. BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
		98. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		99. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	628.190.600		
		100. Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	200.000.000		
		101. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	87.945.000		21. BAGIAN HUKUM
		102. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		
		103. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.000.000		
		104. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	591.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		105. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	1.075.000.000		
		106. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	50.000.000		22. BAGIAN ORGANISASI
		107. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	49.000.000		
		108. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		109. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	486.909.800		
		110. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	35.000.000		
		111. Program Mengintensifkan Penanganan pengaduan masyarakat	171.000.000		
		112. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	58.000.000		
		113. Program Penataan Daerah Otonomi Baru	105.000.000		
		114. Program Penataan dan Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah	116.700.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		115. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	97.513.400		
		116. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.804.945.625		23. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
		117. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	76.583.925		
		118. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	257.152.650		
		119. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.500.000		
		120. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.617.689.700		
		121. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	1.381.812.700		
		122. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	155.250.000		24. BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		123. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.300.000		
		124. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		125. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	677.300.000		
		126. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	250.000.000		
		127. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	650.000.000		
		128. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	98.500.000		25. BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL
		129. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	50.000.000		
		130. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	95.000.000		
		131. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000		
		132. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		133. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	901.000.000		
		134. Program Peningkatan Pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	620.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		135. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	22.300.000		26. BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		136. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	51.209.400		
		137. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	594.131.690		
		138. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.750.000.000		27. SEKRETARIAT DPRD
		139. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	475.000.000		
		140. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	6.184.001.499		
		141. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	6.179.001.499		
		142. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	22.804.629.853		
		143. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan dan Perkantoran	1.930.176.637		
		144. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29.300.000		28. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		145. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	196.130.000		
		146. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		147. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	556.402.800		
		148. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	24.500.000		
		149. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	600.000.000		29. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA APARATUR
		150. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000		
		151. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		152. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.053.000.000		
		153. Program Pendidikan Kedinasan	700.000.000		
		154. Program Peningkatan Kapasitas sumberdaya aparatur	4.880.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		155. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1.169.500.000		
		156. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	500.000.000		30. INSPEKTORAT
		157. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	35.000.000		
		158. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		159. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.338.600.000		
		160. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2.152.069.400		
		161. Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	150.000.000		
		162. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	670.000.000		31. DINAS PERDAGANGAN
		163. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		164. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.065.200.000		
		165. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	240.000.000		
		166. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		32. KECAMATAN BANGKALAN
		167. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	713.400.000		
		168. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		169. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.182.630.000		
		170. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	289.771.800		33. KECAMATAN SOCAH
		171. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		172. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		173. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	519.254.800		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		174. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.000.000		34. KECAMATAN KAMAL
		175. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	350.000.000		
		176. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		177. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	337.000.000		
		178. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		35. KECAMATAN LABANG
		179. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	5.000.000		
		180. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		181. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		182. Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		183. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	75.000.000		36. KECAMATAN MODUNG

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		184. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	300.000.000		
		185. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		186. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	392.412.050		
		187. Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		188. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	80.000.000		37. KECAMATAN KWANYAR
		189. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		
		190. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		191. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	187.500.000		
		192. Program peningkatan kinerja kecamatan	5.000.000		
		193. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		38. KECAMATAN TRAGAH

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		194. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	72.500.000		
		195. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000		
		196. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		197. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	421.333.600		
		198. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	44.658.000		39. KECAMATAN BLEGA
		199. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.000.000		
		200. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		201. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		202. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	592.129.200		
		203. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		40. KECAMATAN KONANG

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		204. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	24.655.000		
		205. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		206. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		207. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	490.124.000		
		208. Program peningkatan kinerja kecamatan	9.750.000		
		209. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	15.750.000		41. KECAMATAN GALIS
		210. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	51.738.550		
		211. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		212. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		213. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	572.694.250		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		214. Program peningkatan kinerja kecamatan	15.750.000		
		215. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	48.269.000		42. KECAMATAN TANAH MERAH
		216. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		217. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		218. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	426.250.000		
		219. Program peningkatan kinerja kecamatan	15.000.000		
		220. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	365.000.000		43. KECAMATAN BURNEH
		221. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		222. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	185.000.000		
		223. Program peningkatan kinerja kecamatan	4.000.000		
		224. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		44. KECAMATAN AROSBAYA

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		225. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		226. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		227. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	449.688.300		
		228. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	75.000.000		45. KECAMATAN GEGER
		229. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		230. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		231. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	256.873.500		
		232. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	10.000.000		46. KECAMATAN KLAMPIS
		233. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		234. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	503.353.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		235. Program peningkatan kinerja kecamatan	32.000.000		
		236. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.500.000		47. KECAMATAN TANJUNGBUMI
		237. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	263.000.000		
		238. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		239. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	457.568.750		
		240. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	5.000.000		48. KECAMATAN SEPULUH
		241. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.419.700		
		242. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	10.000.000		
		243. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		244. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	398.015.200		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		245. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	31.000.000		49. KECAMATAN KOKOP
		246. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	325.000.000		
		247. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000		
		248. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	5.000.000		
		249. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	90.000.000		
		250. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	400.000.000		50. BADAN PENDAPATAN DAERAH
		251. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	55.000.000		
		252. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		253. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	2.585.000.000		
		254. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.167.950.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		255. Program Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	595.774.000		
		256. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	892.450.000		51. BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
		257. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	25.000.000		
		258. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	265.000.000		
		259. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.089.050.000		
		260. Program Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	2.296.105.500		
		261. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Asset Daerah	1.027.100.000		
		262. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100.000.000		52. DINAS KETAHANAN PANGAN
		263. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		264. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	895.000.000		
		265. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	13.665.000.000		53. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
		266. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		267. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.150.957.592		
		268. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		
		269. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	335.489.600		54. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		270. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		271. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.355.000.000		
		272. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	50.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		273. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	100.000.000		
		274. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	160.000.000		
		275. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kerasipan	30.000.000		
		276. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	35.000.000		
		277. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.339.000.000		55. DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HOLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		278. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	21.000.000		
		279. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		280. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.560.936.333		
		281. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	845.600.000		56. DINAS PETERNAKAN
		282. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		283. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.062.208.255		
		284. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	183.000.000		
		285. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.043.500.000		
		286. Program Peningkatan SDM Petani	25.000.000		
		287. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	214.400.000		57. DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
		288. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		289. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.733.396.050		
		290. Program Pengembangan Nilai Budaya	110.000.000		
		291. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1.017.743.100		
		292. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	477.375.000		
		293. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.185.000.000		58. DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		294. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		295. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	3.085.000.000		
		296. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	765.000.000		59. DINAS PERIKANAN
		297. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		298. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.354.986.840		
		299. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	25.000.000		
		300. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	250.000.000		60. DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		301. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10.000.000		
		302. Program Peningkatan dan Optimalisasi Kinerja Satuan Unit Kerja	1.118.517.000		

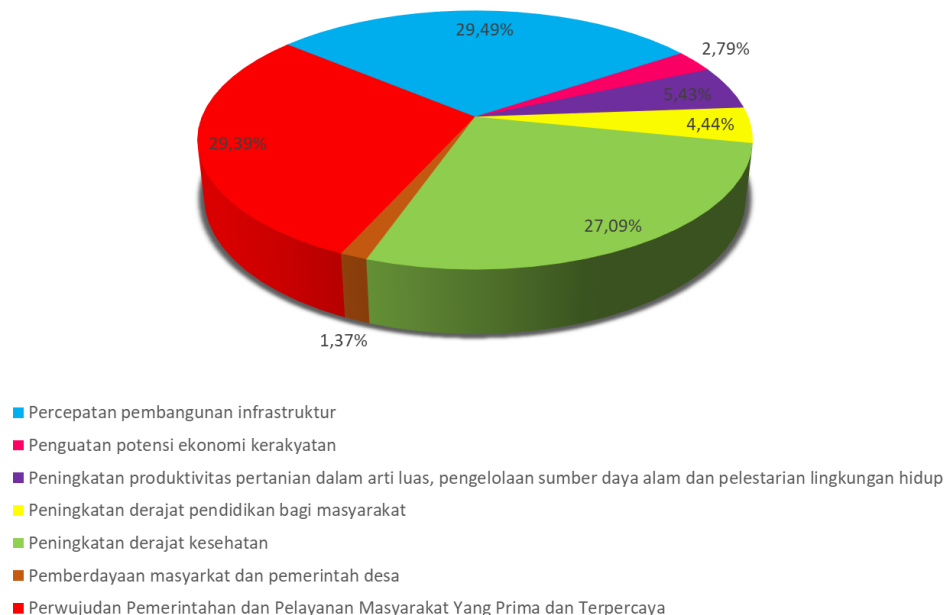
	PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	NAMA PROGRAM	PAGU PER PROGRAM	PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
		303. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1.048.976.950		
		304. Program Peningkatan Kesempatan Kerja	100.000.000		
		305. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	150.000.000		
		306. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	95.000.000		
Total Pagu Program Prioritas VII			288.980.219.839	29,39%	

Sumber: Bappeda Kab. Bangkalan 2016 (data diolah)

Dengan memperhatikan beberapa tersebut di atas, maka secara sistematis diuraikan mengenai rekapitulasi rencana program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bangkalan tahun 2018 sebagaimana disajikan pada matrik terlampir yang memuat rencana, urusan, program dan kegiatan, target program dan kegiatan, serta pagu indikatif per SKPD penanggung jawab. Persentase besaran anggaran berdasarkan prioritas pembangunan Kabupaten Bangkalan tahun 2018 dapat di gambarkan dalam diagram 5.1 Berikut ini;

Gambar 5.1
Diagram Persentase Anggaran Pada Setiap Prioritas Pembangunan Kabupaten
Bangkalan Tahun 2018

PERSENTASE PAGU PER PRIORITAS BANGKALAN
RKPD 2018
KABUPATEN BANGKALAN



BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018, merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat. RKPD ini tetap mengacu pada target-target dalam RKPD murni serta menjadi salah satu dokumen yang menjabarkan pelaksanaan tahun Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (PRPJMD) Kabupaten Bangkalan 2013– 2018.

Pelaksanaan seluruh kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik diantara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu SKPD dan antar SKPD, dengan tetap memperhatikan peran/tanggungjawab/tugas yang melekat pada SKPD di Kabupaten Bangkalan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, RKPD Perubahan ini disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangkalan Tahun 2018 merupakan bagian penting dari rangkaian Perencanaan Tahun 2018 dan menjadi acuan bagi SKPD maupun masyarakat termasuk dunia usaha di Kabupaten Bangkalan sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Untuk itu, perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

- 1) Bagi SKPD, RKPD Tahun 2018 merupakan acuan dan pedoman dalam menyusun kebijakan public dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2018.
- 2) Seluruh SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten, masyarakat, termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan serta mendukung program-program dalam RKPD Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya
- 3) Untuk menjaga efektifitas pelaksanaan program, setiap SKPD wajib melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan, melakukan tindakan koreksi yang diperlukan dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala 3 (tiga) bulanan kepada Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap sasaran, kebutuhan keuangan daerah dan lain-lain dalam tahun berjalan, maka dapat dilakukan penyesuaian RKPD melalui penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan APBD untuk setiap tahunnya.

Bangkalan, ...2017
BUPATI BANGKALAN

ttd

R.KH. Makmun Ibnu Fuad